



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

*BALITBANGDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Laporan ini merupakan gambaran keberhasilan maupun kegagalan realisasi dan capaian sasaran strategis, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur kepada berbagai pihak, *stakeholder*, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap kinerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 maupun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di pencapaian kinerja tahun berikutnya.

Demikian laporan ini kami sampaikan, ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam menyusun laporan ini. Tentunya kami juga menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, sehingga masukan dan saran dari semua pihak yang terkait sangat diharapkan guna perbaikan laporan ini kedepannya.



Samarinda, 25 Februari 2026
Kepala Balitbangda Prov. Kaltim

Dr. M. H. Fitriansyah, S.T., M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19731127 200604 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah dianggarkan pada setiap tahunnya. Laporan Kinerja Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029 yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja dan pembandingan capaian indikator sasaran. Hasil analisis capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dengan:

Indikator kinerja: “Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras untuk Penyelesaian Masalah Pembangunan dan Peningkatan Potensi Unggulan Daerah”.

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras untuk Penyelesaian Masalah Pembangunan dan Peningkatan Potensi Unggulan Daerah	%	60,61	84,85	139,99

Nilai realisasi 84,85% dengan tingkat capaian kinerja 139,99%, dianalisis dengan kriteria capaian kinerja “Sangat Tinggi”, menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin berkualitasnya hasil riset dan inovasi.

Indikator Kinerja : Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah	%	44,44	37,04	83,35%

Nilai capaian kinerja sebesar 83,35%, dianalisis pada kriteria capaian kinerja “Tinggi”, semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin tinggi kapasitas inovasi daerah. Capaian kinerja tersebut didukung oleh 10 (sepuluh) inovasi Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria matang dari pelaporan inovasi ke Kementerian Dalam Negeri pada kegiatan Fasilitasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025.

B. Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	86,32	88.17	102.14
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75.25	75.25	100

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda Tahun 2025 tercapai dengan kriteria kinerja >100%. Capaian kinerja tersebut didukung oleh optimalisasi pelayanan publik baik dalam rangkaian kegiatan riset dan inovasi ataupun kesekretariatan Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur. Target nilai AKIP 75,25 dengan realisasi 75,25 menunjukkan pencapaian kinerja 100% (sesuai target). Nilai ini berada dalam kategori BB (Sangat Baik) atau Akuntabel, yang berarti instansi telah konsisten menerapkan manajemen kinerja (perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi) dengan efisiensi.

C. Upaya dan Tindakanlanjutan Perbaikan Kinerja

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur adalah:

- Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi melalui pelayanan riset dan inovasi pada aplikasi IRIS **sebagai** pusat layanan riset dan inovasi terpadu.
- Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pemangku kepentingan dari pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
- Penguatan mekanisme kolaborasi berbasis kewenangan antar tingkat pemerintah, antar sektor dan pemangku kepentingan terkait aspek strategis riset dan pengembangan inovasi.

Upaya tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan kinerja berupa:

- Menyusun dokumen perencanaan kinerja berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan serta melakukan reviu secara berkala dan berjenjang.
- Melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian rencana aksi secara berkala.

- Penguatan basis data dan portal informasi urusan riset dan pengembangan inovasi prioritas yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terintegrasi dalam kebijakan strategis Pembangunan Daerah.
- Penguatan ASN Balitbangda/BRIDA provinsi Kalimantan Timur, penguatan fungsi kelembagaan pengampu urusan dan mitra program, penguatan sarana dan prasarana (workshop, media center), akses kemitraan pembiayaan dengan dunia usaha/hilirisasi serta akses kerjasama dalam riset pengembangan inovasi.
- Meningkatkan Budaya Kerja pada pelaksanaan AKIP tahun yang akan datang.

Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui perbaikan pelayanan publik.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan fungsi	1
C. Struktur Organisasi	7
D. Sumber Daya Manusia	7
E. Aspek Strategis Organisasi	11
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	13
G. Sarana dan Prasarana Kerja	14
BAB II PERENCANAAN KERJA	14
A. Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029	15
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	16
C. Indikator Kinerja Kunci (IKK)	17
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	21
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025	23
C. Analisis Capaian Kinerja	30
D. Capaian Kinerja Lainnya)	116
E. Realisasi Anggaran Tahun 2025	117
BAB IV PENUTUP	131
Lampiran-lampiran	

Tabel	Daftar Tabel	Hal.
Tabel 1.1	ASN Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	9
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur	14
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029	15
Tabel 2.2	Program/Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan/Sasaran Tahun 2025-2029	16
Table 2.3	Indikator Kinerja Utama Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	17
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Balitbangda Provinsi Kaltim 2025-2030	18
Table 2.5	Perjanjian Kinerja Kepala Badan Tahun 202	19
Tabel 2.6	Target Belanja Daerah Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	20
Tabel 2.7	Anggaran Belanja Per Program Strategis Tahun 2025	20
Tabel 3.1	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja	21
Tabel 3.2	Tindak lanjut atas implementasi Sistem AKIP	22
Tabel 3.3	Target Indikator Kinerja Utama dan Program Renstra 2024-2026	27
Tabel 3.4	Target Indikator Kinerja Utama dan Program Renstra 2025-2029	28
Tabel 3.5	Kategori Peringkat Kinerja	29
Tabel 3.6	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025	39
Tabel 3.7	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2025	31
Tabel 3.8	Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK dalam Pembangunan	32
Tabel 3.9	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	50
Tabel 3.10	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	51
Tabel 3.11	Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional :	51
Tabel 3.12	Capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025	55
Tabel 3.13	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	55
Tabel 3.14	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	55
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional	56

Tabel 3.16	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	57
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja Indeks Inovasi Daerah	57
Tabel 3.18	Indikator Kinerja Tahun 2025	58
Tabel 3.19	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2025	59
Tabel 3.20	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	59
Tabel 3.21	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	60
Tabel 3.22	Rekomendasi Hasil Riset Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 yang Selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029	61
Tabel 3.23	Realisasi kinerja tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026	72
Tabel 3.24	Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional :	75
Tabel 3.25	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	83
Tabel 3.26	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja Sasaran Strategis 1	83
Tabel 3.27	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2025	93
Tabel 3.28	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	95
Tabel 3.29	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	96
Tabel 3.30	Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	97
Tabel 3.31	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	98
Tabel 3.32	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja Sasaran Strategis 1	99
Tabel 3.33	Target Kinerja Sasaran Strategis 2	101
Tabel 3.34	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2025	102
Tabel 3.35	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	103
Tabel 3.36	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	104
Tabel 3.37	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	104
Tabel 3.38	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	110

Tabel 3.39	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja Sasaran Strategis 2	111
Tabel 3.40	Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	117
Tabel 3.41	Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal.
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Balitbangda Prov. Kaltim	7
Gambar 1.2	Tingkat Pendidikan PNS Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2025	8
Gambar 1.3	Tingkat Pendidikan PPPK Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2025	8
Gambar 1.4	Perbandingan ASN Berdasarkan Gender	11
Gambar 1.5	Perbandingan ASN Berdasarkan Jabatan	11
Gambar 1.6	Kolaborasi Riset dan Inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BRIDA Provinsi Kalimantan Timur)	13
Gambar. 1.7	Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BRIDA Provinsi Kalimantan Timur)	17
Gambar 3.1	Rencana Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan dalam Penerapan SAKIP Tahun 2024 pada aplikasi E-SAKIP Tahun 2025	23
Gambar 3.2	Kebijakan Berbasis Bukti (<i>Evidence Based Policy</i>)	24
Gambar 3.3	Indikator Kinerja Kepala Daerah/Indeks Inovasi Daerah (IID) pada RPJMD 2025-2029	25
Gambar 3.4	Apresiasi BRIDA Optimal Tahun 2025 oleh BRIN	26
Gambar 3.5	Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Perencanaan Kinerja Tahun 2025	79
Gambar 3.6	Rapat Pengukuran Kinerja pada e-SAKIP Tahun 2025	79
Gambar 3.7	Realiasi Kinerja Tahun 2025 pada aplikasi e-SAKIP Tahun 2025	79
Gambar 3.8	Pemberian Penghargaan, Teguran Tertulis dan Pelaksanaan Budaya Kerja Tahun 2025	80

Gambar 3.9	Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025	81
Gambar 3.10	Workshop Penguatan SAKIP Di Lingkungan ASN Balitbangda Tahun 2025	82
Gambar 3.11	Aplikasi Pengisian Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri	95
Gambar 3.12	Skor Kematangan Inovasi Pada Aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri	95
Gambar 3.13	Bukti Pengisian Realisasi Pada E-Sakip Tahun 2025 Yang Tidak Terekap Dalam Menu Rekapitulasi	109
Gambar 3.14	Formulir Keluhan Pengaduan pada aplikasi SP4N-LAPOR!	114
Gambar 3.15	Penghargaan Nasional dan Daerah Tahun 2025	116

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pada:

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 21 Tahun 2000, tanggal 26 Juni 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Balitbangda) merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, pasal 6 disebutkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah (non tipeologi).
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Transformasi kelembagaan yang semula Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menambah luas ruang lingkup urusan pemerintahan yang semula penelitian dan pengembangan (litbang) menjadi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi dan evaluasi kebijakan.

B. Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor Nomor 2 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 43 Tahun 2023 maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur telah berubah nomenklaturnya menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan

Timur. Perubahan nomenklatur tersebut juga telah mengubah lingkup tugas dan fungsinya, semula hanya di lingkup penelitian dan pengembangan (Litbang), menjadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi, dan Evaluasi Kebijakan (Litbangjirap-Inovek). Namun pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut terkendala belum dilaksanakannya pengukuhan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih menggunakan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Balitbangda Provinsi Kaltim mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi dan Evaluasi Kebijakan, serta evaluasi kebijakan, yang terintegrasi di daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balitbangda Provinsi Kaltim menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Evaluasi Kebijakan di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Evaluasi Kebijakan serta evaluasi kebijakan di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Evaluasi Kebijakan di daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Evaluasi Kebijakan di daerah;
- e. Pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Evaluasi Kebijakan di daerah;
- f. Pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

- g. Koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah;
- h. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- i. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.

2. Sekretaris

Sekretaris memimpin Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dalam internal Balitbangda/BRIDA dan pemberian dukungan teknis administrasi, serta bertanggung jawab kepada Kepala Balitbangda/BRIDA. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. Merencanakan, mengkoordinasikan pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data serta mengkoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok JF Substansi.
- c. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan penelitian pengembangan teknis di bidang Sosial dan Pemerintahan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sosial dan pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang sosial dan pemerintahan;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang sosial budaya;

- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sosial budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian penelitian dan pengembangan teknis dibidang ekonomi dan pembangunan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan ekonomi;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah, fisik dan prasarana; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi

Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang inovasi dan teknologi;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program penelitian dan pengembangan;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang inovasi dan pengembangan teknologi;

- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang diseminasi kelitbangan;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan inovasi dan pengembangan teknologi, difusi inovasi dan penerapan teknologi serta diseminasi kelitbangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan koordinasi pengadaan infrastruktur riset, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset, urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan asset, urusan perpustakaan dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas, fungsi, dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti dan Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti meliputi :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta evaluasi kebijakan di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai pancasila;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta evaluasi kebijakan;
 - c. Kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta evaluasi kebijakan di daerah;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian,

- pengembangan, pengkajian, dan penerapan, Inovasi dan inovasi, serta evaluasi kebijakan di daerah;
- e. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, inovasi dan inovasi, serta evaluasi kebijakan di daerah;
 - f. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian inovasi dan inovasi di daerah, menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan inovasi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inovasi dan inovasi, kerjasama inovasi dan inovasi, serta kemitraan inovasi dan inovasi di daerah;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang inovasi dan inovasi, kerjasama inovasi dan inovasi, serta kemitraan inovasi dan inovasi di daerah;
 - d. Pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi di daerah;
 - e. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - f. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan memiliki tugas melaksanakan kajian dan analisis kebijakan pada seluruh tahapan kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, perumusan solusi, implementasi, hingga evaluasi. Analisis kebijakan juga berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan untuk hilirisasi hasil riset dan inovasi, menyelenggarakan fungsi :
- a. Menganalisis berbagai aspek kebijakan, seperti isu-isu kebijakan, masalah yang ingin dipecahkan, alternatif solusi, dan dampak kebijakan.
 - b. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pengambil keputusan terkait kebijakan yang akan diambil atau dievaluasi dalam bentuk Naskah Kebijakan (Policy Brief).
 - c. Memantau pelaksanaan kebijakan dan mengevaluasi dampaknya, serta memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.
 - d. Membuat laporan hasil analisis, rekomendasi kebijakan, dan dokumen pendukung lainnya.

- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan instansi pemerintah, lembaga penelitian, organisasi non-pemerintah, dan pihak terkait lainnya.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

C. Struktur Organisasi

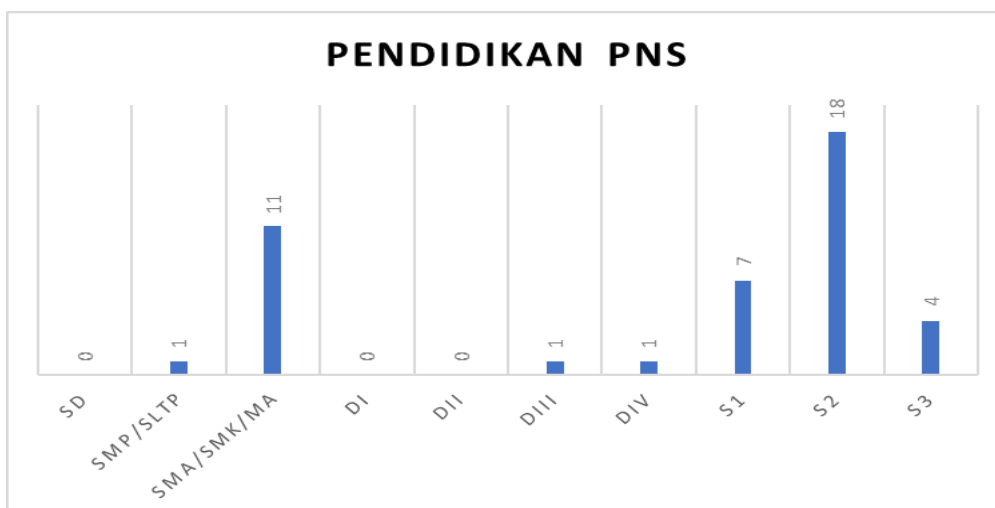
Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor Nomor 2 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 43 tahun 2023, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur telah berubah nomenklaturnya menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur ditunjukkan oleh gambar 1.1 berikut ini :



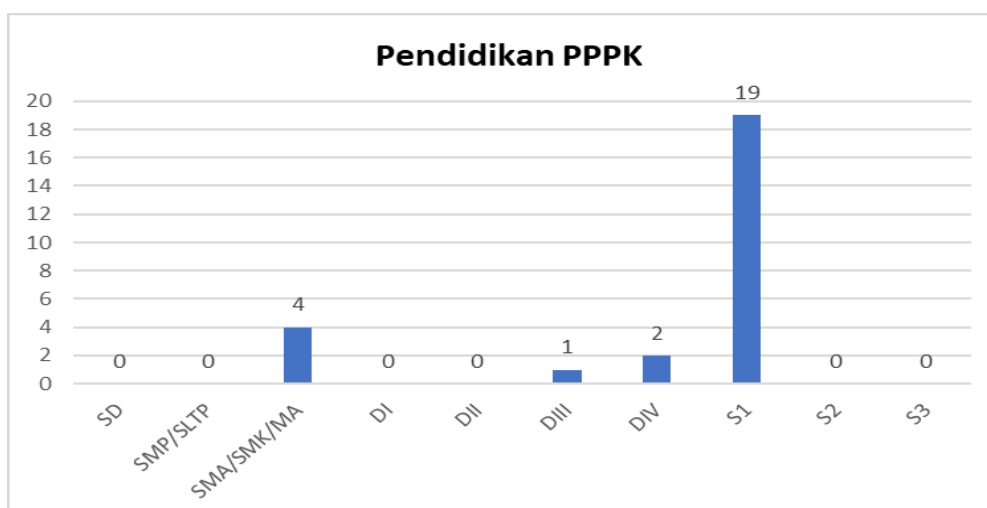
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balitbangda Prov. Kaltim

D. Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan komposisi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2025 berjumlah 43 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 26 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan total ASN sebanyak 69 Pegawai yang dirinci menurut pendidikan sebagaimana diagram Gambar berikut :



Gambar 1.2 Pendidikan PNS pada Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025



Gambar 1.3 Pendidikan PPPK pada Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Keterangan :

A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

1. S3 untuk laki-laki 4 (empat) orang dan perempuan 1 (satu) orang;
2. S2 untuk laki-laki 11 (sebelas) orang dan perempuan 7 (tujuh) orang;
3. S1 untuk laki-laki 4 (empat) orang dan perempuan 3 (tiga) orang;
4. D3 untuk laki-laki 2 (dua) orang;
5. SMA untuk laki-laki 9 (sembilan) orang dan perempuan 2 (dua) orang;
6. SMP laki-laki 1 (satu) orang.

B. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

1. S1 untuk laki-laki 12 (dua belas) orang dan perempuan 7 (tujuh) orang;

2. D4 untuk laki 1 (satu orang) dan Perempuan 1 (satu) orang;
3. D3 untuk Perempuan 1 (satu) orang;
4. SMA untuk laki-laki 2 (dua) orang dan Perempuan 2 (dua) orang.

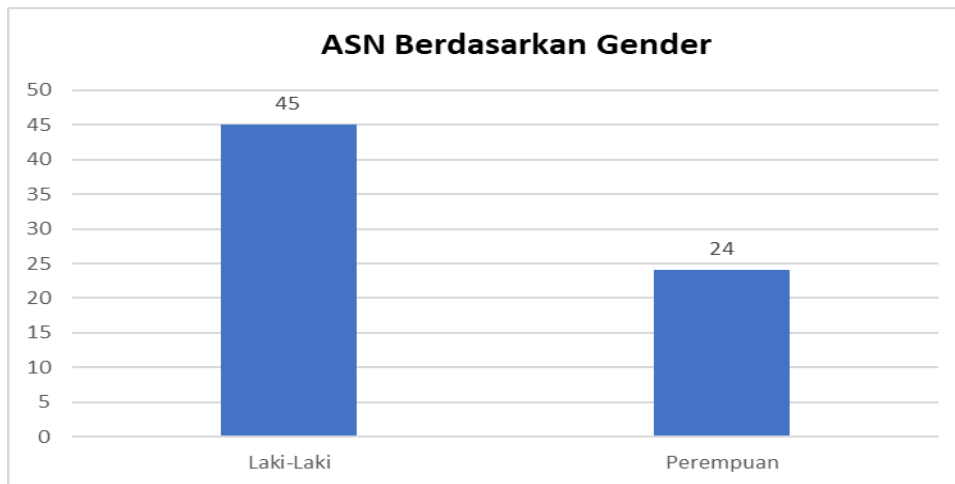
Tabel 1.1 ASN Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Nama	Jenis Kelamin		Jabatan	Pangkat/Gol	Pendidikan
		Lk-lk	Pr			
1	Mohammad Yadi Robyan Noor, S.E, M.TP.			Analisis Kebijakan Ahli Utama	Pembina Utama / IV.e	S2
2	Dr.M. Ir. H. Fitriansyah, ST., M.M			Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pembina Utama Madya / IV.d	S3
3	Charmarijaty, S.T., M.Si.			Sekretaris	Pembina Tingkat I / IV.b	S2
4	Baihaqi Hazami, ST., M.Si.			Peneliti Ahli Madya	Pembina Tingkat I / IV.b	S2
5	Dra. Endang S, S.E., M.Si			Kepala Bidang Sosial Dan Pemerintahan	Pembina Tingkat I / IV.b	S2
6	Dr. Rizki Maharani, S.Hut., M.Sc., Ph.D., PAU			Peneliti Ahli Utama	Pembina Tingkat I / IV.b	S3
7	Dr(Hut). Suroto HS, SP., MP			Peneliti Ahli Madya	Pembina Tingkat I / IV.b	S3
8	Adji Ismail, S.Sos., M.Si.			Analisis Kebijakan Ahli Muda	Pembina / IV.a	S2
9	Lenny Syafarina, S.E.,M.A.P			Kepala Bidang Inovasi Dan Teknologi	Pembina / IV.a	S2
10	Dayang Yusna Fauziah, S.E., M.A.P			Kepala Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Pembina / IV.a	S2
11	Suhartati, S.E			Kepala Sub Bagian Umum	Penata Tingkat I / III.d	S1
12	Bramantyo Adi Nugroho, S.E., M.Ec.Dev.			Peneliti Ahli Muda	Penata Tingkat I / III.d	S2
13	Adi Hendro P, S.IP., M.AP.			Peneliti Ahli Muda	Penata Tingkat I / III.d	S2
14	Gani Rachman, S.Sos			Analisis Kebijakan Ahli Muda	Penata Tingkat I / III.d	S1
15	Eny Diantari, S.Sos			Analisis Kebijakan Ahli Muda	Penata Tingkat I / III.d	S1
16	E. Novita Fahriza, S.H.			Analisis Kebijakan Ahli Muda	Penata Tingkat I / III.d	S1
17	Eka Nor Santi, S.P., M.P			Peneliti Ahli Muda	Penata Tingkat I / III.d	S2
18	Dr. Ari Sasmoko Adi, S.T.,M.T			Peneliti Ahli Muda	Penata Tingkat I / III.d	S3
19	Noorsyahramdhany Febry, S.Kom			Penelaah Teknis Kebijakan	Penata / III.c	S1
20	Muhammad Luthfie, S.E			Penelaah Teknis Kebijakan	Penata / III.c	S1
21	Puput Wahyu Budiman, S.T., M.URP			Peneliti Ahli Muda	Penata / III.c	S2
22	Agus Suryadi, A.Md			Pengadministrasi Perkantoran	Penata / III.c	D3
23	Ratih Fenty Anggriani Bintoro, S.AP.,M.Si			Peneliti Ahli Muda	Penata / III.c	S2
24	Noor Wahyuningsih, S.T., M.Ling			Peneliti Ahli Muda	Penata / III.c	S2
25	Dr. Herry Ramadhani, S.E., M.M			Penelaah Teknis Kebijakan	Penata / III.c	S3
26	Yuli Fitrianto, S.Sos., M.Si			Peneliti Ahli Pertama	Penata / III.c	S2
27	Mat Nur			Pengadministrasi Perkantoran	Penata Muda Tingkat I/III.b	SMA
28	Suharsono, ST., M.Ling			Peneliti Ahli Pertama	Penata Muda Tingkat I/III.b	S2
29	Pebiansyah Hafsari, S.H., M.H			Peneliti Ahli Pertama	Penata Muda Tingkat I/III.b	S2
30	Zhikry Fitriani, S.T.,M.M			Peneliti Ahli Pertama	Penata Muda Tingkat I/III.b	S2
31	Anwar Salim, S.Akun			Pengelola Penelitian	Penata Muda / III.a	S1
32	Rudy Rinanta			Pengadministrasi Perkantoran	Penata Muda / III.a	SMA
33	Tri Susilo			Pengadministrasi Perkantoran	Penata Muda / III.a	SMA
34	Fadliansyah			Pengadministrasi Perkantoran	Penata Muda / III.a	SMA
35	Azwar			Pengadministrasi Perkantoran	Penata Muda / III.a	SMA
36	Syafran			Pengadministrasi Perkantoran	Pengatur Tingkat I / II.d	SMA
37	Abdul Hayat			Pengadministrasi Perkantoran	Pengatur Tingkat I / II.d	SMA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Nama	Jenis Kelamin		Jabatan	Pangkat/Gol	Pendidikan
		Lk-lk	Pr			
38	Yety Oktariany			Pengadministrasi Perkantoran	Pengatur Tingkat I / II.d	SMA
39	Lita Natalia			Pengadministrasi Perkantoran	Pengatur Tingkat I / II.d	SMA
40	Budi Arfan			Pengadministrasi Perkantoran	Pengatur Tingkat I / II.d	SMA
41	Muhammad Setiawan Prabowo, S.Tr.T			Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan Terampil	Pengatur / II.c	D-III
42	Gusti Muhamad Rusdi			Pengadministrasi Perkantoran	Pengatur / II.c	SMA
43	Deni Rachman			Operator Layanan Operasional	Pengatur Muda / II.a	SMP
44	Adam Fernando Padaama. T,ST			Penata Layanan Operasional	Golongan IX	S1
45	Aji Febrianur Rahmadani, S.Kom			Penata Layanan Operasional	Golongan IX	S1
46	Aulia Febriani Putri, S.I.Kom			Penata Layanan Operasional	Golongan IX	S1
47	Aulia Noviyanti Noor, S.K.M			Penata Layanan Operasional	Golongan IX	S1
48	Eka Syachtiawati, S.Hut., M.Si			Penata Layanan Operasional	Golongan IX	S1
49	Fahrizal Anwar			Pengadministrasi Perkantoran	Golongan V	SMA
50	Hersom Maryanto, S.Kom			Penata Layanan Operasional	Golongan IX	S1
51	Ira Maya Kumala Dewi, S.Sos			Penata Layanan Operasional	Golongan IX	S1
52	Kholis Bani Sanjoyo, S.Kom			Penata Layanan Operasional	Golongan IX	S1
53	Magdalena, S.Kom			Penata Layanan Operasional	Golongan IX	S1
54	Mochammad Ichsan Ash Shiddiq			Pengadministrasi Perkantoran	Golongan V	SMA
55	Muhammad Alif Muhfi, S.T			Penata Layanan Operasional	Golongan IX	S1
56	Muhammad Rizky Maulidani, S.Pd			Penata Layanan Operasional	Golongan IX	S1
57	Rian Fahrurrahman, S.S.T			Penata Layanan Operasional	Golongan IX	S1
58	Shinta Aprilia Putri			Pengadministrasi Perkantoran	Golongan V	SMA
59	Sumanto, SP			Penata Layanan Operasional	Golongan IX	S1
60	Tri Wuri Handayani, S.Tr.Bns			Penata Layanan Operasional	Golongan IX	D4
61	Wachyudi Marzuki, S.Ak			Penata Layanan Operasional	Golongan IX	S1
62	Yanti, S.E			Penata Layanan Operasional	Golongan IX	S1
63	Yulia Margaretha, A.Md			Pengelola Layanan Operasional	Golongan VII	D3
64	Muhammad Riswanda, S.P			Penata Layanan Operasional	Golongan IX	S1
65	Yuda Aprilianto, S.Kom			Penata Layanan Operasional	Golongan IX	D4
66	Andy Dharmaputra Noor, S.Pi			Penata Layanan Operasional	Golongan IX	S1
67	Meizar Indra Nugraha, S.Psi			Penata Layanan Operasional	Golongan IX	S1
68	Chintya Kaniadea, S.M			Penata Layanan Operasional	Golongan IX	S1
69	Cintya Ajeng Pramesti Hapsari			Pengadministrasi Perkantoran	Golongan V	SMA

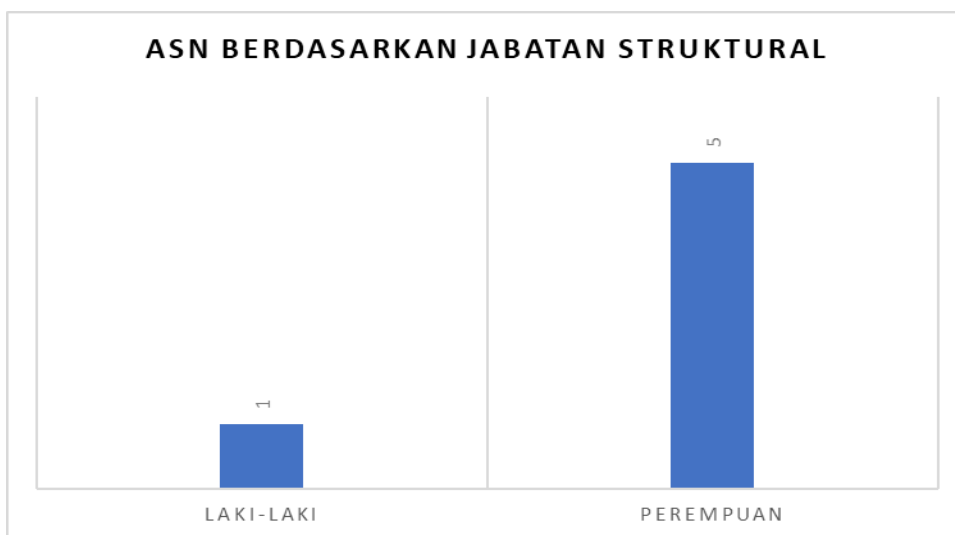
Berdasarkan table 1.1 tersebut jumlah SDM Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh laki-laki sejumlah 45 (empat puluh lima) orang dan perempuan sejumlah 24 (dua puluh empat) orang, sedangkan kesetaraan gender untuk jabatan struktural didominasi oleh wanita sejumlah 5 (lima) orang dan laki-laki 1 (satu) orang sebagai berikut :



Gambar 1.4 ASN Berdasarkan Gender pada Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Keterangan

1. Pegawai Laki-laki sebanyak 45 Orang;
2. Pegawai Perempuan sebanyak 24 Orang.



Gambar 1.5 ASN Berdasarkan Jabatan pada Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Keterangan:

- Laki-laki yang memegang jabatan struktural 1 (satu) orang;
- Perempuan yang memegang jabatan struktural 5 (lima) orang.

E. Aspek Strategis Organisasi

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur sebagai lembaga yang mengemban tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, dituntut untuk membantu mengatasi masalah-masalah pembangunan di Kalimantan Timur melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal dengan institusi

penelitian diberbagai lembaga, organisasi, masyarakat dan perguruan tinggi baik pada tingkat regional, maupun nasional dalam bentuk rumusan-rumusan sebagai sistem pendukung bagi penetapan kebijakan pembangunan daerah. Aspek strategis organisasi Balitbangda telah didukung dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sebagai berikut :

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur sebagai kolaborator Litbangjirap inovk diarahkan pada konsep scienced and evidence based policy sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah dan bahan pengambilan keputusan kebijakan pimpinan.
2. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Skema pendanaan riset dan inovasi melalui APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Lembaga Donor Riset/Yayasan, Swasta/Dunia usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur sebagai Co-CREATOR: Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi/Akademisi, Dunia Usaha, Asosiasi Profesi, Lembaga Masyarakat, Penyandang Dana Riset/Yayasan, Pelajar, lembaga litbang/pendanaan riset dari Luar Negeri, DII.
5. Kolaborasi pengembangan riset dan inovasi seluruh aspek, yang terintegrasi, dan hasilnya dimanfaatkan sebagai panduan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Pembangunan.



Gambar 1.6 Kolaborasi Riset dan Inovasi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang sangat besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 1.7 Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2025-2029

G. Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana pendukung Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mendukung kinerja:

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah	1	m2
2	Gedung	2	m2
3	Ruang Rapat	3	Ruang
4.	Ruang Cleaning Service	1	Ruang
5.	Ruang Arsip	1	Ruang
6.	Ruang Satpam	1	Ruang
7.	Ruang CWS (Coworking Space) untuk Himpunan Peneliti Kaltim	1	Ruang
8.	Ruang Dharma Wanita	1	Ruang
9.	Mushola	1	Ruang
10.	Kantin	1	Area
11	Toilet Difable	1	Ruang
12.	Toilet Umum	4	Ruang
13.	Gudang	2	Ruang
14.	Work Shop Area	1	Ruang
15.	Meubelair	397	Unit
16.	Kendaraan dinas roda empat dan roda dua	21	Unit
17.	Notebook, PC dan Printer	114	Unit
18.	Genset Generator Listrik	1	Unit
19.	Sarana Dokumentasi	3	Unit
20.	Televisi	8	Unit
21.	Layar persentasi/LC	8	Unit
22.	CCTV	34	Unit
23.	Peralatan uji coba rancang bangun bidang inovasi dan teknologi	4	Unit
24	Audio Visual System	4	Unit
25.	Jaringan Internet	1	WLAN

BAB II PERENCANAAN KERJA

A. Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan yang disusun dan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan pendanaan program, kegiatan serta sub kegiatan dengan tujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyelenggara pemerintah daerah di bidang penelitian dan pengembangan. Pada penilaian dan Evaluasi SAKIP Tahun 2025 Balitbangda provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dengan rumusan tujuan dan sasaran beserta program/kegiatan/sub kegiatan diuraikan pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d Th 2029	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	1. Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK dalam Pembangunan			%	87.88	69.70	72.73	75.76	81.82	87.88
	2. Indeks Inovasi Daerah			Indeks	67,39	62,87	64,00	65,13	66,26	67,39
		1.Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan	1.Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah	%	84.85	60.61	66.67	72.73	78.79	84.85
				2. Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah	%	62.96	44.44	51.85	55.56	59.26
		2.Meningkatnya kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	88,41	86,32	86,89	87,11	87,78	88,41
			2. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77.89	75,25	75.87	76.65	77.13	77.89

Sumber : Renstra Tahun 2025-2029

Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen bahwa hasil riset dan inovasi memiliki kualitas dalam mendukung setiap langkah pemerintah untuk mewujudkan pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang optimal, meliputi permasalahan ekonomi, sosial dan pemerintahan serta pengembangan inovasi dan teknologi.

Tabel 2.2 Program/Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan/Sasaran Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan	Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah	%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan
						2. Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan
			3. Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan			
		Meningkatnya kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi	Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah	%	Program Riset dan Inovasi	1. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan 2. Inovasi dan Inovasi
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,						
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dan RENSTRA Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama
Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan	Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah	$= \frac{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras dengan Permasalahan Pembangunan dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah}}{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah hasil riset dan inovasi yang selaras dengan permasalahan pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah - Jumlah seluruh riset dan inovasi yang dihasilkan 	Balitbangda/Brida Provinsi Kaltim	Kepala Balitbangda Kaltim(BRIDA Kaltim)
		Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	$= \frac{\text{Jumlah Inovasi yang Memenuhi Kriteria Matang}}{\text{Jumlah Inovasi Perangkat Daerah}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Jumlah inovasi yang memenuhi kriteria matang -Jumlah inovasi perangkat daerah 	Kementerian Dalam Negeri RI dan Balitbangda/Brida Provinsi Kaltim	Kepala Balitbangda Kaltim(BRIDA Kaltim)
2	Meningkatnya kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Total dari nilai persepsi per unsur -Total unsur yang terisi -Nilai penimbang 	Balitbangda/Brida Prov. Kaltim, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dunia Pendidikan, Dunia Usaha dan Mitra Kerja Terkait	Kepala Balitbangda Kaltim(BRIDA Kaltim)
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi AKIP yang terdiri dari: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan capaian kinerja	Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim	Kepala Balitbangda Kaltim(BRIDA Kaltim)

C. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintahan daerah. IKK dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai kinerja program, kegiatan, atau kebijakan yang dilaksanakan, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, serta perbaikan berkelanjutan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Indikator-indikator tersebut selanjutnya menjadi tolak ukur keberhasilan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Balitbangda Provinsi Kaltim 2025-2030

INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras dengan Isu Strategis/Permasalahan dan Potensi Unggulan Daerah	%	70	72,73	75,76	78,79	81,82	84,85	87,88	
Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam Naskah Kebijakan	%	N/A	41,18	52,94	64,71	76,47	88,24	94,12	
Persentase Pengembangan Hasil Inovasi dan Inovasi	%	N/A	40	45,71	51,43	57,14	62,86	68,57	

Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras dengan Isu Strategis/Permasalahan dan Potensi Unggulan Daerah dan Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam Naskah Kebijakan merupakan indikator capaian kinerja dari Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Persentase Pengembangan Hasil Inovasi dan Inovasi adalah capaian kinerja dari Program Riset dan Inovasi Daerah, namun pada tahun 2025 program tersebut tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah tersebut selanjutnya dibahas pada Bab Akuntabilitas Kinerja.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan perwujudan amanah dan kesepakatan dari atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja dalam melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan mampu mewujudkan kesinambungan kinerja dan menyusun program dan kegiatan prioritas yang dibiayai dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan masa peralihan kepemimpinan dari Pejabat Gubernur Kalimantan Timur kepada Gubernur Kalimantan Timur terpilih tahun 2025-2029, namun sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyeragaman indikator kinerja pada tujuan dan indikator kinerja sasaran strategis 2 sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Tahun 2025

Semula:

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	TUJUAN : Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	Persentase pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai bahan/referensi perumusan kebijakan pembangunan, pengembangan dunia usaha, industrialisasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis IPTEK (%)	69,70
		Indeks Inovasi Daerah/IID (Indeks)	62,87
2.	SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan	Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah (%)	60,61
		Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah (%)	44,44
3.	SASARAN 2 : Meningkatnya kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi	Nilai AKIP Balitbangda/BRIDA (Nilai)	75,25
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,32

Menjadi:

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	TUJUAN : Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK dalam Pembangunan	69,70
		Indeks Inovasi Daerah	62,87
2.	SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan	Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah	60,61
		Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah	44,44
3.	SASARAN 2 : Meningkatnya kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	86,32
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	75,25

Bappeda melakukan pembaharuan pada indikator tujuan:

- Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Sebagai Bahan/Referensi Perumusan Kebijakan Pembangunan, Pengembangan Dunia Usaha, Industrialisasi, dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis IPTEK, **menjadi Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK dalam Pembangunan.**
- Nilai AKIP Balitbangda/BRIDA menjadi: Nilai AKIP Perangkat Daerah.
- Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi: Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah.

1. Rencana Anggaran Tahun Anggaran 2025

Tahun 2025 Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 35.215.708,265,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2025 menjadi Rp. 27.825.197.409,- dengan realisasi anggaran Rp 25.126.822.801,- atau terealisasi sebesar 90,03 %.

Tabel 2.6 Target Belanja Daerah Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Capaian (%)
	Belanja	27,825,197,409.00	25.126.822.801.00	90.03
1.	Belanja Operasi	27,043,220.375.00	24,358,691,621.00	90.07
	- Belanja Pegawai	13,415,336,438.00	13,134,287,092.00	97.91
	- Belanja Barang dan Jasa	13,627,883,937.00	11,224,404,529.00	82.36
2.	Belanja Modal	781,997,034.00	768,131,180.00	98.23
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	781,997,034.00	768,131,180.00	98.23
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0

Sumber : Laporan Keuangan Balitbangda/BRIDA Prov. Kaltim Tahun 2025

2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun 2025 Balitbangda (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Anggaran Belanja Per Program Strategis Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
1.	Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan			
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.466.357.003	5,918,941,307	79.27
2.	Sasaran Strategis : Meningkatnya kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20,358,840,406	19,207,881,494	94.35
	Jumlah Anggaran Belanja Keseluruhan	27,825,197,409	25.126.822.801	90.03

Sumber : Laporan Keuangan Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya**

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1 Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Komponen Yang Dinilai	Nilai Tahun			Peningkatan/Penurunan Capaian 2023-2024
		2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan Kinerja	22,20	23,10	23,70	0,60
2	Pengukuran Kinerja	14,80	14,80	23,70	8,90
3	Pelaporan Kinerja	6,10	6,90	11,10	4,2
4	Evaluasi Kinerja	11,80	14,00	16,75	2,75
5	Capaian Kinerja	15,20	11,20	-	
	Nilai Hasil Evaluasi	70,10	70,00	75,25	0,25
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB	B	BB	

Sumber Data : LHE SAKIP Balitbangda Tahun 2022-2024

Nilai SAKIP Tahun 2024 yang dievaluasi pada tahun 2025 telah dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah, dan berdasarkan penilaian tersebut nilai SAKIP Balitbangda Tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (2022-2023). Kenaikan nilai SAKIP Tahun 2024 tersebut didukung oleh peningkatan persentase nilai atau bobot komponen penilaian SAKIP dari: pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

2. Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur telah menindaklanjuti hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2025 (evaluasi tahun 2024) sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tindak lanjut atas implementasi Sistem AKIP

Rencana Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan dalam Penerapan SAKIP Tahun 2025 sesuai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat Prov. Kaltim Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

NO.	REKOMENDASI BERDASARKAN LHE INSPEKTORAT	RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI			BUKTI DUKUNG	CATATAN TIM SAKIP
		NO.	RENCANA AKSI	STATUS		
1.	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja, sampai level pelaksana dan menyusun serta menginput perencanaan kinerja (pada e- Sakip/SKP dalam e-Kinerja);	1.	Melakukan perbaikan dan instruksi kepada setiap ASN (PNS dan PPPK) untuk menginput ke dalam E-SAKIP/SKP dalam e-Kinerja, secara periodik (triwulan) dengan pengawasan pimpinan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/15e_J24R3wUJQn0qIB7Baoc1tO6PoUTfT?usp=sharing	evidence sudah dipenuhi, rekapitulasi dilegalisasi oleh pimpinan.
2.	Pimpinan selalu terlibat dan hadir sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja dan mengevaluasi capaian kinerja yang dilengkapi dokumentasi yang memadai dan melakukan pemantauan Laporan pengukuran kinerja berkala dan beryan)ang terhadap capaian kinerja e-Sakip/e-Kinerja setiap pegawai;	1.	Mekanisme pengukuran kinerja akan kami perbaiki lagi dengan pengawasan dan pemantauan oleh pimpinan secara intensif	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1Q7yWHGvTKqGcg2-JqDmvQ974wNpaa2f?usp=sharing	sudah ditindaklanjuti
		2.	Pimpinan akan melakukan pemantauan terhadap pengisian E-SAKIP dan memberikan punishment melalui surat teguran bagi pegawai yang tidak mengisi sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.	Selesai		
3.	Agar Laporan Kinerja (LKJIP) : 1) Dokumen Laporan Kinerja untuk dapat memuat Sumber Daya Manusia yang merinci pegawai = ASN (PNS) dan Non ASN; 2) Menguraikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun yang dievaluasi dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra disesuaikan dengan data/dokumen yang telah disahkan.	1.	Akan dilakukan perbaikan pada LKJIP tahun 2025 yang memuat laporan kinerja pegawai ASN (PNS) dan Non ASN	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1GZwDdTWKJ36zHmeHPpOkjMjB6qTXU5?usp=sharing	sudah ditindaklanjuti
		2.	Telah terjadi kesalahan penyetoran target nilai SAKIP Balitbangda Tahun 2026 pada Renstra yaitu 80 (A), yang seharusnya sesuai dengan LKJIP 2024 adalah 78,10 (BB). Akan dilakukan evaluasi pada dokumen Renstra 2025-2029	Selesai		
4.	Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan secara memadai, yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan oleh SDM yang memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan adanya sertifikat/Surat Keterangan dan Evaluasi dilaksanakan dengan memahami kinerja, pengumpulan data, menganalisis data yang akurat dan andal, mampu mengidentifikasi masalah, memberikan rekomendasi dan tindak lanjut pada dokumen rencana aksi.	1.	Balitbangda belum memiliki staf yang memiliki sertifikat kompetensi hasil diklat SAKIP. Saat ini Balitbangda masih bergantung pada sekretaris dan seorang peneliti madya yang berasal dari Bappeda Kaltim yang memiliki pengalaman dalam evaluasi kinerja.	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1JeviXeAHFVSnu2o61MAcniVqTlbfAmv?usp=sharing	sudah ditindaklanjuti

Keterangan : Rencana Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan dalam Penerapan SAKIP Tahun 2024 tersebut telah dientry ke dalam aplikasi E-SAKIP Tahun 2025 dan telah di verifikasi oleh Tim APIP.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No.	Rekomendasi berdasarkan LHE Inspektorat	Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi	Bukti Dukung	Catatan tim SAKIP												
1.	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja, sampai level pelaksana dan menyusun serta mengurut perencanaan kinerja pada e-Sakip/SPK dalam e-Kinerja;	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Rencana Aksi</th> <th>Status</th> <th>#</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Melakukan perbaikan dan instruksi kepada setiap ASN (PNS dan PPPK) untuk mengurut ke dalam E-SAKIP/SPK dalam e-Kinerja, secara periodik (bulanan) dengan pengawasan pimpinan.</td> <td>Sesuai</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Rencana Aksi	Status	#	1.	Melakukan perbaikan dan instruksi kepada setiap ASN (PNS dan PPPK) untuk mengurut ke dalam E-SAKIP/SPK dalam e-Kinerja, secara periodik (bulanan) dengan pengawasan pimpinan.	Sesuai	1	https://drive.google.com/drive/folders/1Se_d4E3wLX0hg878poc109Pju777?usp=sharing	evidence sudah dipenuhi, rekapitulasi dilampirkan oleh pimpinan.				
No.	Rencana Aksi	Status	#													
1.	Melakukan perbaikan dan instruksi kepada setiap ASN (PNS dan PPPK) untuk mengurut ke dalam E-SAKIP/SPK dalam e-Kinerja, secara periodik (bulanan) dengan pengawasan pimpinan.	Sesuai	1													
2.	Pimpinan selalu terlibat dan hadir sebagai pembantu keputusan (Decision Make) dalam mengukur capaian kinerja dan mengevaluasi capaian kinerja yang diungkap, dokumentasi yang memadai dan melakukan pemantauan laporan pelaksanaan kinerja bulanan dan beres-beres terhadap capaian kinerja e-Sakip/Kinerja setiap pegawai;	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Rencana Aksi</th> <th>Status</th> <th>#</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Melakukan pengalihan kinerja akan kami perbaiki lagi dengan pengawasan dan pemantauan oleh pimpinan secara intensif</td> <td>Sesuai</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pimpinan akan melakukan pemantauan terhadap pengisian E-SAKIP dan memberikan punishment melalui surat teguran bagi pegawai yang tidak mengisi campur dengan batas waktu yang telah ditetapkan.</td> <td>Sesuai</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Rencana Aksi	Status	#	1.	Melakukan pengalihan kinerja akan kami perbaiki lagi dengan pengawasan dan pemantauan oleh pimpinan secara intensif	Sesuai	1	2.	Pimpinan akan melakukan pemantauan terhadap pengisian E-SAKIP dan memberikan punishment melalui surat teguran bagi pegawai yang tidak mengisi campur dengan batas waktu yang telah ditetapkan.	Sesuai	1	https://drive.google.com/drive/folders/1Q7vRH9d97Kq0g2_jdDmQ574w9aaz?usp=sharing	sudah ditindaklanjuti
No.	Rencana Aksi	Status	#													
1.	Melakukan pengalihan kinerja akan kami perbaiki lagi dengan pengawasan dan pemantauan oleh pimpinan secara intensif	Sesuai	1													
2.	Pimpinan akan melakukan pemantauan terhadap pengisian E-SAKIP dan memberikan punishment melalui surat teguran bagi pegawai yang tidak mengisi campur dengan batas waktu yang telah ditetapkan.	Sesuai	1													
3.	Agar Laporan Kinerja (LKJIP)- 1) Dokumen Laporan Kinerja untuk dapat memuat Sumber Daya Manusia yang menjadi pegawai + ASN (PNS) dan Non ASN, 2) Mengajukan perbandingan antara realisasi kinerja tahun yang diacu/dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra disesuaikan dengan data/dokumen yang telah diakuin.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Rencana Aksi</th> <th>Status</th> <th>#</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Akan dilakukan perbaikan pada LKIP tahun 2025 yang memuat laporan kinerja pegawai ASN (PNS) dan Non ASN</td> <td>Sesuai</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Telah terjadi kesalahan pengisian target nilai SAKIP Balitbangda Tahun 2025 pada Renstra yaitu SD (A) yang seharusnya sesuai dengan LKIP 2024 adalah 78,10 (BB). Akan dilakukan evaluasi pada dokumen Renstra 2025-2029</td> <td>Sesuai</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Rencana Aksi	Status	#	1.	Akan dilakukan perbaikan pada LKIP tahun 2025 yang memuat laporan kinerja pegawai ASN (PNS) dan Non ASN	Sesuai	1	2.	Telah terjadi kesalahan pengisian target nilai SAKIP Balitbangda Tahun 2025 pada Renstra yaitu SD (A) yang seharusnya sesuai dengan LKIP 2024 adalah 78,10 (BB). Akan dilakukan evaluasi pada dokumen Renstra 2025-2029	Sesuai	1	https://drive.google.com/drive/folders/1G2w0D78XUJ0t0m0wPpYQjMB6c7E03?usp=sharing	sudah ditindaklanjuti
No.	Rencana Aksi	Status	#													
1.	Akan dilakukan perbaikan pada LKIP tahun 2025 yang memuat laporan kinerja pegawai ASN (PNS) dan Non ASN	Sesuai	1													
2.	Telah terjadi kesalahan pengisian target nilai SAKIP Balitbangda Tahun 2025 pada Renstra yaitu SD (A) yang seharusnya sesuai dengan LKIP 2024 adalah 78,10 (BB). Akan dilakukan evaluasi pada dokumen Renstra 2025-2029	Sesuai	1													
4.	Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan secara memadai, yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan oleh SDM yang memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan adanya sertifikat Kursus Kepegawaian dan Evaluasi dilaksanakan dengan memahami kinerja, pengumpulan data, menganalisis data yang akurat dan andal, mampu mengidentifikasi masalah, memberikan rekomendasi dan tindak lanjut pada dokumen rencana aksi.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Rencana Aksi</th> <th>Status</th> <th>#</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Balitbangda belum memiliki staf yang memiliki sertifikat kompetensi hasil dilatih SAKIP. Saat ini Balitbangda masih bergantung pada sekretaris dan seorang peneliti muda yang berasal dari Bappeda Kalimantan yang memiliki pengalaman dalam evaluasi kinerja.</td> <td>Sesuai</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Rencana Aksi	Status	#	1.	Balitbangda belum memiliki staf yang memiliki sertifikat kompetensi hasil dilatih SAKIP. Saat ini Balitbangda masih bergantung pada sekretaris dan seorang peneliti muda yang berasal dari Bappeda Kalimantan yang memiliki pengalaman dalam evaluasi kinerja.	Sesuai	1	https://drive.google.com/drive/folders/1JwKkHfY5m2d1MAqyVtBfAm?usp=sharing	sudah ditindaklanjuti				
No.	Rencana Aksi	Status	#													
1.	Balitbangda belum memiliki staf yang memiliki sertifikat kompetensi hasil dilatih SAKIP. Saat ini Balitbangda masih bergantung pada sekretaris dan seorang peneliti muda yang berasal dari Bappeda Kalimantan yang memiliki pengalaman dalam evaluasi kinerja.	Sesuai	1													

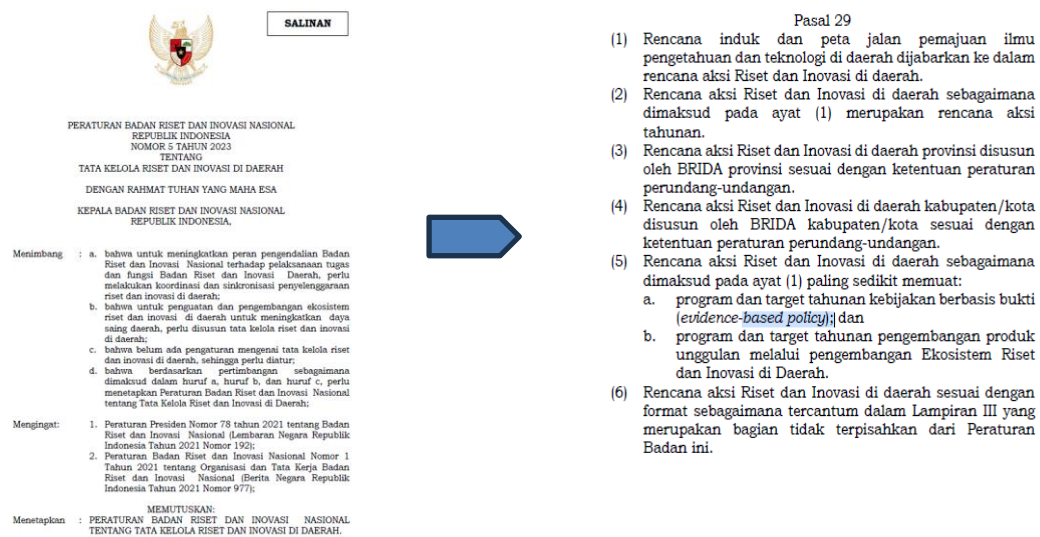
Gambar 3.1 Rencana Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan dalam Penerapan SAKIP Tahun 2024 pada aplikasi E-SAKIP Tahun 2025

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Capaian kinerja tahun 2025 merupakan masa peralihan dari Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ke Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Tahun 2025 Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pembenahan terhadap kualitas indikator kinerja dan alat ukur yang kurang memadai yang sering kali menjadi kendala dalam menilai keberhasilan dan dampak kebijakan riset serta inovasi. Menindaklanjuti hal tersebut Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur perlu mengembangkan sistem pengukuran yang komprehensif, berbasis data, dan mengikuti kaidah kebijakan nasional dan daerah. Sistem ini akan membantu memantau pelaksanaan kebijakan, mengidentifikasi kendala, serta mengevaluasi efektivitas berbagai program Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi, dan Evaluasi Kebijakan (Litbangjirap-Inovek). Berdasarkan pertimbangan tersebut Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur melakukan peningkatan kualitas cascading kinerja pada indikator kinerja utama Renstra Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada peraturan/kebijakan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
 - Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
2. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah bahwa:
- Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) memastikan bahwa sasaran strategis, fokus riset dan inovasi daerah pada kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*), pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah dalam hal pengembangan unggulan daerah dan/atau penyelesaian permasalahan prioritas daerah.
 - Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) berperan utama dalam memperkuat ekosistem riset serta mendorong kolaborasi riset antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah.



Gambar 3.2 Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence Based Policy*)

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa:
- Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, berperan dalam pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 sebagai tolok ukur pencapaian Indikator Kinerja Kepala Daerah/Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2025-2029.



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



Pasal 904

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 903 Kepala Badan mempunyai uraian tugas:

- merumuskan program kerja di lingkungan badan berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- merumuskan bahan kebijakan dan menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas dukungan teknis dan mengoordinasikan dengan seluruh perangkat Daerah di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, inovasi, evaluasi kebijakan, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah;
- merumuskan bahan kebijakan rencana alokasi penganggaran dan mengevaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, inovasi, evaluasi kebijakan, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah;
- merumuskan bahan kebijakan dalam mendukung pengembangan potensi unggulan Daerah dalam pelayanan publik terkait melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, inovasi, evaluasi kebijakan, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah untuk kesejahteraan masyarakat;

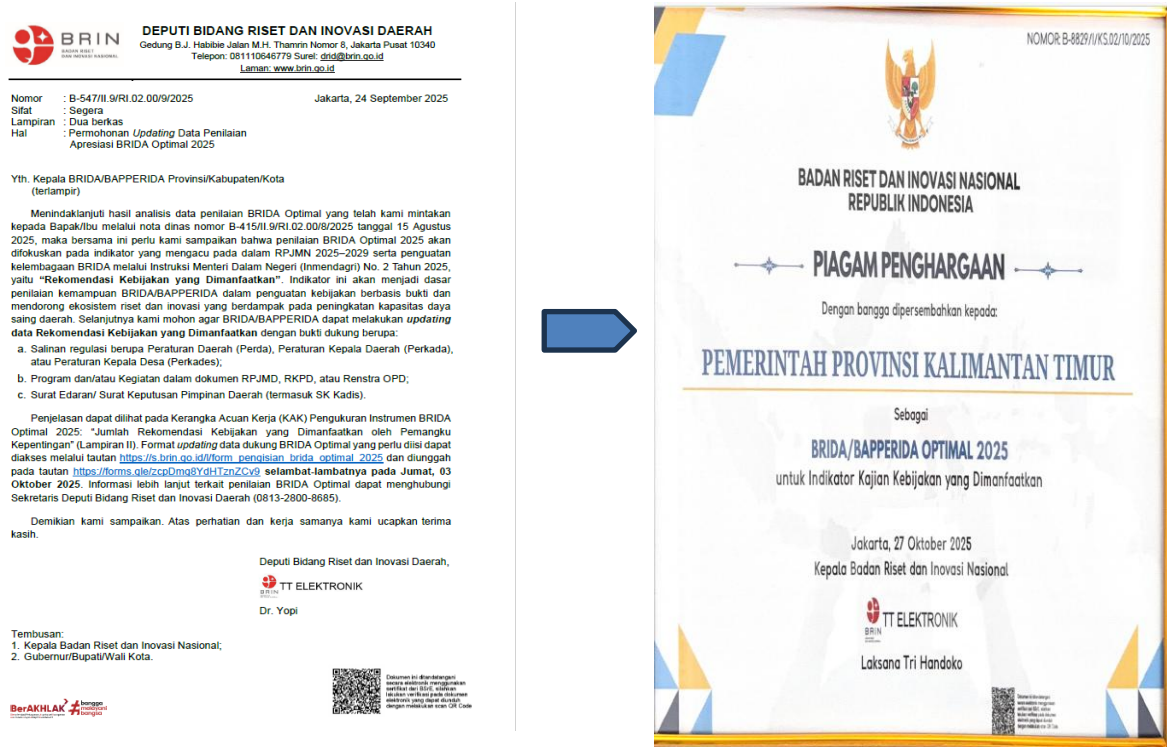


- 483 -

No	Indikator	Satuan	Berkas Tahun 2024	Tugas Indikator					Est.	
				2025	2026	2027	2028	2029		
14	Partisipasi Masyarakat (PM)	%	1,38	1,40	1,54	1,59	1,64	1,69	1,74	
15	Tingkat Partisipasi Anggaran Kerja	%	67,07	66,57	70,07	71,57	73,07	74,57	76,07	
16	Anggaran Kerja (PKD) per kapita	%	49,07	49,66-50,65	50,25-51,24	50,75-51,69	51,30-52,11	51,84-52,54	52,41-52,97	
17	Indeks Inovasi Daerah	indeks	61,74	62,07	64,00	65,13	66,26	67,39	68,52	
18	Indeks Inovasi Sains	indeks	63,04	63,44	63,84	64,25	64,65	65,05	65,45	
19	Indeks Inovasi Sains Indonesia	indeks	31,30	32,92	38,81	44,69	50,58	56,46	62,35	
20	Peris 2025 dalam Inovasi Energi Primer	%	12,14	12,40	15,73	19,06	22,39	25,72	29,05	
21	Tingkat Literasi dan Inovasi	indeks	6,69	6,7	6,8	6,9	7	7,1	7,2	
22	Pembinaan Model Tesis Baru	% PDB	35,72	35,72-35,93	35,93-36,03	36,03-36,09	36,09-36,17	36,17-36,46	36,46-37,12	
23	Ekspor Barang dan Jasa	% PDB	40,44	40,84-40,07	40,07-50,18	50,18-51,28	51,28-52,39	52,39-53,32	53,32-54,44	
24	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	indeks	5,82	6,17	6,71	6,96	7,21	7,39	7,52	
25	Program Inovasi PDB	%	37,26	24,00	24,53	25,06	25,58	26,11	26,64	
26	Rasio Pengeluaran Inovasi Inovasi Inovasi	%	76,77	80,64	81,85	83,06	84,27	85,48	86,69	
27	Pemerintah Baru Inovasi	%	31,15	25,68	26,4	27,35	28,42	29,04	29,57	
28	Rasio PDB Inovasi terhadap PDB	%	1	1,36	1,42	1,48	1,54	1,60	1,76	
29	Tingkat Inovasi	%	1,47	2,50 ± 1	2,50 ± 1	2,50 ± 1	2,50 ± 1	2,50 ± 1	2,50 ± 1	
30	Kondisi Vertikal Sains	%	n/a	10,6	10,45	10,3	10,15	10	9,85	

Gambar 3.3 Indikator Kinerja Kepala Daerah/Indeks Inovasi Daerah (IID) pada RPJMD 2025-2029

3. Penilaian Apresiasi BRIDA Optimal oleh BRIN dilakukan berdasarkan pemanfaatan riset/kajian kebijakan berbasis bukti dan optimalisasi potensi serta penyelesaian permasalahan daerah dan dilaksanakan sejak tahun 2025.



Gambar 3.4 Apresiasi BRIDA Optimal Tahun 2025 oleh BRIN

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Peringkat Daerah Tahun 2025-2029.

Peraturan-peraturan tersebut kemudian menjadi dasar dari pembaharuan pengukuran Indikator Kinerja Utama dan program Renstra Tahun 2025-2029, serta mengutamakan keselarasan capaian kinerja antara Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Target Indikator Kinerja Utama dan Program Renstra 2024-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET			KONDISI AKHIR	FORMULASI										
			2024	2025	2026												
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)										
I TUJUAN 1 : Terwujudnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang optimal																	
	Jumlah Penerapan Hasil Riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah	Riset	1	3	6	6	Jumlah Hasil RISET yang telah diimplementasikan dan bernilai manfaat (yang telah digunakan) bagi masyarakat dan pembangunan daerah										
	Jumlah Penerapan Hasil Inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah	Inovasi	1	3	6	6	Jumlah Hasil INOVASI yang telah diimplementasikan dan bernilai manfaat (yang telah digunakan) bagi masyarakat dan pembangunan daerah										
TUJUAN 2 : Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas																	
	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (predikat)	Indeks/Predikat	BB (78,50)	BB (79,30)	A (80,01)	A (80,01)	Nilai SAKIP Pemda yang menjadi acuan akuntabilitas kinerja BRIDA Kalimantan										
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (indeks)	%	85	86	86	86	Nilai survey kepuasan Pemda yang menjadi acuan pelayanan publik BRIDA Kalimantan										
II SASARAN 1 yang mendukung tujuan 1 : Meningkatnya penerapan hasil Riset dan Inovasi oleh perangkat daerah dan masyarakat																	
	Jumlah Hasil Riset yang Dapat Diterapkan (Aplikatif) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Riset	2	5	10	10	Jumlah Hasil RISET yang akan diimplementasikan bagi masyarakat dan pembangunan daerah (Stakeholders, Pihak yang Berkepentingan, dan Masyarakat)										
	Jumlah Hasil Inovasi yang Dapat Diterapkan/Aplikatif Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Inovasi	2	5	10	10	Jumlah Hasil INOVASI yang akan diimplementasikan bagi masyarakat dan pembangunan daerah (Stakeholders, Pihak yang Berkepentingan, dan Masyarakat)										
III SASARAN 2 yang mendukung tujuan 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Balitbangda																	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda	Nilai	75(BB)	77,50(BB)	78,10 (BB)	78,10 (BB)	Nilai SAKIP BRIDA Kalimantan										
	Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda	Indeks	83	84	85	85	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Survey Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan publik BRIDA Kalimantan										
IV PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																	
	Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	%	4	9	18	18	$\frac{\text{Jumlah hasil RISET yang masuk dalam dokumen Renja PD yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran}}{\text{Jumlah Seluruh usulan RISET PD Prov, Kab/Kota dan Mitra Kerja}} \times 100\%$										
	Persentase Hasil Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran	%	4	9	18	18	$\frac{\text{Jumlah hasil INOVASI yang masuk dalam dokumen Renja PD yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran}}{\text{Jumlah Seluruh usulan INOVASI PD Prov, Kab/Kota dan Mitra Kerja}} \times 100\%$										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH																	
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks/Predikat	84 Indeks	85 Indeks	85 Indeks	85 Indeks	Nilai indeks survey kepuasan masyarakat										
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen Perhitungan</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Persentase realisasi anggaran</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen Perhitungan	Bobot	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	40%	Persentase realisasi anggaran	30%	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20%	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	5%
Komponen Perhitungan	Bobot																
Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	40%																
Persentase realisasi anggaran	30%																
Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20%																
Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	5%																



**DATA DUKUNG:
RENJA DAN
DPA
PERANGKAT
DAERAH**

Tabel 3.4 Target Indikator Kinerja Utama dan Program Renstra 2025-2029

NO.	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA					FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR								
				2025	2026	2027	2028	2029									
1	TUJUAN : Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK dalam Pembangunan	%	69,70	72,73	75,76	81,82	87,88	$\frac{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK yang Dimanfaatkan dalam Pembangunan}}{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi}} \times 100\%$								
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	62,87	64,00	65,13	66,26	67,39	Penilaian Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI yang terdiri dari 2 (dua) aspek, 8 (delapan) variabel dan 36 (tiga puluh enam) indikator								
2	SASARAN 1 : Meningkatkan Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan	Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah	%	60,61	66,67	72,73	78,79	84,85	$\frac{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras dengan Permasalahan Pembangunan dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah}}{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi}} \times 100\%$								
		Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah	%	44,44	51,85	55,56	59,26	62,96	$\frac{\text{Jumlah Inovasi yang Memenuhi Kriteria Matang}}{\text{Jumlah Inovasi Perangkat Daerah}} \times 100\%$								
3	SASARAN 2 : Meningkatkan kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	86,32	86,89	87,11	87,78	88,41	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total Unsor yang Terisi Saat Survey}} \times \text{Nilai Penimbang}$								
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,25	75,87	76,65	77,13	77,89	Nilai hasil evaluasi AKIP yang terdiri dari: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan capaian kinerja								
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras dengan isu strategis/permasalahan dan potensi unggulan daerah	%	72,73	75,76	78,79	81,82	84,85	$\frac{\text{Jumlah hasil riset dan inovasi yang selaras dengan isu strategis/permasalahan pembangunan dan potensi unggulan daerah}}{\text{Jumlah seluruh hasil riset dan inovasi yang dihasilkan}} \times 100\%$								
		Persentase hasil riset dan inovasi yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/internasional/buku/haskah akademis rancangan perda/pergub	%	72,73	75,76	78,79	81,82	84,85	$\frac{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi yang Dipublikasikan}}{\text{Jumlah Seluruh Hasil Riset yang Dihasilkan}} \times 100\%$								
		Persentase hasil riset dan inovasi yang ditindaklanjuti dalam daftar Kekayaan Intelektual (KI)	%	72,73	75,76	78,79	81,82	84,85	$\frac{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi yang Ditindaklanjuti dalam Daftar Kekayaan Intelektual (KI)}}{\text{Jumlah Seluruh Hasil Riset yang Dihasilkan}} \times 100\%$								
5	Program Riset dan Inovasi	Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam naskah kebijakan (Policy Brief)	%	41,18	52,94	64,71	76,47	88,24	$\frac{\text{Jumlah Naskah Kebijakan (Policy Brief)}}{\text{Jumlah Hasil Riset}} \times 100\%$								
		Persentase pengembangan hasil invensi dan inovasi	%	40,00	45,71	51,43	57,14	62,86	$\frac{\text{Jumlah Invensi dan Inovasi yang Dikembangkan}}{\text{Jumlah Inovasi Perangkat Daerah}} \times 100\%$								
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah pengaduan atau laporan yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan atau laporan yang masuk}}$								
		Indeks Kualitas layanan Kesekretariatan	Indeks	76	76	78	78,5	79	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen Perhitungan</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Persentase realisasi anggaran</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen Perhitungan	Bobot	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	40%	Persentase realisasi anggaran	30%	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	25%
Komponen Perhitungan	Bobot																
Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	40%																
Persentase realisasi anggaran	30%																
Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	25%																
Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	5%																

DATA DUKUNG: PERDA, RPJMD, RENJA, RKA, JURNAL RISET, HKI

Untuk menilai realisasi kinerja dari indikator kinerja utama tersebut, Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur melakukan penilaian dengan berdasar pada skala nilai peringkat kinerja pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (hal 496), sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kategori Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 65	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2027

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Nilai-nilai realisasi kinerja tersebut, kemudian menjadi dasar dalam pengukuran kinerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, yang lebih lanjut tertuang pada Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan	Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah	%	60,61	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	60,61	84,85	139,99
		Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah	%	44,44	Triwulan I			
					Triwulan II			

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Triwulan III			
					Triwulan IV	44,44	37,04	83,35
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	86,32	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	86,32	88,17	102,14
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,25	Triwulan I				
				Triwulan II				
				Triwulan III				
				Triwulan IV	75,25	75,25	100	

Sumber: Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

C. Analisis Capaian Kinerja

Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan penilaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang tertuang pada aplikasi E-SAKIP Tahun 2025. Penilaian tersebut dilakukan untuk mengevaluasi hasil pengukuran kinerja dari setiap pernyataan dan capaian kinerja tujuan, sasaran dan program strategis serta hal-hal yang mendukung keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja tujuan, sasaran dan program strategis.

Capaian kinerja sasaran strategis tersebut kemudian dianalisis dengan:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif/solusi yang telah dan akan dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

I. Tujuan : Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi

Sesuai dengan Tugas dan fungsinya, Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, berperan dalam pencapaian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Tujuan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur hingga lima tahun mendatang adalah “**Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi**”, dengan indikator kinerja “Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK dalam Pembangunan”, yang mana Hasil riset dan inovasi berbasis IPTEK tersebut dapat dimanfaatkan dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian pembangunan.

A. Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK dalam Pembangunan.

Formulasi Perhitungan:

$$\text{- Target :} = \frac{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK yang Dimanfaatkan dalam Pembangunan}}{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi}} \times 100\% = \frac{23}{33} \times 100\% = 69,70\%$$

$$\text{- Realisasi:} = \frac{31}{33} \times 100\% = 93,94\%$$

$$\text{- Capaian:} = \frac{93,94}{69,70} \times 100\% = 134,78\%$$

- 23 = jumlah hasil riset dan inovasi berbasis IPTEK yang dimanfaatkan: (12 riset bidang ekonomi dan Pembangunan, 9 riset bidang sosial dan pemerintahan, 2 riset bidang inovasi dan teknologi), 33 = jumlah hasil riset dan inovasi tahun 2025: (15 riset bidang ekonomi dan Pembangunan, 13 riset bidang sosial dan pemerintahan, 5 riset dan inovasi bidang inovasi dan teknologi), 31 riset dan inovasi berasal dari hasil riset dan inovasi dari tahun 2018, 2024 dan 2025.

Analisis Capaian Kinerja:

1) Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.7 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK dalam Pembangunan	%	69,70	93,94	134,78

Sumber Data : Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Utama Tahun 2025

Nilai realisasi 93,94% dengan tingkat capaian kinerja 134,78%, dianalisis dengan kriteria capaian kinerja “Sangat Tinggi”. Tingkat capaian kinerja 134,78% menunjukkan bahwa semakin meningkat pemanfaatan hasil riset dan inovasi menunjukkan semakin meningkatnya kinerja Balitbangda Prov. Kaltim. Pemanfaatan riset tersebut diperoleh melalui data berupa Peraturan Daerah, Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah, sebagai pemanfaatan hasil riset tahun 2018 (1 riset), 2024 (1 riset, 1 inovasi) dan 2025 (28 riset), sebagai berikut:

Tabel 3.8 Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK dalam Pembangunan

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Pemanfaatan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
	2018				
1	Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Bahasa Daerah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 : <i>Rekomendasi Perlu adanya payung hukum (perda, pergub, perbud, dll) yang mengatur pelestarian bahasa daerah</i>	https://bit.ly/KajianKebijakanPemerintahDaerahDalamPelestarianBahasaDaerah	Perda	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemajuan Budaya, Bab II Pasal 5 (1), point h (bahasa)Objek Pemajuan Kebudayaan Meliputi salah satunya Bahasa	http://bit.ly/4h7qJXP
	2024				
1	Strategi Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Wilayah Regional Kalimantan Timur Di Sepanjang ALKI II Tahun 2024 : Rekomendasi : Strategi pengembangan pada wilayah sepanjang ALKI II koridor Kalimantan yang terdampak keberadaan IKN dapat dilakukan melalui kebijakan berikut: peningkatan kapasitas produksi dan hilirisasi produk, pengendalian urbanisasi dan peri-urbanisasi di sekitar Tri Kota, optimalisasi peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), peningkatan aksesibilitas, serta pembangunan agroindustri dan industri pengola, Tindaklanjut rekomendasi : Kegiatan ALKI II Zone Investment Forum Tahun 2024	http://bit.ly/4nphRPj	Renstra OPD	Renstra DPMSTP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, BAB VI Tabel Kerangka Pendanaan, Indikator program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024-2026, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi, Halaman 110	https://bit.ly/4pIQHoI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Pemanfaatan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
2	Pelaksanaan Penjaringan Peserta Inovasi Kreatifitas Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi (PEPES IKAN PEDTA Tahun 2024) di Bappedalitbang Kab. PPU	https://drive.google.com/file/d/1pU1elys4EG47Pi7E-0a2Q1SEhflyMoCq/view?usp=sharing	RENJA/RKA	RENJA Bappedalitbang Kab. PPU Tahun 2024 BAB I Hal. 6. . Sebagai implemetasi dari peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, ditahun 2019 mulai menyelenggarakan kegiatan Penjaringan Perangkat Daerah Berinovasi Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan inventarisasi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah baik dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun di Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur	https://drive.google.com/drive/folders/1B7jKxF86XwErRzR5QtmSvGQkvWSGD3dG?usp=sharing
2025					
1	RISET BIAYA LOGISTIK EKSPOR KALIMANTAN TIMUR : ANALISIS DAN STRATEGI KEBIJAKAN EFISIENSI Rekomendasi : 1. Strategi kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha diperlukan untuk menekan biaya transportasi dan mempercepat arus logistik ekspor guna meningkatkan daya saing regional. 2. Ketersediaan fasilitas penunjang ekspor seperti sterilisasi dan iradiasi (gamma irradiation, e-beam, x-ray) menjadi krusial untuk memenuhi standar ekspor internasional, terutama untuk komoditas pangan, hasil laut, dan produk pertanian. 3. Efisiensi logistik tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kompetensi sumber daya manusia, baik dari sisi regulator maupun pelaku usaha. 4. Moda transportasi ekspor di Kalimantan Timur perlu diintegrasikan antara jalur darat, laut, dan udara agar distribusi barang dari kawasan produksi ke pelabuhan ekspor berjalan efisien. 5. Kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi logistik, dan lembaga keuangan menjadi faktor kunci dalam memperkuat ekosistem ekspor. 6. Mengacu pada kesenjangan biaya logistik antara wilayah barat dan timur Indonesia, kebijakan subsidi logistik ekspor menjadi sangat relevan	https://drive.google.com/file/d/1LTcaN-gS-gqsqzO3uCPwvo8accZKRmni/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 1 – Terakselerasinya Perekonomian Daerah, Hal. 272 7) Peningkatan nilai ekspor daerah; memberi dukungan terhadap pelaku UMKM berorientasi ekspor melalui pelatihan, pembiayaan, dan fasilitas logistik. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan devisa dan memperluas jaringan perdagangan internasional sehingga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.	https://drive.google.com/file/d/1KJw23vILxIR_woY3QBwiiRPkqBodZeO6/view?usp=sharing

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Pemanfaatan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
	<p>untuk mendukung daya saing eksportir lokal.</p> <p>7. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan penghubung dari sentra produksi menuju pelabuhan utama agar mobilitas barang lebih efisien.</p> <p>8. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai holding ekspor hub yang berfungsi sebagai agregator dan fasilitator bagi eksportir lokal.</p> <p>9. Digitalisasi sistem pelaporan dan pengurusan dokumen ekspor perlu segera diperkuat agar proses ekspor dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan bebas gangguan sistem (error).</p>				
2	<p>STRATEGI INOVATIF UNTUK MENGOPTIMALKAN INVESTASI DI SEKTOR NON MIGAS: PEMETAAN PELUANG DAN TANTANGAN</p> <p>Rekomendasi :</p> <p>1. Transformasi ekonomi non-migas Kalimantan Timur menuntut diferensiasi kebijakan lintas kabupaten/kota</p> <p>2. Analisis Shift-Share dan Location Quotient (LQ) 2019–2024 menunjukkan:</p> <p>3. Arah kebijakan makro: diversifikasi ekonomi, digitalisasi, dan transisi energi hijau.</p> <p>4. Pendekatan kebijakan mengacu pada prinsip: Green Economy Transformation, Digital Acceleration, Inclusive Local Empowerment</p> <p>5. Integrasi ke RPJMD Provinsi dan RPJPD 2025–2045: Seluruh strategi dan target diintegrasikan ke dokumen perencanaan resmi untuk memastikan keberlanjutan pasca-2029</p> <p>6. Institutional Learning dan Knowledge Sharing: BRIDA akan membentuk Kaltim Knowledge Center (KKC) sebagai pusat pembelajaran kebijakan inovasi</p> <p>7. Kemitraan Internasional dan Regional Branding: Penguatan branding “Kaltim Green & Smart Investment Zone” untuk menarik investasi berkelanjutan regional–global</p> <p>8. Insentif dan Skema Pembiayaan Inovasi: Pembentukan Dana Inovasi Daerah (DID-Kaltim) guna mendanai pilot project inovasi lintas sektor</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1_UyZaidCt0Blr2iQBBHMib7CwfEMq7AB/view?usp=sharing</p>	<p>RPJMD KALTIM 2025-2029</p>	<p>Sasaran 1 – Terakselerasinya Perekonomian Daerah, Hal. 271, 5) Peningkatan investasi pada sektor produktif; Strategi peningkatan investasi pada sektor produktif dilakukan dengan melakukan pemetaan potensi investasi melalui identifikasi sector yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi,</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/12nnkJ-fLY51Vk35KxiA1hZU_BfwH6vi/view?usp=sharing</p>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Pemanfaatan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
3	POTENSI EKOWISATA SERANGGA (ENTOTOURISM) DI KALIMANTAN TIMUR (STUDI KASUS HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN DAN SAMBOJA LESTARI) Rekomendasi : 1. Dukungan Kebijakan Niche Tourism dan Alokasi Dana Strategis 2. Penguatan Status Konservasi Berbasis Bioindikator 3. Penguatan Kapasitas dan Keterlibatan Masyarakat Lokal 4. Regulasi dan Pengawasan Kawasan	https://drive.google.com/file/d/1Liva2DV5NFiyYKbuFqvCIC2m2sXUENex/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 4 – Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan, Hal. 280, 3.) Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan kerusakan lingkungan; Strategi pelestarian lingkungan dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, perlindungan kawasan konservasi, pengendalian pencemaran lingkungan melalui implementasi teknologi bersih dan pengelolaan limbah yang efektif, rehabilitasi lahan kritis, perlindungan daerah aliran sungai, serta perlindungan keanekaragaman hayati termasuk habitat satwa endemik.	https://drive.google.com/file/d/1BWCuwa3rAH3T2GRjILbQdTYD-ai3N3wQ/view?usp=sharing
4	Pemanfaatan Pelepeh Sawit sebagai Inovasi Kemasan Makanan Rekomendasi: 1. Pengembangan Skala Produksi 2. Diversifikasi Produk 3. Pengembangan Proses Ramah Lingkungan 4. Uji Aplikasi pada Produk Makanan Nyata 5. Sertifikasi dan Komersialisasi 6. Kolaborasi dengan Industri 7. Perlindungan Kekayaan Intelektual	https://drive.google.com/file/d/19cFf3mclLZSG5YMZ4CqV_SasSLW8RNVQ/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 4 – Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan, Hal. 280, 3.) Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan kerusakan lingkungan; Strategi pelestarian lingkungan dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, perlindungan kawasan konservasi, pengendalian pencemaran lingkungan melalui implementasi teknologi bersih dan pengelolaan limbah yang efektif, rehabilitasi lahan kritis, perlindungan daerah aliran sungai, serta perlindungan keanekaragaman hayati termasuk habitat satwa endemik.	https://drive.google.com/file/d/1BWCuwa3rAH3T2GRjILbQdTYD-ai3N3wQ/view?usp=sharing
5	Analisis Potensi Nilai Serapan Karbon Biru Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Kebijakan Ekonomi Biru Di Provinsi Kalimantan Timur Rekomendasi: 1. Penggunaan indeks spektral tambahan dan data multi-temporal disarankan untuk meningkatkan pemisahan kelas substrat yang memiliki kemiripan spektral. 2. Peningkatan jumlah dan kualitas data pelatihan serta validasi, terutama untuk kelas substrat sedimen, diperlukan guna mengurangi kesalahan klasifikasi (misclassification). 3. Pemetaan lanjutan hingga tingkat persentase tutupan (percent cover) serta estimasi Above-Ground Carbon (AGC)/karbon atas permukaan direkomendasikan dilakukan melalui kegiatan survei lapangan guna memperoleh informasi ekosistem pesisir yang lebih detail dan kuantitatif 4. Informasi stok karbon pada laporan ini dapat melengkapi data yang sudah ada. Sehingga diperlukan untuk membuat tabulasi stok	https://drive.google.com/file/d/1A4PPS3_KooYaxfOCerJqRU8IAcWRDB2y/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 4 – Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan, Hal. 279, 1). Peningkatan peran sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan dalam konteks pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru; Sementara itu, strategi peningkatan peran sektor perikanan dalam konteks pengembangan ekonomi biru dilakukan melalui pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan serta restorasi ekosistem mangrove dan terumbu karang. Selain itu, pelatihan bagi nelayan mengenai praktik tangkap selektif diselenggarakan untuk menjaga produktivitas perikanan jangka panjang. Keseluruhan langkah-langkah yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi hijau dan biru di Kalimantan Timur, dengan menciptakan system produksi yang efisien dan rendah emisi. Selain itu, langkah-langkah tersebut juga mendukung penurunan intensitas emisi GRK melalui peningkatan tutupan vegetasi, konservasi karbon biru, dan pengurangan deforestasi.	https://drive.google.com/file/d/1g7pJL0OCcHZS6QQ_VwMDQ1ws77r5G05z/view?usp=sharing

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Pemanfaatan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
	karbon ekosistem karbon biru di Kalimantan Timur.				
6	<p>RANCANGAN MODEL BISNIS DAN RANTAI PASOK LIMBAH SAWIT PADAT DAN CAIR UNTUK PENINGKATAN KETAHANAN ENERGI BARU TERBARUKAN GUNA MENDUKUNG TRANSISI ENERGI DI KALIMANTAN TIMUR</p> <p>Rekomendasi:</p> <p>1. Pemerintah daerah dan perusahaan sawit perlu menyusun mekanisme tata kelola multipihak (melibatkan pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan lembaga keuangan) untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari usaha biomassa dan biogas juga dirasakan oleh masyarakat sekitar, misalnya melalui prioritas tenaga kerja lokal, program kemitraan, atau akses energi yang lebih andal dan terjangkau</p> <p>Pemerintah pusat dan daerah perlu menyederhanakan dan memperjelas tata kelola perizinan pemanfaatan limbah sawit untuk energi, terutama untuk proyek POME–biogas yang bersentuhan dengan izin lingkungan, lahan, dan jaringan listrik. Kepastian prosedur dan waktu pengurusan izin akan menurunkan risiko bagi investor.</p> <p>2. Pemerintah daerah bersama dinas terkait (perkebunan, energi, lingkungan) perlu menyusun basis data terintegrasi mengenai produksi TBS, kapasitas dan tingkat utilisasi PKS, serta volume limbah padat dan POME per pabrik.</p>	https://drive.google.com/file/d/1watA7EiWxu_bPdFDIV_E1fRPCd7pnCy1/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	<p>Sasaran 4 – Pembangunan Berkelanjutan, Hal. 281, 6). Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan; Strategi peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan dilaksanakan dengan mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro, dan biomassa. Perkuatan kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga riset untuk inovasi teknologi rendah emisi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p>	https://drive.google.com/file/d/1lj1EUxe-hmVvk8dXSv_Kr9_Uah1YtUROQ/view?usp=sharing
7	<p>Riset Pemetaan Destinasi dan Potensi Ekowisata di Kalimantan Timur</p> <p>Rekomendasi:</p> <p>1. Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur dasar untuk mendukung kunjungan wisata</p> <p>2. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, swasta, dan komunitas untuk menciptakan model pengelolaan yang berkelanjutan.</p>	https://drive.google.com/file/d/1irlaK0wO-L50Dab71NdOEiK6GCqtCTJn/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	<p>Sasaran 1 – Terakselerasinya Perekonomian Daerah, Hal. 271, 4). Pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi;</p> <p>Strategi pengembangan sektor pariwisata dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur penunjang wisata, seperti akses jalan, penginapan, dan fasilitas umum. Hal tersebut didukung dengan penyelenggaraan festival budaya lokal, promosi digital, serta jalinan kerja sama dengan pelaku industri pariwisata dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata pun dilakukan sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan.</p>	https://drive.google.com/file/d/12nnkJ-fLY51Vk35KxiA1hZU_BfwH6vi/view?usp=sharing

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Pemanfaatan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
8	<p>Strategi Pengembangan Kawasan Pancakota (Samarinda–Balikpapan–IKN–Tenggarong–Penajam) Rekomendasi: Analisis ini dilakukan berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan sebelumnya seperti wawancara dan studi pada dokumen-dokumen perencanaan daerah, serta hasil analisis sebelumnya yang dikategorisasi menjadi 6 arah kebijakan yaitu potensi dan struktur ekonomi daerah, pengembangan ekonomi baru, infrastruktur, konektivitas dan data tarik wilayah, ekonomi hijau dan berkelanjutan, posisi strategis dan peran terkait IKN, dan Analisis ini dilakukan berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan sebelumnya seperti wawancara dan studi pada dokumen-dokumen perencanaan daerah, serta hasil analisis sebelumnya yang dikategorisasi menjadi 6 arah kebijakan yaitu potensi dan struktur ekonomi daerah, pengembangan ekonomi baru, infrastruktur, konektivitas dan data tarik wilayah, ekonomi hijau dan berkelanjutan, posisi strategis dan peran terkait IKN, dan</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1-10vcfTUB67UyWHrifzTu6iXa4m3T_h/view?usp=sharing</p>	<p>RPJMD KALTIM 2025-2029</p>	<p>Sasaran 1 – Terakselerasinya Perekonomian Daerah, Hal. 270, 2). Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan industri; Strategi pengembangan kawasan-kawasan industri dilaksanakan melalui optimalisasi fungsi kawasan dengan pendekatan konsep aglomerasi. Hal tersebut juga diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan vokasi dan adopsi teknologi industri. Selain itu, perluasan pasar dan peningkatan nilai tambah dilakukan melalui sinergi kawasan industri dengan kebutuhan logistik dan pasokan bahan baku. Melalui hal tersebut, diharapkan kontribusi sektor lapangan usaha industri pengolahan akan meningkat sehingga meningkatkan daya saing daerah dalam upaya perwujudan transformasi ekonomi.</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1oTY9hHNISELG9qzKj-R9cDKMWGolh5-t/view?usp=sharing</p>
9	<p>RISET KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR JALAN, JEMBATAN DAN PELABUHAN UNTUK Mendukung KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI SUPER HUB EKONOMI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Rekomendasi: Berdasarkan hasil kajian "Kebutuhan Infrastruktur Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan untuk Mendukung Kalimantan Timur sebagai Super Hub Ekonomi," dirumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang terbagi dalam aspek kebijakan, teknis, kelembagaan, pembiayaan, dan pengembangan wilayah. Rekomendasi ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang arah pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang.</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1sytbFuLvpuM9Sw-G6TbrJN8HIQ2B1-3u/view?usp=sharing</p>	<p>RPJMD KALTIM 2025-2029</p>	<p>Sasaran 3 – Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas, Hal. 275, 1). Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas; Strategi peningkatan kuantitas infrastruktur konektivitas dilakukan melalui pembangunan jalan strategis provinsi, jembatan penghubung antarwilayah, penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan, penyediaan sarana dan prasarana dermaga serta penyediaan moda transportasi yang terintegrasi. Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta turut dilakukan untuk mendanai proyek infrastruktur serta mempercepat proses perizinan dan pengadaan lahan. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memperluas cakupan konektivitas antarwilayah sehingga mobilitas orang dan barang menjadi lebih lancar dan efisien.</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1mA_0wKyDdl6enRVQpCLD60eyXuL7R6yd/view?usp=sharing</p>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Pemanfaatan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
10	<p>RISET REVITALISASI SUNGAI MAHKAM DENGAN PENDEKATAN ANALISIS TOD (TRANSIT-ORIENTED DEVELOPMENT) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi jalan yang rusak di kawasan sekitar Sungai Mahakam, khususnya Jl. Cipto Mangun Kusumo dan jalan provinsi lainnya yang terhubung ke dermaga 2. Pembangunan dermaga modern yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal, seperti waterbus, dan penyediaan jalur sepeda serta trotoar di sepanjang sungai. 3. Implementasi teknologi hijau untuk mengurangi pencemaran dan sedimentasi, serta pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar kawasan TOD. 4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis ekowisata dan pelatihan untuk kelompok sadar wisata (pokdarwis). 5. Penyesuaian regulasi lokal dan provinsi yang mendukung pengembangan TOD dan pengelolaan sungai secara berkelanjutan 	<p>https://drive.google.com/file/d/1bC-HGeQdzeBIR0KNI0z44YsuLalfll7c/view?usp=sharing</p>	<p>RPJMD KALTIM 2025-2029</p>	<p>Program Jospol, Hal. 316, 8). Revitalisasi sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri dan pariwisata; Revitalisasi Sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri, dan pariwisata merupakan langkah strategis yang dapat mengoptimalkan potensi Sungai Mahakam dan anak sungainya sebagai tulang punggung perekonomian wilayah. Sungai Mahakam dapat dikembangkan menjadi alternatif moda transportasi yang mudah diakses bagi alur barang dan jasa kegiatan ekonomi, memiliki daya tarik wisata, serta meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai. Untuk mendukung angkutan industri, revitalisasi ini meliputi pemeliharaan alur sungai agar kapal-kapal pengangkut barang seperti batu bara, hasil perkebunan, dan produk industri lainnya dapat beroperasi secara lancar, sehingga menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Selain itu, Sungai Mahakam juga memiliki potensi besar sebagai destinasi pariwisata, dengan mengembangkan fasilitas seperti wisata susur sungai, wisata kuliner terapung, dan wisata alam di sepanjang sungai, yang dapat menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Melalui pendekatan terpadu, revitalisasi Sungai Mahakam diharapkan tidak hanya meningkatkan mobilitas dan perekonomian, tetapi juga melestarikan ekosistem sungai sebagai warisan alam yang berharga bagi generasi mendatang.</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1VTm7lcw9S5btEQy8IQXvrV1hDH_d0M9J/view?usp=sharing</p>
11	<p>KAJIAN STRATEGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL PADA PERUSAHAAN TAMBANG BATU BARA DI KALIMANTAN TIMUR (STUDI KASUS PADA PT. KIDECO JAYA AGUNG, PT. INDOMINCO MANDIRI, DAN PT. KALTIM PRIMA COAL)</p> <p>Rekomendasi:</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif dan temuan kualitatif lapangan, beberapa strategi kebijakan yang direkomendasikan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan CSR Internal dan Keterlibatan Karyawan 2. Pembangunan Budaya Organisasi Hijau (Green Organizational Culture) 3. Sinergi Multi-Stakeholder 4. Optimalisasi Edukasi Lingkungan Berkelanjutan 5. Integrasi Kesejahteraan 	<p>https://drive.google.com/file/d/1ZVAJxViiqM0NmNdk2VfWexdhzVMllaf/view?usp=sharing</p>	<p>RPJMD KALTIM 2025-2029</p>	<p>Sasaran 4 – Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan, Hal. 280, 3). Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan kerusakan lingkungan; peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan, peningkatan kapasitas institusi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk mitigasi risiko kerusakan lingkungan. Upaya tersebut bertujuan menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi risiko degradasi ekosistem, sehingga daya dukung lingkungan tetap terjaga secara berkelanjutan.</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1BWCUwa3rAH3T2GRilbQdTYD-ai3N3wQ/view?usp=sharing</p>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Pemanfaatan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
	dan Lingkungan dalam Kebijakan HR				
12	Strategi Implementasi Model Skill E-Passport ASEAN Toolbox Dalam Kebijakan Merdeka Belajar Rekognisi Pembelajaran Lampau Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Unggulan Bidang Pariwisata Pada Kebijakan Merdeka Belajar Rekomendasi : 1. Diperlukan penyesuaian kurikulum dengan standar ASEAN Toolbox agar kompetensi yang diajarkan di SMK sesuai dengan kebutuhan industri dan dapat diakui secara internasional. 2. Guru perlu mendapatkan pelatihan, terutama dalam penguasaan bahasa Inggris dan kemampuan asesmen berbasis standar internasional, untuk mendukung implementasi kurikulum dan skill e-passport. 3. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu segera mengimplementasikan kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk mengakui kompetensi siswa yang diperoleh di luar sekolah, seperti melalui magang atau pengalaman kerja. 4. Diperlukan pengembangan infrastruktur digital di SMK untuk mendukung penerapan sistem skill e-passport, termasuk platform yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran dan sertifikasi kompetensi. 5. Pemantauan dan Evaluasi: Agar implementasi skill e-passport berjalan dengan baik, perlu ada sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses ini sesuai dengan standar yang ditetapkan	https://drive.google.com/file/d/1pDHS-quUoOvIxzYIAPH5-2fwq0MfCP9/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 6: Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat, Bidang Pembangunan: Pendidikan, RPJMD Kaltim Hal: 206-207,246: Meningkatkan kualitas pendidikan menengah kejuruan. Menjadi acuan penyusunan dokumen RPL berbasis skill e-passport pada SMK bidang pariwisata dan secara umum dapat dikembangkan pada SMK bidang keahlian lainnya	https://drive.google.com/drive/folders/1azn5hBWztf5Oo3ZDXZ1Tf_qu7BmwchEF?usp=sharing
13	Model Peningkatan Kualitas Kelompok Rentan di Provinsi Kalimantan Timur Rekomendasi : (1) Kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan di Kalimantan Timur bertujuan memastikan inklusivitas dan keadilan dalam proses pembangunan menuju IKN dengan memberikan prioritas akses bagi perempuan, para penyandang disabilitas, juga pekerja lokal terhadap pasar kerja, pendidikan, pelatihan, dan layanan publik. (2) Transformasi birokrasi menjadi kunci dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur agar lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, dengan	https://drive.google.com/file/d/1WTHQEVv8ZqJu3_J9YsGLa9WYNpErXN5R/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan, Sasaran 7 : Meningkatnya Produktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia, Bidang Pembangunan: Daya Saing Sumber Daya Manusia, RPJMD Kaltim Hal: 206, 220-222, 275, 508: Mengidentifikasi dan merumuskan model peningkatan kualitas kelompok rentan di Provinsi Kalimantan Timur	https://drive.google.com/drive/folders/1AkBnG1ZIWq1NcT3oQo4A8Y3h9TMqEdGh?usp=sharing

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Pemanfaatan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
	<p>mendorong model kerja yang agile, adaptif, dan berorientasi pada hasil, (3) Penguatan ekosistem sosial di Kalimantan Timur merupakan langkah strategis untuk membangun lingkungan yang inklusif dan suportif bagi kelompok rentan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas sipil</p>				
14	<p>Hilirisasi Produk Unggulan Kalimantan Timur untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Daerah Rekomendasi: Upaya mempercepat hilirisasi di Kalimantan Timur tidak dapat dilakukan tanpa persiapan yang matang dan hanya membangun fasilitas industri secara fisik. Percepatan hilirisasi harus dilihat sebagai proses membangun ekosistem nilai tambah yang terintegrasi dari hulu (upstream), tengah (midstream), hingga hilir (downstream). Hilirisasi perlu mempertimbangkan kondisi saat ini dan kesempatan. Percepatan hilirisasi di Kalimantan Timur juga perlu dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan posisi dari tahap upstream menuju midstream atau midstream menuju downstream dari suatu komoditas ataupun produk yang dihasilkan. Setiap tahapan tersebut memiliki indikator kesiapan yang berbeda, mulai dari kualitas SDM, tingkat teknologi, akses modal, kapasitas infrastruktur, kekuatan jaringan industri, hingga kemampuan organisasi dan proses produksi. Prasyarat tersebut harus menjadi dasar asesmen dalam merumuskan kebijakan untuk mempersiapkan tahap selanjutnya. Tanpa pemenuhan indikator di masing-masing tahap, hilirisasi akan menghasilkan bottlenecks karena indikator tersebut saling berkaitan. Oleh karena itu, arah kebijakan tidak cukup hanya mendorong berdirinya pabrik baru atau fasilitas pengolahan, tetapi harus ditujukan untuk membangun dan memperkuat ekosistem rantai nilai secara menyeluruh dan berkelanjutan.</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1pxPr30luYfoZurPANfo6279Q1fvwwhi/view?usp=drive_link</p>	<p>RPJMD KALTIM 2025-2029</p>	<p>Sasaran 1: Terakselerasinya Perekonomian Daerah, Sasaran 4: Pembangunan Berkelanjutan, Bidang Pembangunan: Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah, RPJMD Kaltim Hal: 237, 256, 269: Memotret kondisi aktual, peluang, serta hambatan hilirisasi produk unggulan di Kalimantan Timur, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kapasitas daerah, realistis, inklusif dan bertanggung jawab ekologis</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1VESFvZLuBE41uJb0XZ7IpoY9Dm1_ipY?usp=sharing</p>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Pemanfaatan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
15	<p>Model Kolaborasi Bumdes, Industri, Perguruan Tinggi Dan Pemerintah Daerah (Quadruple Helix) Untuk Kemandirian Daerah Di Desa Lung Anai, Sungai Bawang, Desa Muara Kaman Ulu, Dan Desa Sepatin Kabupaten Kutai Kartanegara Serta Desa Labanan, Desa Muara Lesan, Desa Lesan Dayak, Dan Desa Sido Bangun Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil implementasi dan evaluasi penerapan model Quadruple Helix, direkomendasikan agar pendekatan kolaboratif ini dijadikan sebagai kerangka utama dalam pengembangan dan penguatan BUMDes di tingkat desa. 2. Rekomendasi bagi BUMDes/BUMKam dan Masyarakat Desa : Menyusun dan menerapkan SOP operasional dan keuangan secara konsisten untuk menjaga kualitas produksi dan transparansi pengelolaan usaha. Melakukan reinvestasi keuntungan usaha untuk penguatan modal, perawatan sarana produksi, dan pengembangan unit usaha baru, Meningkatkan kapasitas SDM secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis dan manajerial, serta memperluas jejaring kemitraan usaha, Mengembangkan strategi diversifikasi pasar secara bertahap untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu mitra. 3. Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah : Menyusun atau memperkuat kerangka regulasi daerah yang mendukung kemitraan BUMDes–Industri, termasuk aspek tata kelola, pembagian manfaat, dan standar produk, Mengintegrasikan model kolaborasi BUMDes–Industri ke dalam program pembangunan daerah, khususnya pada sektor ekonomi hijau, perhutanan sosial, dan rehabilitasi lingkungan, Menyediakan dukungan pendanaan dan pendampingan teknis bagi BUMDes/BUMKam melalui skema hibah, fasilitasi perizinan, dan kemitraan lintas sektor, Mendorong replikasi model ke desa-desa lain dengan potensi serupa, disertai studi kelayakan dan pendampingan yang 	<p>https://drive.google.com/file/d/1aycFYqS6VP_Ep-DGHFIBfVNsS6lmg4bb/view?usp=sharing</p>	<p>RPJMD KALTIM 2025-2029</p>	<p>Sasaran 1: Terakselerasinya Perekonomian Daerah, Sasaran 4: Pembangunan Berkelanjutan, Bidang Pembangunan: Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah, RPJMD Kaltim Hal: 253-266: Melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap hasil penerapan model Quadruple Helix dalam pengembangan dan optimalisasi BUMDes serta meningkatkan kemandirian daerah melalui pemberdayaan desa</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1lKhOMq1w0_7KO4HK_XZi58WaWuXx-Scb5?usp=sharing</p>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Pemanfaatan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
	<p>memadai</p> <p>4. Rekomendasi bagi Industri dan Mitra Pasar : Mengembangkan kemitraan jangka panjang yang adil dan transparan dengan BUMDes/BUMKam, tidak hanya berbasis transaksi jangka pendek, Mendukung peningkatan kapasitas mitra desa melalui program CSR/ESG yang terintegrasi dengan kebutuhan teknis dan manajerial, Berperan aktif dalam penguatan standar mutu produk dan akses pasar yang lebih luas, termasuk peluang pasar nasional dan internasional.</p> <p>5. Rekomendasi bagi Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset: Memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pendamping berkelanjutan pada fase riset atau proyek jangka pendek, Mengembangkan inovasi teknologi tepat guna dan model bisnis berbasis riset yang adaptif terhadap konteks lokal desa, Mengintegrasikan hasil riset dan praktik lapangan ke dalam kurikulum, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah, Berperan sebagai evaluator independen untuk memastikan keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi dari usaha desa yang dikembangkan.</p>				
16	<p>Kesiapan Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Menghadapi Society 5.0</p> <p>Rekomendasi: kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Integration of Physical and Virtual Worlds, Human-Centered Approach, Kebijakan Inovasi Berkelanjutan, kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Cross-Sector Collaboration,</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1IGLhXN9bITiLH9rk7Dk0QiTqFrik8tc/view?usp=drive_link</p>	<p>RPJMD KALTIM 2025-2029</p>	<p>Sasaran 9: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan, Sasaran 10: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi, Bidang Pembangunan: Tata Kelola Pemerintahan dan Transformasi Digital, RPJMD Kaltim Hal: 143, 116, 253: Mengidentifikasi sejauh mana Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kompetensi teknis, mindset adaptif, serta akses terhadap fasilitas pendukung yang diperlukan untuk mendukung transformasi digital dalam birokrasi</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1101-xdVi8EN_vQnVdqPI6xVm3Xws_Vfc?usp=sharing</p>
17	<p>Kesiapan Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Menghadapi Society 5.0</p> <p>Rekomendasi : penataan perangkat daerah harus diarahkan untuk memastikan keselarasan antara struktur organisasi, beban kewenangan nyata, dan kebutuhan strategis pembangunan daerah. Penataan kelembagaan bukan sekadar penyesuaian tipologi, melainkan proses memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki fungsi yang tepat sasaran, ukuran yang proporsional,</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1M6Q9KmQagqwvdKjYm36gdTPx1d3w7A1Q/view?usp=drive_link</p>	<p>RPJMD KALTIM 2025-2029</p>	<p>Sasaran 9: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan, Sasaran 10: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi, Bidang Pembangunan: Tata Kelola Pemerintahan, RPJMD Kaltim Hal: 142-145, 178, 211, 226, 239, 241, 257-260: Merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kapasitas kelembagaan yang optimal struktur yang lincah dan proses yang cerdas guna menopang perannya sebagai mitra strategis IKN dan mewujudkan birokrasi</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1PRGR9VAVI5OVNivG2jFvw9wL4EeZOsBK?usp=sharing</p>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Pemanfaatan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
	<p>serta kapasitas yang mampu mendukung pencapaian visi "Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas." Dengan demikian, reformulasi kelembagaan yang berbasis analisis kewenangan menjadi prasyarat penting bagi efektivitas tata kelola, integrasi kebijakan, dan percepatan agenda pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam proses pembentukan/penggabungan/pemisahan organisasi perangkat daerah seyogyanya memperhatikan beberapa konsiderasi berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dasar hukum (pendekatan yuridis) yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta PP 18 Tahun 2016 2) Hasil evaluasi kelembagaan melalui kajian ilmiah dengan berpedoman pada minimal 3 peraturan Perundang-Undangan 3) Mempertimbangkan asas-asas Pembentukan Perangkat Daerah 4) Mempertimbangkan rumpun organisasi perangkat daerah, yang terbagi dalam beberapa rumpun, 5) Kemampuan dan Kebutuhan Daerah 6) Memperhatikan perkembangan kewenangan daerah serta dinamika pembangunan sektoral yang berkembang di Provinsi Kalimantan Timur 			<p>pelayanan publik yang mumpuni di era Society 5.0</p>	
18	<p>Tata Kelola Penanganan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur Rekomendasi : Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi tingkat kemiskinan di suatu wilayah termasuk Provinsi Kalimantan Timur adalah garis kemiskinan (GK). Tidak hanya angka kemiskinan umum yang perlu ditekan, tetapi juga dimensi kedalaman (poverty gap index atau P1) dan keparahan kemiskinan (poverty severity index atau P2) yang masih mencerminkan adanya kelompok rumah tangga sangat miskin yang belum sepenuhnya terjangkau oleh program intervensi. Lebih mendalam, gambaran tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 menunjukkan bahwa kerentanan penduduk miskin tidak hanya ditentukan oleh keterbatasan pendapatan, tetapi juga oleh berbagai dimensi sosial-ekonomi yang saling berkaitan. Secara</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/15Gn_vjeY1We8yILEvyUlv6SGcYTFU2XB/view?usp=drive_link</p>	<p>RPJMD KALTIM 2025-2029</p>	<p>Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan, Bidang Pembangunan: Penanganan Kemiskinan, RPJMD Kaltim Hal: 266, 273-275, 331-333: Merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy) guna memperkuat tata kelola penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas intervensi pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Timur</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1qqJlix8pZbh8-QRlyYiVve8i1DM5mPRk?usp=sharing</p>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Pemanfaatan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
	<p>kumulatif, temuan ini menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem di Kalimantan Timur bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi, mencakup peningkatan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan kerja yang produktif, serta perbaikan kondisi hunian dan infrastruktur dasar untuk memastikan penurunan kemiskinan ekstrem yang berkelanjutan. Klaster ketenagakerjaan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas produktif masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan pelatihan vokasional, dan perluasan kesempatan kerja formal. Bappeda Kaltim mendorong kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja, BLK, sektor swasta, dan dunia pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan sektor-sektor unggulan daerah seperti industri pengolahan, jasa, dan ekonomi hijau. Program pemberdayaan UMKM dan inkubasi usaha turut diperkuat untuk menyediakan alternatif pendapatan bagi rumah tangga miskin, khususnya bagi pekerja informal. Dengan menekan tingkat pengangguran dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja, klaster ini berperan strategis dalam menaikkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi risiko mereka jatuh kembali ke kondisi kemiskinan.</p>				
19	<p>Revolusi Digital: Membangun Pemerintahan Efisien melalui Integrasi Teknologi Informasi dalam Administrasi Publik Menggunkan AI Chatbot Rekomendasi : Dalam konteks Kalimantan Timur—sebagai wilayah strategis yang tengah mempersiapkan diri menjadi pusat pemerintahan nasional melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)—pemanfaatan teknologi informasi, khususnya melalui integrasi AI Chatbot, menjadi peluang sekaligus tantangan besar dalam membangun administrasi publik yang modern dan adaptif. Rekomendasi tersebut mencakup aspek desain sistem, kesiapan infrastruktur, pelatihan SDM, hingga penguatan tata kelola data dan regulasi etis, sehingga adopsi AI Chatbot</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1pKW2lQlWMMU9uQAuKBASRjD_SwWlbrf6K/view?usp=sharing</p>	<p>RPJMD KALTIM 2025-2029</p>	<p>Sasaran 9: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan, Sasaran 10: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi, Bidang Pembangunan : Tata Kelola Pemerintahan dan Transformasi Digital, RPJMD Kaltim Hal: 239,241, 257-260, Merancang kerangka kerja layanan administrasi publik yang disempurnakan dengan mengintegrasikan teknologi AI Chatbot, untuk mengatasi keterbatasan yang ditemukan dalam kegunaan, kualitas informasi, dan kualitas interaksi</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/16ULauxQQ6cBFMqzRMuZJAJf4b6iR11a4?usp=sharing</p>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Pemanfaatan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
	dapat dilakukan secara inklusif dan berkeadilan.				
20	Studi Mix-Method: Analisis Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Program Kader Malaria di Wilayah Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) dan Daerah Endemis Sekitarnya Rekomendasi : pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa implementasi kebijakan pengendalian malaria melalui kader malaria dapat berjalan secara berkelanjutan dan kontekstual, khususnya di Wilayah Pembangunan IKN dan wilayah endemis sekitarnya. Rekomendasi berikut dirumuskan untuk memperkuat keterkaitan antara desain kebijakan dan praktik lapangan yang telah dijalankan oleh kader. Memperkuat Dukungan Sistem terhadap Peran Kader sebagai Aktor Lapangan Utama. Menyelaraskan Tuntutan Program dengan Kapasitas Nyata Kader. Menjamin Keberlanjutan Penguatan Kapasitas dan Supervisi. Mengoptimalkan Sistem Akuntabilitas agar Mendukung, Bukan Membebani. Mengurangi Ketimpangan Akses melalui Pendekatan Kontekstual Wilayah	https://drive.google.com/file/d/1OL30UdcnVzNKDh2wvMvqZXSPgPN8Wo8Y/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 5: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Bidang Pembangunan : Kesehatan, RPJMD Kaltim Hal:284: Mengevaluasi implementasi kebijakan dalam dimensi efektifitas, efisiensi, kecukupan dan responsibilitas pelaksanaan peran kader malaria di Wilayah Pembangunan IKN dan wilayah endemis sekitarnya	https://drive.google.com/drive/folders/12bJ3k-lf3a_e4hDxEYDoa757PqS90NBq?usp=sharing
21	Perancangan Prototype Aplikasi Kiau Fisis Sebagai Peningkatan Akses dan Mutu Kesehatan di Kalimantan Timur Rekomendasi : Riset ini menguraikan tantangan yang ditimbulkan oleh keterbatasan akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama pelayanan Fisioterapi di Kalimantan Timur. Sumber daya manusia dan tempat informasi pelayanan Fisioterapi berpotensi menimbulkan kualitas pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa user siap untuk mengadopsi aplikasi KIAUFISIO. Hampir semua user menantikan launching aplikasi KIAUFISIO dalam bentuk semua perangkat seluler dalam proses booking antrian, akses informasi tempat dan Fisioterapi serta video latihan mandiri. Sebagian besar user percaya bahwa KIAUFISIO untuk mengakses data pasien Fisioterapi akan sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Menarik nya ada dua cara untuk menanggapi	https://drive.google.com/file/d/1PLnzIL36tSL2tUmWifBUiSxdr1R_G89d/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 5: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Bidang Pembangunan: Kesehatan, RPJMD Kaltim Hal: 284, Membantu meningkatkan kesehatan masyarakat melalui teknologi informasi digital berbasis kesehatan yang memudahkan pasien/ keluarga pasien untuk dapat berkonsultasi dengan Fisioterapi	https://drive.google.com/drive/folders/1V7BH1fWqsQWri2l6EO0V0aFbUou6pBrb?usp=sharing

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Pemanfaatan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
	<p>permintaan BPJS Kesehatan dan tenaga kesehatan Fisioterapi: pertama, admin Fisioterapi di Rumah Sakit hendaknya dibuat terpisah dengan admin Fisioterapi di Klinik dan Praktek Mandiri yang belum ada kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kedua, aplikasi KIAUFISIO dapat tersinkronisasi dengan data AKUN SEHAT yang dibawah oleh Kementerian Kesehatan untuk mempermudah data sehingga tidak perlu double pengisian data berkali-kali. Secara kontribusi ilmiah, riset ini menambah khazanah pengetahuan terkait pengembangan aplikasi kesehatan digital, khususnya pada pelayanan kesehatan terutama Fisioterapi yang masih relatif terbatas. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena fokus pada tahap perancangan dan pengembangan prototype KIAUFISIO. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan uji coba fitur bridging dalam menjembatani kebutuhan antara pasien, fisioterapis, dan sistem pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit, Klinik, Praktek Mandiri serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p>				
22	<p>Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Rekomendasi : 1. Koordinasi dan Pemantauan Berkala, melalui forum evaluasi triwulanan dengan seluruh kabupaten/kota untuk memantau progres perbaikan berdasarkan hasil IPKD. 2. Memfasilitasi sharing session antar daerah dengan best practices dalam pengelolaan keuangan, khususnya dari Balikpapan dan Kutai Kartanegara. 3. Melakukan studi mendalam tentang faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran di daerah tertentu (seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat). 4. Selain itu, kajian dampak perubahan bobot Dimensi 5 dan 6 terhadap peringkat daerah secara keseluruhan.</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1jMyRZPVWNB4M6wOSiNkidX0OKaP_pTFw/view?usp=sharing</p>	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 8: Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat, Bidang Pembangunan: Kebudayaan, RPJMD Kaltim Hal: 256, 290-291: Membuat rekomendasi kebijakan peningkatan pembangunan kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1UmMW7W-Tib9v6OaqNW1q3liTYt9eNR?usp=sharing</p>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Pemanfaatan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
23	Pengembangan Inovasi Modern Hydrogel Patch Sebagai Wound Dressing Dari Tanaman Lokal Kalimantan Timur Bajakah Tampala Untuk Pengobatan Komplikasi Infeksi Biofilm Staphylococcus Aureus Pada Ulkus Diabetikum Rekomendasi : Penelitian ini membuktikan bahwa ekstrak Bajakah Tampala (<i>Spatholobus littoralis</i> Hassk.) memiliki potensi kuat sebagai bahan aktif dalam formulasi hydrogel patch untuk penyembuhan luka ulkus diabetikum yang terinfeksi Staphylococcus aureus. Secara keseluruhan, hydrogel patch ekstrak Bajakah Tampala memiliki potensi besar sebagai inovasi wound dressing modern berbasis bahan alam Kalimantan Timur untuk membantu penyembuhan luka diabetikum. Penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan skala lebih besar menuju uji lanjutan, perlindungan kekayaan intelektual, dan komersialisasi produk fitoterapi lokal.	https://drive.google.com/file/d/1nkD0SfVli_fPBX8basl6CDwZ4sWMA04b/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 1 – Terakselerasinya Perekonomian Daerah dan Sasaran 5 – Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, Bidang Pembangunan : Kesehatan dan Kehutanan, RPJMD Kaltim Hal: 270, 283: Mendukung strategi peningkatan kualitas percepatan penanganan masalah kesehatan dan peningkatan produktifitas disektor kehutanan melalui pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	https://drive.google.com/drive/folders/1vavZels0IZmtpLjLaOoVRxxfxpwAhmws?usp=sharing
24	Kajian Pembelajaran Interaktif Bahasa Kutai Sebagai Penunjang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah Berbasis Game Agent-Ai Rekomendasi: Pemanfaatan edugame "Etam-edu" dapat diterapkan dan digunakan diseluruh sekolah dan masyarakat di Kalimantan Timur. Tetapi penekanan yang harus segera ditindaklanjuti adalah melakukan koordinasi dengan berbagai Pihak baik dari Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Gubernur), OPD terkait, Perguruan Tinggi dan juga Masyarakat agar dapat mengambil kebijakan dan keputusan bersama dalam pelestarian Budaya Lokal, salah satunya pelestarian Bahasa Kutai. Pembentukan adanya Program Studi Pendidikan Bahasa Kutai, harus segera diusahakan agar setidaknya dalam waktu 4 atau 5 tahun lagi tersedia tenaga penagjar yang memiliki kompetensi Pengajar Bahasa Kutai di Kalimantan Timur. Jika tanaga pengajar memiliki kompetensi, didukung dengan peraturan dan kebijakan daerah maka pelestarian budaya lokal ini baru dapat tercapai	https://drive.google.com/file/d/1FRnoQ98CUUpFgSMuBbvNaNQtrk0zMpQNZ/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 8 – Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat, Bidang Pembangunan : Pendidikan dan Kebudayaan, RPJMD Kaltim Hal: 290: Mendukung strategi pengembangan ketahanan budaya melalui pelestarian, revitalisasi dan peningkatan literasi budaya lokal	https://drive.google.com/drive/folders/1Mv-2oPOpGwM9uVgVxXpk3XhNBju_gSwl?usp=sharing
25	Pengembangan Aplikasi Inovasi "Etam-Edu" Pembelajaran Muatan Lokal	https://drive.google.com/file/d/1y2PSfNIRn1iA	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 8 – Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat dan Sasaran 10	https://drive.google.com/drive/folders/1YBYBJWkyrgwVqMre

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Pemanfaatan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
	<p>Bahasa Daerah Kalimantan Timur</p> <p>Rekomendasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperluas jumlah kosakata bahasa daerah Kutai serta menambah variasi ekspresi karakter. Memperkaya konten budaya seperti cerita rakyat, permainan tradisional, dan adat istiadat untuk memberikan wawasan budaya yang lebih komprehensif. Meningkatkan kecerdasan Chatbot ETAM dengan pengembangan pemahaman konteks yang lebih baik, perluasan basis data balasan, serta penambahan fitur suara seperti text-to-speech dan voice recognition agar ramah bagi anak usia dini. Mengoptimalkan tampilan antarmuka agar lebih responsif di berbagai perangkat dengan visual yang menarik dan nyaman digunakan. Melakukan uji coba lebih luas pada berbagai kelompok usia dan wilayah guna memperoleh masukan yang lebih bervariasi. Melakukan kolaborasi lintas disiplin bersama ahli bahasa, budayawan, pendidik, dan pengembang teknologi. Menyusun standar kurikulum muatan lokal yang terintegrasi dalam aplikasi. Meningkatkan sistem keamanan dan privasi data pengguna. Menyusun roadmap penelitian hingga tahap hilirisasi agar aplikasi dapat diimplementasikan secara luas. 	<p>iafWZ0pFwyS5tpiu5ghi/view?usp=sharing</p>		<p>- Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi, Bidang Pembangunan : Pendidikan , Kebudayaan dan Digitalisasi, RPJMD Kaltim Hal: 290, 294 : Mendukung strategi pengembangan ketahanan budaya melalui pelestarian, revitalisasi dan peningkatan literasi budaya lokal berbasis aplikasi pembelajaran digital</p>	<p>Qwz2Aqq0Rr4UwHO4?usp=sharing</p>
26	<p>Pengembangan Website Etamkawin Sebagai Platform Digital Untuk Meningkatkan Persiapan Pernikahan Di Kalimantan Timur</p> <p>Rekomendasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perluasan Uji Coba Pilot: Mengingat validasi baru dilakukan di tingkat KUA Sungai Pinang, disarankan untuk memperluas uji coba implementasi ke beberapa KUA lain di wilayah Kutai Kartanegara dan Balikpapan untuk menguji skalabilitas sistem pada kondisi demografis yang berbeda. Integrasi API Dukcapil: Untuk saat ini verifikasi NIK masih dilakukan secara semi-otomatis. Pengembangan selanjutnya diharapkan dapat menjalin kerjasama teknis (PKS) dengan Dinas Dukcapil untuk akses API verifikasi identitas kependudukan secara real-time. Pengembangan Mobile Apps Native: 	<p>https://drive.google.com/file/d/1hd4--lnxHtVMwvi8FU-yOmp3fIW9Os2h/view?usp=sharing</p>	<p>RPJMD KALTIM 2025-2029</p>	<p>Sasaran 8 – Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat dan Sasaran 10 - Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi, Bidang Pembangunan : Sosial dan Digitalisasi, RPJMD Kaltim Hal: 290, 294 : Mendukung strategi pengembangan ketahanan sosial keagamaan melalui peningkatan literasi persiapan pernikahan berbasis aplikasi digital</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1AFZf5ysmVe9jBdiqclPJK8269p55z4T?usp=sharing</p>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Pemanfaatan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
	Meskipun versi web saat ini sudah responsif (PWA), pengembangan aplikasi native (Android/iOS) dapat dipertimbangkan untuk memanfaatkan fitur perangkat keras secara maksimal, seperti penggunaan biometrik (fingerprint/face id) untuk login yang lebih aman.				
27	<p>Pengembangan Kapal Listrik Wisata Sebagai Alat Transportasi Ramah Lingkungan Di Sungai Karang Mumus</p> <p>Rekomendasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dan Penyempurnaan Desain Kapal 2. Optimalisasi Sistem Listrik dan Energi Terbarukan 3. Keselamatan dan Operasional Wisata 4. Uji Coba Lanjutan dan Pengembangan Skala Produksi 5. Dukungan Regulasi dan Model Bisnis 6. Potensi Pengembangan Riset Lanjutan 	https://drive.google.com/file/d/166tubzwwp-y7ytue1O77YOTrGNrwoxSz/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	<p>Sasaran 1 – Terakselerasinya Perekonomian Daerah & Sasaran 4 – Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan, Bidang Pembangunan : Pariwisata dan EBT, RPJMD Kaltim Hal: 271, 281 : Mendukung strategi pengembangan sektor pariwisata dengan mengembangkan sarana dan fasilitas penunjang wisata berbasis teknologi ramah lingkungan</p>	https://drive.google.com/drive/folders/1ptatFk7gSJDralx0_cY YxNQXvjSPFO2X?usp=sharing
28	<p>Sistem Cerdas Peringatan Longsor: Teknologi Lokal Untuk Mitigasi Bencana</p> <p>Rekomendasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi lapangan jangka panjang pada beberapa titik rawan longsor untuk mengevaluasi kinerja pada kondisi nyata. 2. Pelibatan masyarakat melalui edukasi penggunaan alarm dan pemahaman indikator risiko. 3. Penguatan jaringan komunikasi (LoRa/seluler) untuk memastikan transmisi data stabil. 4. Peningkatan akurasi sensor melalui pemilihan komponen lebih sensitif dan kalibrasi berkala. 5. Integrasi dengan sistem kebencanaan daerah, termasuk BPBD, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat. 6. Pengembangan versi EWS Longsor V.3 dengan fitur AI/IoT dan dashboard analitik risiko. 	https://drive.google.com/file/d/19Vqqlntwd_ZFg-hAVrAaC8GSYuyC9Rl1/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	<p>Sasaran 4 – Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan, Bidang Pembangunan : Kebencanaan, RPJMD Kaltim Hal: 282: Mendukung strategi peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana dengan memperkuat sistem peringatan dini pada daerah rawan bencana longsor</p>	https://drive.google.com/drive/folders/1AJIUzB3FWfzLkUnvHCiUIL-gqLunC5i7?usp=sharing

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.9 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

INDIKATOR	SATUAN	2023		2024		2025		KET.
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK dalam Pembangunan (Renstra 2025-2029)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	69,70	93,94	
Jumlah Penerapan Hasil Riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah (Renstra 2024-2026)	Riset	N/A	N/A	1	1	3	3	
Jumlah Penerapan Hasil Inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah (Renstra 2024-2026)	Inovasi	N/A	N/A	1	1	3	3	

Sumber Data : Realisasi IKU Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2024 dan 2025

- Pengukuran kinerja pada tabel tersebut menggunakan analisis berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029.
- Tahun 2023 menggunakan Renstra Tahun 2019-2023 dan memiliki indikator kinerja yang berbeda dengan tahun 2024 dan 2025.
- Pada Renstra Tahun 2024-2026, hasil kinerja tahun 2025 merupakan akumulasi dari hasil tahun 2024.
- Realisasi kinerja tahun 2025 dapat dihitung berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029, walaupun berbeda satuan indikator kinerja, kedua indikator tersebut masih memiliki keselarasan hasil realisasi kinerja.
- Realisasi kinerja tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026, masing-masing terealisasi 3 riset dan 3 inovasi.
- Capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 terealisasi sebesar 93,94%, dianalisis dengan kriteria capaian kinerja "Sangat Tinggi".

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (Renstra Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029.

Capaian kinerja Balitbangda Tahun 2025 merupakan masa peralihan dari capaian kinerja Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029, sehingga pada analisis ini menggunakan perbandingan antara Renstra Tahun 2024-2026 dan

Renstra Tahun 2025-2029.

Tabel 3.10 Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA 2024-2026	TARGET AKHIR RENSTRA 2025-2029	REALISASI (%)		TINGKAT KEMAJUAN (%)
					2025*	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK dalam Pembangunan	%	N/A	87,88	N/A	93,94	106,90
2.	Jumlah Penerapan Hasil Riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah	Riset	6	N/A	3	N/A	50,00
3.	Jumlah Penerapan Hasil Inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah	Inovasi	6	N/A	3	N/A	50,00

- Realisasi kinerja tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 yang diukur melalui “Jumlah penerapan hasil Riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah” dan “Jumlah penerapan hasil Inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah”, masing-masing indikator kinerja memiliki tingkat kemajuan 50% dari target akhir Renstra (2029).
- Realisasi kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 yang diukur melalui “Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK dalam Pembangunan”, terealisasi 93,94% dengan tingkat kemajuan 106,90%.

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dilakukan untuk mengukur efektivitas dan posisi relatif instansi memberikan gambaran obyektif mengenai kualitas kinerja dibanding rata-rata nasional. Dalam hal ini Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dengan analisis sebagai berikut:

Tabel 3.11 Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	REALISASI NASIONAL	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK dalam Pembangunan	%	69,70	93,94		134,78
Jumlah Naskah Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan yang Dimanfaatkan dari kegiatan perumusan kebijakan pembangunan	Rekomendasi Kebijakan	100		130	130,00

Sumber Data: Laporan Kinerja Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN Tahun 2025 dan Capaian IKU Balitbangda Provinsi Kaltim Tahun 2025

Jumlah Naskah Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan yang Dimanfaatkan dari kegiatan perumusan kebijakan riset dan inovasi adalah salah satu indikator kinerja Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi yang mencerminkan tingkat efektivitas hasil perumusan kebijakan dalam menjawab kebutuhan pemangku kepentingan. Indikator ini menggambarkan sejauh mana produk kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengambilan keputusan strategis dan pelaksanaan kebijakan di daerah. Rekomendasi Kebijakan yang Dimanfaatkan terealisasi sejumlah 130 Rekomendasi Kebijakan dengan tingkat capaian 130%.

Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK dalam Pembangunan yang menjadi tolok ukur keberhasilan tujuan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, terealisasi sebesar 93,94% dengan tingkat capaian 134,78%. Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK dimaksud adalah Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK dalam Pembangunan sejumlah 31 hasil riset dan inovasi. Analisis ini menunjukkan bahwa kinerja masing-masing Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi dan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur mencerminkan keberhasilan dalam menghasilkan rekomendasi hasil riset yang selaras dengan penyelesaian permasalahan pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah, semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin berkualitasnya hasil riset dan inovasi.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan.

Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK dalam Pembangunan pada tahun 2025, terealisasi sejumlah 31 riset dan inovasi. Hasil RISNOV tersebut telah selaras dengan penyelesaian permasalahan pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah pembangunan daerah. Keberhasilan ini mencerminkan kemampuan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dalam menghasilkan kebijakan yang relevan dan berbasis bukti, meskipun ada tantangan dalam memastikan pemanfaatan secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan serta faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur diantaranya:

I. Faktor Eksternal Pendorong Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi

Kebijakan yang mengatur tentang riset dan inovasi dan kerjasama Riset dan Inovasi multipihak melalui kolaborasi dan sinkronisasi riset dan inovasi secara nasional dan internasional.

II. Faktor Internal Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi

IKU dari sasaran strategis yang menjadi komitmen pimpinan untuk meningkatkan Penerapan Hasil Riset dan Inovasi oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat

III. Faktor Eksternal Penghambat Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi:

Belum ada kebijakan yang mengatur tentang pemanfaatan hasil riset dan inovasi

IV. Faktor Internal Penghambat Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi:

Belum optimalnya pengawalan pemanfaatan hasil riset dan inovasi oleh Balitbangda Prov. Kaltim. Masalah terbesar yang hampir dialami seluruh lembaga riset adalah belum dimanaaatnya hasil riset dan inovasi oleh pemangku kepentingan, disebabkan hasil riset dan inovasi yang dihasilkan tidak bersifat aplikatif sehingga tidak dapat diterapkan ke masyarakat dan pembangunan daerah.

V. Upaya atau Tindaklanjut

- **Upaya yang dilakukan untuk menghindari penurunan kinerja tujuan strategis:**

1. Menyusun Kebijakan yang mengatur tentang riset dan inovasi dan
2. Meningkatkan komitmen pimpinan melalui kerjasama Riset dan Inovasi multipihak melalui kolaborasi dan sinkronisasi riset dan inovasi secara nasional dan internasional.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja utama secara berkala.

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan (7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja, akan dibahas lebih lanjut pada analisis Sasaran Strategis 1, karena mempunyai program/kegiatan yang sama.

B. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah atau yang disingkat IID merupakan indeks yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategis dan Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2028 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau insentif Inovasi daerah.

Tahun 2025 IID menjadi bagian dari Indikator Kinerja Daerah dalam Sasaran Strategis Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut maka Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur menindaklanjuti Indeks Inovasi Daerah (IID) dari Provinsi Kalimantan Timur tersebut menjadi indikator kinerja tujuan dalam Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, dengan output (keluaran):

1. Data-data inovasi yang sudah diterapkan oleh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Peringkat Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Kalimantan Timur 2025 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Nilai IID tersebut difasilitasi oleh kegiatan “Fasilitasi Indeks Inovasi Daerah (IID)” pada Bidang Inovasi dan Teknologi, dengan rangkaian kegiatan:

1. Sosialisasi Strategi Peningkatan Nilai Indeks Inovasi Daerah.
2. Inventarisasi dan Pendampingan Inovasi 2025.
3. Penginputan inovasi 2025 ke Website Kementerian Dalam Negeri.
4. Submite Inovasi 2025 ke Website Kementerian Dalam Negeri.

Setelah dilakukan serangkaian kegiatan dari Workshop Strategi Peningkatan Nilai Indeks Inovasi Daerah, Surat Sekretaris Daerah Terkait Pelaporan Inovasi Daerah, Inventarisasi dan Pendampingan Input Inovasi 2025, Desk Kematangan Skor Inovasi, Penginputan inovasi ke website Kementerian Dalam Negeri Inovasi maka diperoleh daftar inovasi dan skor kematangan. Kemudian skor kematangan inovasi tersebut diturunkan menjadi tolok ukur keberhasilan dari Sasaran Strategis: **“Meningkatnya kualitas hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan permasalahan daerah secara berkelanjutan”**, dengan indikator **“Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah” yang lebih lanjut akan dibahas pada analisis hasil capaian kinerja sasaran strategis**”.

Analisis capaian kinerja Indeks Inovasi Daerah:**1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;**

Tabel 3.12 Capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	62,87	59,90	95,28

Berdasarkan Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh nilai IID Tahun 2025, sebesar 59,90 dengan capaian kinerja 95,28%. Nilai IID tersebut masuk dalam kategori inovatif.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.13 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

INDIKATOR	SATUAN	2023		2024		2025		KET.
		TARGET	REALISASI	(5)	(6)	(7)	(8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indeks Inovasi Daerah	Indeks	58,86	53,17	60,00	61,74	62,87	59,90	

Berdasarkan tabel tersebut telah terjadi kenaikan nilai IID Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2023 (53,17) ke tahun 2024 (61,74) atau mengalami kenaikan sebesar 8,57, sedangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 59,90.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.14 Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	67,39	59,90	88,89

Pada tahun 2025 diperoleh nilai IID Provinsi Kalimantan Timur sebesar 59,90 dengan tingkat kemajuan 88,89%, dari target akhir Renstra (2029). Realisasi nilai IID

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 tersebut jika dibandingkan dengan target akhir Renstra memiliki selisih nilai 7,49 (67,39 - 59,90). Selisih nilai tersebut menjadi target yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2029.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	62,87 (Balitbangda Prov. Kaltim)	59,90	95,28
			87,25 (BRIDA Prov. Jawa Timur)	90,84	104

Nilai IID Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebesar 59,90 dengan capaian 95,28%. Nilai IID Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebesar 90,84 dengan capaian 104%. Nilai IID Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 masuk dalam kategori inovatif sedangkan nilai IID Provinsi Jawa Timur masuk dalam kategori sangat inovatif. Berdasarkan nilai-nilai tersebut perlu adanya upaya-upaya atau tindak lanjut dari Balitbangda Prov. Kaltim untuk meningkatkan nilai IID Provinsi Kalimantan Timur Tahun selanjutnya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif/solusi yang telah dan akan dilakukan;

Penurunan Nilai IID Tahun 2025 disebabkan oleh faktor penghambat sebagai berikut:

- Belum adanya regulasi daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur) terkait Inovasi Daerah.
- Terbatasnya jumlah inovasi Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria matang.
- Kurangnya data dukung inovasi dari Perangkat Daerah.
- Kurangnya kerjasama lintas bidang, lintas wilayah, dan lintas sektor.
- Internalisasi penetapan target dan indikator IID oleh Bappeda Prov. Kaltim.
- Gangguan pada web indeks inovasi BSKDN Kemendagri RI.

Belum tercapainya nilai IID Tahun 2025 sebesar 62,87 tersebut perlu ditindaklanjuti dengan melakukan:

- Optimalisasi koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait hasil inovasi yang akan di input pada web indeks.inovasi BSKDN Kemendagri RI.
- Pengembangan basis data inovasi.
- Memperkuat kemitraan terkait Inovasi karena semakin tinggi nilai indeks inovasi daerah menunjukkan suatu daerah semakin inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

- Memperkuat faktor pendorong dari ketersediaan akses terhadap teknologi dan pengetahuan, Budaya Organisasi yang menekankan kreativitas inovasi, Kebijakan yang mendukung inovasi dan Kerjasama lintas bidang, lintas wilayah dan lintas sektor.
- Melakukan revisi target IID tahun 2026 pada RKPD Perubahan 2026.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel 3.16 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2		4	5
1	Indeks Inovasi Daerah	95,28	46,89	48.39

Sumber Data : Realisasi IKU dan Anggaran Tahun 2025

Anggaran untuk melaksanakan penilaian Nilai Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 sebesar Rp. 302.003.020,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 141.615.580,- atau sebesar 46,89%. Dengan capaian kinerja 95,28%, kegiatan penilaian Nilai Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dapat melakukan efisiensi sebesar 48,39%. Efisiensi dilakukan pada belanja perjalanan dinas dan pelaksanaan kegiatan di hotel.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja Indeks Inovasi Daerah

NO.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil riset dan inovasi yang ditindaklanjuti dalam daftar Kekayaan Intelektual (KI)	%	72,73	60,61	83,33
2.	Kegiatan Pengembangan inovasi dan teknologi	Persentase inovasi berbasis IPTEK yang terdaftar dalam HKI dan hak paten	%	53,00	70,00	132,08
3.	Sub Kegiatan Desiminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Jumlah Laporan Desiminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Laporan	1	1	100

Penilaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dilaksanakan pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, kegiatan penilaian Nilai Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sub kegiatan Desiminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, judul kegiatan "Fasilitasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025".

II. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kualitas Hasil Riset dan Inovasi belum memenuhi kebutuhan peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan, hal tersebut disebabkan oleh jumlah kebutuhan Riset dan inovasi lebih besar dibandingkan dengan kemampuan produksi Riset dan inovasi itu sendiri, sehingga untuk meningkatkan kualitas hasil riset dan inovasi tersebut, perlu didukung dengan tolok ukur kinerja yang terukur dan tepat sasaran.

Tabel 3.18 Indikator Kinerja Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah	%	60,61
2.	Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah	%	44,44

Keterangan : Target 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029

Capaian kinerja sasaran strategis tersebut dibahas per indikator kinerja dengan hasil analisa sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1:

A. Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras untuk Penyelesaian Masalah Pembangunan dan Peningkatan Potensi Unggulan Daerah

- **Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras untuk Penyelesaian Masalah Pembangunan dan Peningkatan Potensi Unggulan Daerah** adalah hasil riset dan inovasi tahun 2025 yang memberikan rekomendasi selaras dengan penyelesaian permasalahan pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan perhitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras dengan Permasalahan Pembangunan dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah}}{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi}} \times 100\%$$

- Target : $= \frac{20}{33} \times 100\% = 60,61\%$
- Realisasi : $= \frac{28}{33} \times 100\% = 84,85\%$
- Capaian Kinerja : $= \frac{84,85}{60,61} \times 100\% = 139,99\%$

Hasil Analisa:**1) Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Tabel 3.19 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras untuk Penyelesaian Masalah Pembangunan dan Peningkatan Potensi Unggulan Daerah	%	60,61	84,85	139,99

Sumber Data : Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Utama Tahun 2025

Nilai realisasi 84,85% dengan tingkat capaian kinerja 139,99%, dianalisis dengan kriteria capaian kinerja “Sangat Tinggi”. Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin berkualitasnya hasil riset dan inovasi.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.20 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		% PENINGKATAN /PENURUNAN
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	30	22													
2.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	30	22													
3.	Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan di daerah	%	30	0													
4.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	%			26	26											
5.	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dalam mendukung pembangunan IKN	%			9	9											
6.	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan mendukung IKN	Persen					42	37	54	41	100	67					
7.	Jumlah hasil Riset yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Riset											2	2			
8.	Jumlah hasil Inovasi yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Inovasi											2	2			
9.	Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah	%													60,61	84,85	

Sumber Data : Realisasi IKU Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023, 2024

Tabel 3.7 tersebut menggambarkan pelaksanaan dari 3 (tiga) periode yakni Renstra Tahun 2019-2023, Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029. Tahun 2019-2020 dan tahun 2021-2023 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 dan tahun 2025 karena berbeda indikator dan output kinerja.

Tahun 2024 masih dapat dibandingkan dengan tahun 2025 karena hasil realisasi kinerja tahun 2024 masih terakumulasi di tahun 2025. Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 dengan realisasi kinerja tercapai 100%. Tahun 2025 dari target kinerja 60,61% terealisasi 84,85% sehingga tingkat capaian kinerjanya >100% (139,99%).

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (Renstra Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029.

Capaian kinerja Balitbangda Tahun 2025 merupakan masa peralihan dari capaian kinerja Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029, sehingga pada laporan ini dianalisis menggunakan Renstra Tahun 2025-2029 dan Renstra Tahun 2024-2026.

Tabel 3.21 Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA 2024-2026	TARGET AKHIR RENSTRA 2025-2029	REALISASI (%)		TINGKAT KEMAJUAN (%)
					2025*	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah	%	N/A	84,85	N/A	84,85	100%
2.	Jumlah Hasil Riset yang Dapat Diterapkan (Aplikatif) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Riset	10	N/A	4	N/A	40%
3.	Jumlah Hasil Inovasi yang Dapat Diterapkan (Aplikatif) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Inovasi	10	N/A	4	N/A	40%

Keterangan:

- Realisasi 2025* berdasarkan Renstra 2024-2026, kinerja dari tahun 2024-2025
- Realisasi 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029, kinerja tahun 2025

a. Analisis penjabaran realisasi kinerja tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029.

Perhitungan Indikator Kinerja: ***“Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras untuk Penyelesaian Masalah Pembangunan dan Peningkatan Potensi Unggulan Daerah”***.

$$\text{Target Akhir Renstra} = \frac{28}{33} \times 100\% = 84,85\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{28}{33} \times 100\% = 84,85\%$$

Diperoleh tingkat kemajuan senilai 100 %, dengan perhitungan:

$$\text{Tingkat Kemajuan} = \frac{84,85}{84,85} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi kinerja dari ***persentase hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah***, telah memenuhi target akhir Renstra (2029) dengan nilai 84,85% atau sejumlah 28 hasil riset. Adapun *evidence* atau bukti pemanfaatan hasil riset tersebut didukung oleh hasil riset tahun 2025 yang dimanfaatkan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, pada tabel berikut:

Tabel 3.22 Rekomendasi Hasil Riset Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 yang Selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Keselarasan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
1	RISET BIAYA LOGISTIK EKSPOR KALIMANTAN TIMUR : ANALISIS DAN STRATEGI KEBIJAKAN EFISIENSI Rekomendasi : 1. Strategi kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha diperlukan untuk menekan biaya transportasi dan mempercepat arus logistik ekspor guna meningkatkan daya saing regional. 2. Ketersediaan fasilitas penunjang ekspor seperti sterilisasi dan iradiasi (gamma irradiation, e-beam, x-ray) menjadi krusial untuk memenuhi standar ekspor internasional, terutama untuk komoditas pangan, hasil laut, dan produk pertanian. 3. Efisiensi logistik tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kompetensi sumber daya manusia, baik dari sisi regulator maupun pelaku usaha. 4. Moda transportasi ekspor di Kalimantan Timur perlu diintegrasikan antara jalur darat, laut, dan udara agar distribusi barang dari kawasan produksi ke pelabuhan ekspor berjalan efisien. 5. Kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi logistik, dan lembaga keuangan menjadi faktor kunci dalam memperkuat ekosistem ekspor. 6. Mengacu pada kesenjangan biaya logistik antara wilayah barat dan timur Indonesia, kebijakan subsidi logistik ekspor menjadi sangat relevan untuk	https://drive.google.com/file/d/1LTcaN-gS-gqsqzO3uCPwyo8accZKRmnl/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 1 – Terakselerasinya Perekonomian Daerah, Hal. 272 7) Peningkatan nilai ekspor daerah; memberi dukungan terhadap pelaku UMKM berorientasi ekspor melalui pelatihan, pembiayaan, dan fasilitas logistik. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan devisa dan memperluas jaringan perdagangan internasional sehingga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.	https://drive.google.com/file/d/1KJw23vLxIR_woY3QBwiIRPkqBodZeO6/view?usp=sharing

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Keselarasan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
	<p>mendukung daya saing eksportir lokal.</p> <p>7. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan penghubung dari sentra produksi menuju pelabuhan utama agar mobilitas barang lebih efisien.</p> <p>8. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai holding ekspor hub yang berfungsi sebagai agregator dan fasilitator bagi eksportir lokal.</p> <p>9. Digitalisasi sistem pelaporan dan pengurusan dokumen ekspor perlu segera diperkuat agar proses ekspor dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan bebas gangguan sistem (error).</p>				
2	<p>STRATEGI INOVATIF UNTUK MENGOPTIMALKAN INVESTASI DI SEKTOR NON MIGAS: PEMETAAN PELUANG DAN TANTANGAN</p> <p>Rekomendasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transformasi ekonomi non-migas Kalimantan Timur menuntut diferensiasi kebijakan lintas kabupaten/kota 2. Analisis Shift-Share dan Location Quotient (LQ) 2019–2024 menunjukkan: 3. Arah kebijakan makro: diversifikasi ekonomi, digitalisasi, dan transisi energi hijau. 4. Pendekatan kebijakan mengacu pada prinsip: Green Economy Transformation, Digital Acceleration, Inclusive Local Empowerment 5. Integrasi ke RPJMD Provinsi dan RPJPD 2025–2045: Seluruh strategi dan target diintegrasikan ke dokumen perencanaan resmi untuk memastikan keberlanjutan pasca-2029 6. Institutional Learning dan Knowledge Sharing: BRIDA akan membentuk Kaltim Knowledge Center (KKC) sebagai pusat pembelajaran kebijakan inovasi 7. Kemitraan Internasional dan Regional Branding: Penguatan branding "Kaltim Green & Smart Investment Zone" untuk menarik investasi berkelanjutan regional–global 8. Insentif dan Skema Pembiayaan Inovasi: Pembentukan Dana Inovasi Daerah (DID-Kaltim) guna mendanai pilot project inovasi lintas sektor 	https://drive.google.com/file/d/1_UyZaidCt0Blr2QBBHMib7CwfEMq7AB/view?usp=sharing	<p>RPJMD KALTIM 2025-2029</p>	<p>Sasaran 1 – Terakselerasinya Perekonomian Daerah, Hal. 271, 5) Peningkatan investasi pada sektor produktif; Strategi peningkatan investasi pada sektor produktif dilakukan dengan melakukan pemetaan potensi investasi melalui identifikasi sector yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi,</p>	https://drive.google.com/file/d/12nnkJ-fLY51Vk35KxiA1hZU_Bfwh6vij/view?usp=sharing
3	<p>POTENSI EKOWISATA SERANGGA (ENTOTOURISM) DI KALIMANTAN TIMUR (STUDI KASUS HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN DAN SAMBOJA LESTARI)</p> <p>Rekomendasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Kebijakan Niche Tourism dan Alokasi Dana Strategis 2. Penguatan Status Konservasi Berbasis Bioindikator 3. Penguatan Kapasitas dan Keterlibatan Masyarakat Lokal 4. Regulasi dan Pengawasan Kawasan 	https://drive.google.com/file/d/1Liva2DV5NFivYKbuFgyCIC2m2sXUEnex/vi w?usp=sharing	<p>RPJMD KALTIM 2025-2029</p>	<p>Sasaran 4 – Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan, Hal. 280, 3) Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan kerusakan lingkungan; Strategi pelestarian lingkungan dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, perlindungan kawasan konservasi, pengendalian pencemaran lingkungan melalui implementasi teknologi bersih dan pengelolaan limbah yang efektif, rehabilitasi lahan kritis, perlindungan daerah aliran sungai, serta perlindungan keanekaragaman hayati termasuk habitat satwa endemik.</p>	https://drive.google.com/file/d/1BWCuwa3rAH3T2GRiILbQdTYD-ai3N3wQ/view?usp=sharing
4	<p>Pemanfaatan Pelelah Sawit sebagai Inovasi Kemasan Makanan</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Skala Produksi 2. Diversifikasi Produk 3. Pengembangan Proses Ramah Lingkungan 4. Uji Aplikasi pada Produk Makanan 	https://drive.google.com/file/d/19cFf3mclLZSG5YMZ4CqV_SgsSLW8RNVQvi ew?usp=sharing	<p>RPJMD KALTIM 2025-2029</p>	<p>Sasaran 4 – Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan, Hal. 280, 3.) Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan kerusakan lingkungan; Strategi pelestarian lingkungan dilakukan melalui pengelolaan</p>	https://drive.google.com/file/d/1BWCuwa3rAH3T2GRiILbQdTYD-ai3N3wQ/view?usp=sharing

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Keselarasan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
	Nyata 5.Sertifikasi dan Komersialisasi 6.Kolaborasi dengan Industri 7.Perlindungan Kekayaan Intelektual			sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, perlindungan kawasan konservasi, pengendalian pencemaran lingkungan melalui implementasi teknologi bersih dan pengelolaan limbah yang efektif, rehabilitasi lahan kritis, perlindungan daerah aliran sungai, serta perlindungan keanekaragaman hayati	
5	Analisis Potensi Nilai Serapan Karbon Biru Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Kebijakan Ekonomi Biru Di Provinsi Kalimantan Timur Rekomendasi: 1.Penggunaan indeks spektral tambahan dan data multi-temporal disarankan untuk meningkatkan pemisahan kelas substrat yang memiliki kemiripan spektral. 2.Peningkatan jumlah dan kualitas data pelatihan serta validasi, terutama untuk kelas substrat sedimen, diperlukan guna mengurangi kesalahan klasifikasi (misclassification). 3.Pemetaan lanjutan hingga tingkat persentase tutupan (percent cover) serta estimasi Above-Ground Carbon (AGC)/karbon atas permukaan direkomendasikan dilakukan melalui kegiatan survei lapangan guna memperoleh informasi ekosistem pesisir yang lebih detail dan kuantitatif 4. Informasi stok karbon pada laporan ini dapat melengkapi data yang sudah ada. Sehingga diperlukan untuk membuat tabulasi stok karbon ekosistem karbon biru di Kalimantan Timur.	https://drive.google.com/file/d/1A4PPS3_KooyaxfOCERJqRU8IAcWRDB2y/vi ew?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 4 – Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan, Hal. 279, 1). Peningkatan peran sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan dalam konteks pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru; Sementara itu, strategi peningkatan peran sektor perikanan dalam konteks pengembangan ekonomi biru dilakukan melalui pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan serta restorasi ekosistem mangrove dan terumbu karang. Selain itu, pelatihan bagi nelayan mengenai praktik tangkap selektif diselenggarakan untuk menjaga produktivitas perikanan jangka panjang. Keseluruhan langkah-langkah yang dijabarkan diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi hijau dan biru di Kalimantan Timur, dengan menciptakan system produksi yang efisien dan rendah emisi. Selain itu, langkah-langkah tersebut juga mendukung penurunan intensitas emisi GRK melalui peningkatan tutupan vegetasi, konservasi karbon biru, dan pengurangan deforestasi.	https://drive.google.com/file/d/1g7pJL0OCcHZS6QQ_VwMDQ1ws77r5G05z/view?usp=sharing
6	RANCANGAN MODEL BISNIS DAN RANTAI PASOK LIMBAH SAWIT PADAT DAN CAIR UNTUK PENINGKATAN KETAHANAN ENERGI BARU TERBARUKAN GUNA MENDUKUNG TRANSISI ENERGI DI KALIMANTAN TIMUR Rekomendasi: 1. Pemerintah daerah dan perusahaan sawit perlu menyusun mekanisme tata kelola multipihak (melibatkan pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan lembaga keuangan) untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari usaha biomassa dan biogas juga dirasakan oleh masyarakat sekitar, misalnya melalui prioritas tenaga kerja lokal, program kemitraan, atau akses energi yang lebih andal dan terjangkau Pemerintah pusat dan daerah perlu menyederhanakan dan memperjelas tata kelola perizinan pemanfaatan limbah sawit untuk energi, terutama untuk proyek POME–biogas yang bersentuhan dengan izin lingkungan, lahan, dan jaringan listrik. Kepastian prosedur dan waktu pengurusan izin akan menurunkan risiko bagi investor. 2. Pemerintah daerah bersama dinas terkait (perkebunan, energi, lingkungan) perlu menyusun basis data terintegrasi mengenai produksi TBS, kapasitas dan tingkat utilisasi PKS, serta volume limbah padat dan POME per pabrik.	https://drive.google.com/file/d/1watA7jEiWxubPdFDIV_E1fRPCd7pnCyl/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 4 – Pembangunan Berkelanjutan, Hal. 281, 6). Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan; Strategi peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan dilaksanakan dengan mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro, dan biomassa. Perkuatan kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga riset untuk inovasi teknologi rendah emisi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	https://drive.google.com/file/d/11j1EUxehmV8dXSv_Kr9_Uah1YtUR0Q/view?usp=sharing
7	Riset Pemetaan Destinasi dan Potensi Ekowisata di Kalimantan Timur Rekomendasi:	https://drive.google.com/file/d/1irlaK0wO-	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 1 – Terakselerasinya Perekonomian Daerah, Hal. 271, 4). Pengembangan sektor	https://drive.google.com/file/d/12nnkJ-

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Keselarasan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
	<p>1. Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur dasar untuk mendukung kunjungan wisata</p> <p>2. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, swasta, dan komunitas untuk menciptakan model pengelolaan yang berkelanjutan.</p>	L50Dab71NdOEjK6GCqTCTJn/view?usp=sharing		pariwisata, ekonomi kreatif, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi; Strategi pengembangan sektor pariwisata dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur penunjang wisata, seperti akses jalan, penginapan, dan fasilitas umum. Hal tersebut didukung dengan penyelenggaraan festival budaya lokal, promosi digital, serta jalinan kerja sama dengan pelaku industri pariwisata dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan.	fLY51Vvk35KxiA1hZU_BfwH6vij/view?usp=sharing
8	<p>Strategi Pengembangan Kawasan Pancakota (Samarinda–Balikpapan–IKN–Tenggarong–Penajam)</p> <p>Rekomendasi: Analisis ini dilakukan berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan sebelumnya seperti wawancara dan studi pada dokumen-dokumen perencanaan daerah, serta hasil analisis sebelumnya yang dikategorisasi menjadi 6 arah kebijakan yaitu potensi dan struktur ekonomi daerah, pengembangan ekonomi baru, infrastruktur, konektivitas dan data tarik wilayah, ekonomi hijau dan berkelanjutan, posisi strategis dan peran terkait IKN, dan Analisis ini dilakukan berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan sebelumnya seperti wawancara dan studi pada dokumen-dokumen perencanaan daerah, serta hasil analisis sebelumnya yang dikategorisasi menjadi 6 arah kebijakan yaitu potensi dan struktur ekonomi daerah, pengembangan ekonomi baru, infrastruktur, konektivitas dan data tarik wilayah, ekonomi hijau dan berkelanjutan, posisi strategis dan peran terkait IKN,</p>	https://drive.google.com/file/d/110vcfTUB67UyWHlrfzTuGiXa4m3T_h/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	<p>Sasaran 1 – Terakselerasinya Perekonomian Daerah, Hal. 270, 2). Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan industri;</p> <p>Strategi pengembangan kawasan-kawasan industri dilaksanakan melalui optimalisasi fungsi kawasan dengan pendekatan konsep aglomerasi. Hal tersebut juga diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan vokasi dan adopsi teknologi industri. Selain itu, perluasan pasar dan peningkatan nilai tambah dilakukan melalui sinergi kawasan industri dengan kebutuhan logistik dan pasokan bahan baku. Melalui hal tersebut, diharapkan kontribusi sektor lapangan usaha industri pengolahan akan meningkat sehingga meningkatkan daya saing daerah dalam upaya perwujudan transformasi ekonomi.</p>	https://drive.google.com/file/d/1toTY9hHNISELG9gzKiR9cDKMwGoh5-t/view?usp=sharing
9	<p>Riset Kebutuhan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Pelabuhan Untuk Mendukung Kalimantan Timur Sebagai Super Hub Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>Rekomendasi: Berdasarkan hasil kajian “Kebutuhan Infrastruktur Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan untuk Mendukung Kalimantan Timur sebagai Super Hub Ekonomi,” dirumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang terbagi dalam aspek kebijakan, teknis, kelembagaan, pembiayaan, dan pengembangan wilayah. Rekomendasi ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang arah pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang.</p>	https://drive.google.com/file/d/1sytbFuLvpuM9Sw-G6TbrJN8HIQ2B1-3u/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	<p>Sasaran 3 – Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas, Hal. 275, 1). Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas; Strategi peningkatan kuantitas infrastruktur konektivitas dilakukan melalui pembangunan jalan strategis provinsi, jembatan penghubung antarwilayah, penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan, penyediaan sarana dan prasarana dermaga serta penyediaan moda transportasi yang terintegrasi. Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta turut dilakukan untuk mendanai proyek infrastruktur serta mempercepat proses perizinan dan pengadaan lahan. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memperluas cakupan konektivitas antarwilayah sehingga mobilitas orang dan barang menjadi lebih lancar dan efisien.</p>	https://drive.google.com/file/d/1mA_0wKyDdl6enRVQpCLD60eyXuL7R6yd/view?usp=sharing

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Keselarasan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
9	<p>RISET KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR JALAN, JEMBATAN DAN PELABUHAN UNTUK Mendukung KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI SUPER HUB EKONOMI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</p> <p>Rekomendasi: Berdasarkan hasil kajian “Kebutuhan Infrastruktur Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan untuk Mendukung Kalimantan Timur sebagai Super Hub Ekonomi,” dirumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang terbagi dalam aspek kebijakan, teknis, kelembagaan, pembiayaan, dan pengembangan wilayah. Rekomendasi ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang arah pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang.</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1sytbFuLypuM9Sw-G6TbrJN8HIQ2B1-3u/view?usp=sharing</p>	<p>RPJMD KALTIM 2025-2029</p>	<p>Sasaran 3 – Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas, Hal. 275, 1). Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas; Strategi peningkatan kuantitas infrastruktur konektivitas dilakukan melalui pembangunan jalan strategis provinsi, jembatan penghubung antarwilayah, penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan, penyediaan sarana dan prasarana dermaga serta penyediaan moda transportasi yang terintegrasi. Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta turut dilakukan untuk mendanai proyek infrastruktur serta mempercepat proses perizinan dan pengadaan lahan</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1mA_0wKyDdl6enRVQPcLD60evXuL7R6yd/view?usp=sharing</p>
10	<p>RISET REVITALISASI SUNGAI MAHKAM DENGAN PENDEKATAN ANALISIS TOD (TRANSIT-ORIENTED DEVELOPMENT) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</p> <p>Rekomendasi: 1. Rehabilitasi jalan yang rusak di kawasan sekitar Sungai Mahakam, khususnya Jl. Cipto Mangun Kusumo dan jalan provinsi lainnya yang terhubung ke dermaga 2. Pembangunan dermaga modern yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal, seperti waterbus, dan penyediaan jalur sepeda serta trotoar di sepanjang sungai. 3. Implementasi teknologi hijau untuk mengurangi pencemaran dan sedimentasi, serta pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar kawasan TOD. 4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis ekowisata dan pelatihan untuk kelompok sadar wisata (pokdarwis). 5. Penyesuaian regulasi lokal dan provinsi yang mendukung pengembangan TOD dan pengelolaan sungai secara berkelanjutan</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1bC-HGeQdzeBIR0kNI0z44YsuLaflf7c/view?usp=sharing</p>	<p>RPJMD KALTIM 2025-2029</p>	<p>Program Jospol, Hal. 316, 8). Revitalisasi sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri dan pariwisata; Revitalisasi Sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri, dan pariwisata merupakan langkah strategis yang dapat mengoptimalkan potensi Sungai Mahakam dan anak sungainya sebagai tulang punggung perekonomian wilayah. Sungai Mahakam dapat dikembangkan menjadi alternatif moda transportasi yang mudah diakses bagi alur barang dan jasa kegiatan ekonomi, memiliki daya tarik wisata, serta meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai. Untuk mendukung angkutan industri, revitalisasi ini meliputi pemeliharaan alur sungai agar kapal-kapal pengangkut barang seperti batu bara, hasil perkebunan, dan produk industri lainnya dapat beroperasi secara lancar, sehingga menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Selain itu, Sungai Mahakam juga memiliki potensi besar sebagai destinasi pariwisata, dengan mengembangkan fasilitas seperti wisata susur sungai, wisata kuliner terapung, dan wisata alam di sepanjang sungai, yang dapat menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Melalui pendekatan terpadu, revitalisasi Sungai Mahakam diharapkan tidak hanya meningkatkan mobilitas dan perekonomian, tetapi juga melestarikan ekosistem sungai sebagai warisan alam yang berharga bagi generasi mendatang.</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1VTm7lcw9S5btEQy8lQXvrVlhDH_d0M9J/view?usp=sharing</p>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Keselarasan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
11	<p>KAJIAN STRATEGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL PADA PERUSAHAAN TAMBANG BATU BARA DI KALIMANTAN TIMUR (STUDI KASUS PADA PT. KIDECO JAYA AGUNG, PT. INDOMINCO MANDIRI, DAN PT. KALTIM PRIMA COAL)</p> <p>Rekomendasi: Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif dan temuan kualitatif lapangan, beberapa strategi kebijakan yang direkomendasikan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan CSR Internal dan Keterlibatan Karyawan 2. Pembangunan Budaya Organisasi Hijau (Green Organizational Culture) 3. Sinergi Multi-Stakeholder 4. Optimalisasi Edukasi Lingkungan Berkelanjutan 5. Integrasi Kesejahteraan dan Lingkungan dalam Kebijakan HR 	https://drive.google.com/file/d/1ZVAJxViiqM0NmNdk2VfWexdhzVM_llaf/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 4 – Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan, Hal. 280, 3). Pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan kerusakan lingkungan; peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan, peningkatan kapasitas institusi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk mitigasi risiko kerusakan lingkungan. Upaya tersebut bertujuan menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi risiko degradasi ekosistem, sehingga daya dukung lingkungan tetap terjaga secara berkelanjutan.	https://drive.google.com/file/d/1BWCuwa3rAH3T2GRiLbQdTYD-ai3N3wQ/view?usp=sharing
12	<p>Strategi Implementasi Model Skill E-Passport ASEAN Toolbox Dalam Kebijakan Merdeka Belajar Rekognisi Pembelajaran Lampau Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Unggulan Bidang Pariwisata Pada Kebijakan Merdeka Belajar</p> <p>Rekomendasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan penyelarasan kurikulum dengan standar ASEAN Toolbox agar kompetensi yang diajarkan di SMK sesuai dengan kebutuhan industri dan dapat diakui secara internasional. 2. Guru perlu mendapatkan pelatihan, terutama dalam penguasaan bahasa Inggris dan kemampuan asesmen berbasis standar internasional, untuk mendukung implementasi kurikulum dan skill e-passport. 3. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu segera mengimplementasikan kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk mengakui kompetensi siswa yang diperoleh di luar sekolah, seperti melalui magang atau pengalaman kerja. 4. Diperlukan pengembangan infrastruktur digital di SMK untuk mendukung penerapan sistem skill e-passport, termasuk platform yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran dan sertifikasi kompetensi. 5. Pemantauan dan Evaluasi: Agar implementasi skill e-passport berjalan dengan baik, perlu ada sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses ini sesuai dengan standar yang ditetapkan 	https://drive.google.com/file/d/1pDHS-quUoOvIxzYIAPH5-2fwq0MfCP9/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 6: Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat, Bidang Pembangunan: Pendidikan, RPJMD Kaltim Hal: 206-207,246: Meningkatkan kualitas pendidikan menengah kejuruan. Menjadi acuan penyusunan dokumen RPL berbasis skill e-passport pada SMK bidang pariwisata dan secara umum dapat dikembangkan pada SMK bidang keahlian lainnya	https://drive.google.com/drive/folders/1azn5hBWztf5Oo3ZDxZ1Tf_qu7BmwchEF?usp=sharing

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Keselarasan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
13	Model Peningkatan Kualitas Kelompok Rentan di Provinsi Kalimantan Timur Rekomendasi : (1) Kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan di Kalimantan Timur bertujuan memastikan inklusivitas dan keadilan dalam proses pembangunan menuju IKN dengan memberikan prioritas akses bagi perempuan, para penyandang disabilitas, juga pekerja lokal terhadap pasar kerja, pendidikan, pelatihan, dan layanan publik. (2) Transformasi birokrasi menjadi kunci dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur agar lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, dengan mendorong model kerja yang agile, adaptif, dan berorientasi pada hasil, (3) Penguatan ekosistem sosial di Kalimantan Timur merupakan langkah strategis untuk membangun lingkungan yang inklusif dan suportif bagi kelompok rentan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas sipil	https://drive.google.com/file/d/1WTHQEvv8ZqJu3_J9YsGLa9WYNperXN5R/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan, Sasaran 7 : Meningkatkan Produktivitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia, Bidang Pembangunan: Daya Saing Sumber Daya Manusia, RPJMD Kaltim Hal: 206, 220-222, 275, 508: Mengidentifikasi dan merumuskan model peningkatan kualitas kelompok rentan di Provinsi Kalimantan Timur	https://drive.google.com/drive/folders/1AkBnG1ZIWa1NcT3oQo4A8Y3h9TMqEdGh?usp=sharing
14	Hilirisasi Produk Unggulan Kalimantan Timur untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Daerah Rekomendasi: Percepatan hilirisasi harus dilihat sebagai proses membangun ekosistem nilai tambah yang terintegrasi dari hulu (upstream), tengah (midstream), hingga hilir (downstream). Hilirisasi perlu mempertimbangkan kondisi saat ini dan kesempatan. Percepatan hilirisasi di Kalimantan Timur juga perlu dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan posisi dari tahap upstream menuju midstream atau midstream menuju downstream dari suatu komoditas ataupun produk yang dihasilkan.	https://drive.google.com/file/d/1pxPr30luYifoZurPANfp6279Q1fvwwhi/view?usp=drive_link	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 1: Terakselerasinya Perekonomian Daerah, Sasaran 4: Pembangunan Berkelanjutan, Bidang Pembangunan: Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah, RPJMD Kaltim Hal: 237, 256, 269: Memotret kondisi aktual, peluang, serta hambatan hilirisasi produk unggulan di Kalimantan Timur, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kapasitas daerah, realistis, inklusif dan bertanggung jawab ekologis	https://drive.google.com/drive/folders/1VESFvZLuBE41uJb0XZ7lpoY9Drm1_ipY?usp=sharing
15	Model Kolaborasi Bumdes, Industri, Perguruan Tinggi Dan Pemerintah Daerah (Quadruple Helix) Untuk Kemandirian Daerah Di Desa Lung Anai, Sungai Bawang, Desa Muara Kaman Ulu, Dan Desa Sepatin Kabupaten Kutai Kartanegara Serta Desa Labanan, Desa Muara Lesan, Desa Lesan Dayak, Dan Desa Sido Bangun Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Rekomendasi: 1. Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah : Menyusun atau memperkuat kerangka regulasi daerah yang mendukung kemitraan BUMDes-Industri, termasuk aspek tata kelola, pembagian manfaat, dan standar produk, Mengintegrasikan model kolaborasi BUMDes-Industri ke dalam program pembangunan daerah, khususnya pada sektor ekonomi hijau, perhutanan sosial, dan rehabilitasi lingkungan, Menyediakan dukungan pendanaan dan pendampingan teknis bagi BUMDes/BUMKam melalui skema hibah, fasilitasi perizinan, dan kemitraan lintas sektor, Mendorong replikasi model ke desa-desa lain dengan potensi serupa, disertai studi kelayakan dan pendampingan yang memadai	https://drive.google.com/file/d/1avcFYqS6VP_Ep-DGHFIBvNsS6lmg4bb/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 1: Terakselerasinya Perekonomian Daerah, Sasaran 4: Pembangunan Berkelanjutan, Bidang Pembangunan: Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah, RPJMD Kaltim Hal: 253-266: Melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap hasil penerapan model Quadruple Helix dalam pengembangan dan optimalisasi BUMDes serta meningkatkan kemandirian daerah melalui pemberdayaan desa	https://drive.google.com/drive/folders/1lKhOMa1w0_7K04HKXZj58WaWuXx-Scb5?usp=sharing
16	Kesiapan Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Menghadapi Society 5.0 Rekomendasi: kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Integration of Physical and Virtual Worlds, Human-Centered Approach, Kebijakan Inovasi Berkelanjutan, kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Cross-Sector Collaboration,	https://drive.google.com/file/d/11GLhXN9bIT_LH9rk7Dk0QiTqFrIK8tc/view?usp=drive_link	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 9: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan, Sasaran 10: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi, Bidang Pembangunan: Tata Kelola Pemerintahan dan Transformasi Digital, RPJMD Kaltim Hal: 143, 116, 253: Mengidentifikasi sejauh	https://drive.google.com/drive/folders/1101-xdVi8EN_vQnVdqPl6xVm3Xws_Vfc?usp=sharing

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Keselarasan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
				mana Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kompetensi teknis, mindset adaptif, serta akses terhadap fasilitas pendukung yang diperlukan untuk mendukung transformasi digital dalam birokrasi	
17	Kesiapan Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Menghadapi Society 5.0 Rekomendasi : penataan perangkat daerah harus diarahkan untuk memastikan keselarasan antara struktur organisasi, beban kewenangan nyata, dan kebutuhan strategis pembangunan daerah. Penataan kelembagaan bukan sekadar penyesuaian tipologi, melainkan proses memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki fungsi yang tepat sasaran, ukuran yang proporsional, serta kapasitas yang mampu mendukung pencapaian visi "Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas." Dengan demikian, reformulasi kelembagaan yang berbasis analisis kewenangan menjadi prasyarat penting bagi efektivitas tata kelola, integrasi kebijakan, dan percepatan agenda pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.	https://drive.google.com/file/d/1M6Q9KmQgggwdKjYm36qdTPx1d3w7A1Q/vi ew?usp=drive_link	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 9: Meningkatkan Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan, Sasaran 10: Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi, Bidang Pembangunan: Tata Kelola Pemerintahan, RPJMD Kaltim Hal: 142-145, 178, 211, 226, 239, 241, 257-260: Merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kapasitas kelembagaan yang optimal struktur yang lincah dan proses yang cerdas guna menopang perannya sebagai mitra strategis IKN dan mewujudkan birokrasi pelayanan publik yang mumpuni di era Society 5.0	https://drive.google.com/drive/folders/1PRGR9VAVI5OVNivG2iFvw9wL4EeZOsBK?usp=sharing
18	Tata Kelola Penanganan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur Rekomendasi : Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi tingkat kemiskinan di suatu wilayah termasuk Provinsi Kalimantan Timur adalah garis kemiskinan (GK). Tidak hanya angka kemiskinan umum yang perlu ditekan, tetapi juga dimensi kedalaman (poverty gap index atau P1) dan keparahan kemiskinan (poverty severity index atau P2) yang masih mencerminkan adanya kelompok rumah tangga sangat miskin yang belum sepenuhnya terjangkau oleh program intervensi. Lebih mendalam, gambaran tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 menunjukkan bahwa kerentanan penduduk miskin tidak hanya ditentukan oleh keterbatasan pendapatan, tetapi juga oleh berbagai dimensi sosial-ekonomi yang saling berkaitan. Secara kumulatif, temuan ini menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem di Kalimantan Timur bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi, mencakup peningkatan kualitas pendidikan, perluasan kesempatan kerja yang produktif, serta perbaikan kondisi hunian dan infrastruktur dasar untuk memastikan penurunan kemiskinan ekstrem yang berkelanjutan. Klaster ketenagakerjaan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas produktif masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan pelatihan vokasional, dan perluasan kesempatan kerja formal. Bappeda Kaltim mendorong kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja, BLK, sektor swasta, dan dunia pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan sektor-sektor unggulan daerah seperti industri pengolahan, jasa, dan ekonomi hijau.	https://drive.google.com/file/d/15Gn_vieY1We8vILEyyUlv6SGcYTFU2XB/vi ew?usp=drive_link	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan, Bidang Pembangunan: Penanganan Kemiskinan, RPJMD Kaltim Hal: 266, 273-275, 331-333: Merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy) guna memperkuat tata kelola penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas intervensi pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Timur	https://drive.google.com/drive/folders/1ggJjx8pZbh8-QRlyYiVve8j1DM5mPRk?usp=sharing

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Keselarasan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
19	Revolusi Digital: Membangun Pemerintahan Efisien melalui Integrasi Teknologi Informasi dalam Administrasi Publik Menggunakan AI Chatbot Rekomendasi : Dalam konteks Kalimantan Timur—sebagai wilayah strategis yang tengah mempersiapkan diri menjadi pusat pemerintahan nasional melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)—pemanfaatan teknologi informasi, khususnya melalui integrasi AI Chatbot, menjadi peluang sekaligus tantangan besar dalam membangun administrasi publik yang modern dan adaptif. Rekomendasi tersebut mencakup aspek desain sistem, kesiapan infrastruktur, pelatihan SDM, hingga penguatan tata kelola data dan regulasi etis, sehingga adopsi AI Chatbot dapat dilakukan secara inklusif dan berkeadilan.	https://drive.google.com/file/d/1pKW2lQlWU9uQAuKBASRJd_SwWlbrf6K/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 9: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan, Sasaran 10: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi, Bidang Pembangunan : Tata Kelola Pemerintahan dan Transformasi Digital, RPJMD Kaltim Hal: 239,241, 257-260, Merancang kerangka kerja layanan administrasi publik yang disempurnakan dengan mengintegrasikan teknologi AI Chatbot, untuk mengatasi keterbatasan yang ditemukan dalam kegunaan, kualitas informasi, dan kualitas interaksi	https://drive.google.com/drive/folders/16ULauxQQ6cBFMqzRMuZJAJf4b6iR11a4?usp=sharing
20	Studi Mix-Method: Analisis Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Program Kader Malaria di Wilayah Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) dan Daerah Endemis Sekitarnya Rekomendasi : pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa implementasi kebijakan pengendalian malaria melalui kader malaria dapat berjalan secara berkelanjutan dan kontekstual, khususnya di Wilayah Pembangunan IKN dan wilayah endemis sekitarnya. Rekomendasi berikut dirumuskan untuk memperkuat keterkaitan antara desain kebijakan dan praktik lapangan yang telah dijalankan oleh kader. Memperkuat Dukungan Sistem terhadap Peran Kader sebagai Aktor Lapangan Utama. Menyelaraskan Tuntutan Program dengan Kapasitas Nyata Kader. Menjamin Keberlanjutan Penguatan Kapasitas dan Supervisi.	https://drive.google.com/file/d/1OL30UdcnVzNKDh2wwMvgZXSqPN8Wo8Y/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 5: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, Bidang Pembangunan : Kesehatan, RPJMD Kaltim Hal;284: Mengevaluasi implementasi kebijakan dalam dimensi efektifitas, efisiensi, kecukupan dan responsibilitas pelaksanaan peran kader malaria di Wilayah Pembangunan IKN dan wilayah endemis sekitarnya	https://drive.google.com/drive/folders/12bJ3k-lf3a_e4hDxEYDoo757PqS9ONBq?usp=sharing
21	Perancangan Prototype Aplikasi Kiau Fio Sebagai Peningkatan Akses dan Mutu Kesehatan di Kalimantan Timur Rekomendasi : Riset ini menguraikan tantangan yang ditimbulkan oleh keterbatasan akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama pelayanan Fisioterapi di Kalimantan Timur. Sumber daya manusia dan tempat informasi pelayanan Fisioterapi berpotensi menimbulkan kualitas pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa user siap untuk mengadopsi aplikasi KIAUFISIO. Hampir semua user menantikan launching aplikasi KIAUFISIO dalam bentuk semua perangkat seluler dalam proses booking antrian, akses informasi tempat dan Fisioterapi serta video latihan mandiri. Sebagian besar user percaya bahwa KIAUFISIO untuk mengakses data pasien Fisioterapi akan sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Menarik nya ada dua cara untuk menanggapi permintaan BPJS Kesehatan dan tenaga kesehatan Fisioterapi: pertama, admin Fisioterapi di Rumah Sakit hendak nya dibuat terpisah dengan admin Fisioterapi di Klinik dan Praktek Mandiri yang belum ada kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kedua, aplikasi KIAUFISIO dapat tersinkronisasi dengan data AKUN SEHAT yang dibawah oleh Kementrian Kesehatan untuk mempermudah data sehingga tidak perlu double pengisian data berkali-kali. Secara kontribusi ilmiah, riset ini menambah khazanah pengetahuan terkait pengembangan aplikasi kesehatan digital	https://drive.google.com/file/d/1PLnzIL36tSL2lUmWifBUiSxdr1R_G89d/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 5: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, Bidang Pembangunan: Kesehatan, RPJMD Kaltim Hal: 284, Membantu meningkatkan kesehatan masyarakat melalui teknologi informasi digital berbasis kesehatan yang memudahkan pasien/ keluarga pasien untuk dapat berkonsultasi dengan Fisioterapi	https://drive.google.com/drive/folders/1V7BH1fWqsQWri2l6EO0V0aFbUou6pBrb?usp=sharing

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Keselarasan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
22	<p>Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>Rekomendasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Pemantauan Berkala, melalui forum evaluasi triwulanan dengan seluruh kabupaten/kota untuk memantau progres perbaikan berdasarkan hasil IPKD. 2. Memfasilitasi sharing session antar daerah dengan best practices dalam pengelolaan keuangan, khususnya dari Balikpapan dan Kutai Kartanegara. 3. Melakukan studi mendalam tentang faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran di daerah tertentu (seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat). 4. Selain itu, kajian dampak perubahan bobot Dimensi 5 dan 6 terhadap peringkat daerah secara keseluruhan. 	https://drive.google.com/file/d/1iMyRZPVWNB4M6wOSiNkjdx0OKap_pTFw/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 8: Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat, Bidang Pembangunan: Kebudayaan, RPJMD Kaltim Hal: 256, 290-291: Membuat rekomendasi kebijakan peningkatan pembangunan kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur	https://drive.google.com/drive/folders/1UmMW7W-Tjb9v6OaqNW1lq3lITYt9eNR?usp=sharing
23	<p>Pengembangan Inovasi Modern Hydrogel Patch Sebagai Wound Dressing Dari Tanaman Lokal Kalimantan Timur Bajakah Tanaman Lokal Untuk Pengobatan Komplikasi Infeksi Biofilm Staphylococcus Aureus Pada Ulkus Diabetikum</p> <p>Rekomendasi :</p> <p>Penelitian ini membuktikan bahwa ekstrak Bajakah Tampala (Spatholobus littoralis Hassk.) memiliki potensi kuat sebagai bahan aktif dalam formulasi hydrogel patch untuk penyembuhan luka ulkus diabetikum yang terinfeksi Staphylococcus aureus. Secara keseluruhan, hydrogel patch ekstrak Bajakah Tampala memiliki potensi besar sebagai inovasi wound dressing modern berbasis bahan alam Kalimantan Timur untuk membantu penyembuhan luka diabetikum. Penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan skala lebih besar menuju uji lanjutan, perlindungan kekayaan intelektual, dan komersialisasi produk fitoterapi lokal.</p>	https://drive.google.com/file/d/1nkD0SfVli_fPBX8basI6CDwZ4sWMA04b/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 1 – Terakselerasinya Perekonomian Daerah dan Sasaran 5 – Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, Bidang Pembangunan : Kesehatan dan Kehutanan, RPJMD Kaltim Hal: 270, 283: Mendukung strategi peningkatan kualitas percepatan penanganan masalah kesehatan dan peningkatan produktifitas disektor kehutanan melalui pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	https://drive.google.com/drive/folders/1vavZels0IZmtpLiLaOoVRxfoxpwAhmws?usp=sharing
24	<p>Kajian Pembelajaran Interaktif Bahasa Kutai Sebagai Penunjang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah Berbasis Game Agent-Ai</p> <p>Rekomendasi:</p> <p>Pemanfaatan edugame “Etam-edu” dapat diterapkan dan digunakan diseluruh sekolah dan masyarakat di Kalimantan Timur. Tetapi penekanan yang harus segera ditindaklanjuti adalah melakukan koordinasi dengan berbagai Pihak baik dari Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Gubernur), OPD terkait, Perguruan Tinggi dan juga Masyarakat agar dapat mengambil kebijakan dan keputusan bersama dalam pelestarian Budaya Lokal, salah satunya pelestarian Bahasa Kutai. Pembentukan adanya Program Studi Pendidikan Bahasa Kutai, harus segera diusahakan agar setidaknya dalam waktu 4 atau 5 tahun lagi tersedia tenaga penagjar yang memiliki kompetensi Pengajar Bahasa Kutai di Kalimantan Timur. Jika tenaga pengajar memiliki kompetensi, didukung dengan peraturan dan kebijakan daerah maka pelestarian budaya lokal ini baru dapat tercapai</p>	https://drive.google.com/file/d/1FRnoQ98CUpFqSMuBbyNaNQtRk0zmpQNZ/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 8 – Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat, Bidang Pembangunan : Pendidikan dan Kebudayaan, RPJMD Kaltim Hal: 290: Mendukung strategi pengembangan ketahanan budaya melalui pelestarian, revitalisasi dan peningkatan literasi budaya lokal	https://drive.google.com/drive/folders/1My-2oP0pGwM9uVgVXxp3XhNBju_gSwl?usp=sharing
25	<p>Pengembangan Aplikasi Inovasi “Etam-Edu” Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah Kalimantan Timur</p> <p>Rekomendasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas jumlah kosakata bahasa daerah Kutai serta menambah variasi ekspresi karakter. 2. Memperkaya konten budaya seperti cerita rakyat, permainan tradisional, dan adat istiadat untuk memberikan wawasan 	https://drive.google.com/file/d/1y2PSfNIRN1iAjaFWZOpFwyS5tpju5qhj/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 8 – Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat dan Sasaran 10 - Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi, Bidang Pembangunan : Pendidikan , Kebudayaan dan Digitalisasi, RPJMD Kaltim Hal: 290, 294 : Mendukung strategi pengembangan ketahanan budaya	https://drive.google.com/drive/folders/1YBYBJWkyrqwVqMreQwz2Aqg0Rr4UwHO4?usp=sharing

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Keselarasan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
	<p>budaya yang lebih komprehensif.</p> <p>3. Meningkatkan kecerdasan Chatbot ETAM dengan pengembangan pemahaman konteks yang lebih baik, perluasan basis data balasan, serta penambahan fitur suara seperti text-to-speech dan voice recognition agar ramah bagi anak usia dini.</p> <p>4. Mengoptimalkan tampilan antarmuka agar lebih responsif di berbagai perangkat dengan visual yang menarik dan nyaman digunakan.</p> <p>5. Melakukan uji coba lebih luas pada berbagai kelompok usia dan wilayah guna memperoleh masukan yang lebih bervariasi.</p> <p>6. Melakukan kolaborasi lintas disiplin bersama ahli bahasa, budayawan, pendidik, dan pengembang teknologi.</p> <p>7. Menyusun standar kurikulum muatan lokal yang terintegrasi dalam aplikasi.</p> <p>8. Meningkatkan sistem keamanan dan privasi data pengguna.</p> <p>9. Menyusun roadmap penelitian hingga tahap hilirisasi agar aplikasi dapat diimplementasikan secara luas.</p>			<p>melalui pelestarian, revitalisasi dan peningkatan literasi budaya lokal berbasis aplikasi pembelajaran digital</p>	
26	<p>Pengembangan Website Etamkawin Sebagai Platform Digital Untuk Meningkatkan Persiapan Pernikahan Di Kalimantan Timur</p> <p>Rekomendasi :</p> <p>1. Perluasan Uji Coba Pilot: Mengingat validasi baru dilakukan di tingkat KUA Sungai Pinang, disarankan untuk memperluas uji coba implementasi ke beberapa KUA lain di wilayah Kutai Kartanegara dan Balikpapan untuk menguji skalabilitas sistem pada kondisi demografis yang berbeda.</p> <p>2. Integrasi API Dukcapil: Untuk saat ini verifikasi NIK masih dilakukan secara semi-otomatis. Pengembangan selanjutnya diharapkan dapat menjalin kerjasama teknis (PKS) dengan Dinas Dukcapil untuk akses API verifikasi identitas kependudukan secara real-time.</p> <p>3. Pengembangan Mobile Apps Native: Meskipun versi web saat ini sudah responsif (PWA), pengembangan aplikasi native (Android/iOS) dapat dipertimbangkan untuk memanfaatkan fitur perangkat keras secara maksimal, seperti penggunaan biometrik (fingerprint/face id) untuk login yang lebih aman.</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1hd4--lnxHtVMwvj8FU-yOmp3flW9Os2h/view?usp=sharing</p>	<p>RPJMD KALTIM 2025-2029</p>	<p>Sasaran 8 – Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat dan Sasaran 10 - Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi, Bidang Pembangunan : Sosial dan Digitalisasi, RPJMD Kaltim Hal: 290, 294 : Mendukung strategi pengembangan ketahanan sosial keagamaan melalui peningkatan literasi persiapan pernikahan berbasis aplikasi digital</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1AFZf5ysmVe9iiBdqclPJK8269p55z4T?usp=sharing</p>
27	<p>Pengembangan Kapal Listrik Wisata Sebagai Alat Transportasi Ramah Lingkungan Di Sungai Karang Mumus</p> <p>Rekomendasi :</p> <p>1. Penguatan dan Penyempurnaan Desain Kapal</p> <p>2. Optimalisasi Sistem Listrik dan Energi Terbaru</p> <p>3. Keselamatan dan Operasional Wisata</p> <p>4. Uji Coba Lanjutan dan Pengembangan Skala Produksi</p> <p>5. Dukungan Regulasi dan Model Bisnis</p> <p>6. Potensi Pengembangan Riset Lanjutan</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/166tubzwwp-y7ytue1O77YQTrGNrwoxSz/view?usp=sharing</p>	<p>RPJMD KALTIM 2025-2029</p>	<p>Sasaran 1 – Terakselerasinya Perekonomian Daerah & Sasaran 4 – Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan, Bidang Pembangunan : Pariwisata dan EBT, RPJMD Kaltim Hal: 271, 281 : Mendukung strategi pengembangan sektor pariwisata dengan mengembangkan sarana dan fasilitas penunjang wisata berbasis teknologi ramah lingkungan</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1ptqtFk7gSJDrglx0_cYyXNQXviSPFO2X?usp=sharing</p>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

No	Judul Rekomendasi Kajian	Bukti Dukung Kajian (Link)	Pemanfaatan Kajian (digunakan untuk)	Deskripsi Bukti Dukung Keselarasan (Sebutkan Halaman dalam Bukti Dukung)	Bukti Dukung (Link Pemanfaatan Kajian)
28	<p>Sistem Cerdas Peringatan Longsor: Teknologi Lokal Untuk Mitigasi Bencana Rekomendasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi lapangan jangka panjang pada beberapa titik rawan longsor untuk mengevaluasi kinerja pada kondisi nyata. 2. Pelibatan masyarakat melalui edukasi penggunaan alarm dan pemahaman indikator risiko. 3. Penguatan jaringan komunikasi (LoRa/seluler) untuk memastikan transmisi data stabil. 4. Peningkatan akurasi sensor melalui pemilihan komponen lebih sensitif dan kalibrasi berkala. 5. Integrasi dengan sistem kebencanaan daerah, termasuk BPBD, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat. 6. Pengembangan versi EWS Longsor V.3 dengan fitur AI/IoT dan dashboard analitik risiko. 	https://drive.google.com/file/d/19VqgIntwd_ZFq-hAVrAaC8GSYuyvC9R11/view?usp=sharing	RPJMD KALTIM 2025-2029	Sasaran 4 – Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan, Bidang Pembangunan : Kebencanaan, RPJMD Kaltim Hal: 282: Mendukung strategi peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana dengan memperkuat sistem peringatan dini pada daerah rawan bencana longsor	https://drive.google.com/drive/folders/1AJIUzB3FWfzLkUnyHCiUil-ggLunC5i7?usp=sharing

- Untuk menyelaraskan capaian kinerja capaian kinerja antara Renstra 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029, telah dilakukan pemutakhiran data dukung capaian kinerja antara kedua Renstra tersebut, yang semula data dukungnya berupa dokumen RENJA/RKA menjadi sitasi/referensi/ranperda/ranperkada, Berita Acara Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi, Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Dokumen Perencanaan/Anggaran Perangkat Daerah, Kekayaan Intelektual/KI.

b. Analisis penjabaran realisasi kinerja tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026. Perhitungan Indikator Kinerja: **“Jumlah Hasil Riset yang Dapat Diterapkan (Aplikatif) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah”**

Tabel 3.23 realisasi kinerja tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET 2025	FORMULASI	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	BUKTI PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI	KET.
I	SASARAN 1 yang mendukung tujuan 1 : Meningkatnya penerapan hasil Riset dan Inovasi oleh perangkat daerah dan masyarakat							
1.	Jumlah Hasil Riset yang Dapat Diterapkan (Aplikatif) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Riset	5	Jumlah Hasil Riset yang akan diimplementasikan bagi masyarakat dan pembangunan daerah (Stakeholders, Pihak yang Berkepentingan, dan Masyarakat)	4	80%	Data Dukung Renja dan DPA Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Rekomendasi :ditindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dengan membangun creative hub di Gedung ex temindung pada tahun 2024 untuk memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif pada subsektor kuliner, fesyen, dan kriya	1. Riset Identifikasi Potensi Unggulan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET 2025	FORMULASI	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	BUKTI PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI	KET.
							<p>Data Dukung Renja dan DPA Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Rekomendasi ;ditindaklanjuti oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dengan melaksanakan kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri pada tahun 2024 untuk memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif pada subsektor kuliner, fesyen, dan kriya.</p>	<p>2. Riset Sumber Daya Manusia Perindustrian Kalimantan Timur Dalam Menghadapi Era Industri 4.0 , Tahun 2024</p>
							<p>Data Dukung : Renstra DPMSTP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, BAB VI Tabel Kerangka Pendanaan, Indikator program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024-2026, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi, Halaman 110 Rekomendasi : Strategi pengembangan pada wilayah sepanjang ALKI II koridor Kalimantan yang terdampak keberadaan IKN dapat dilakukan melalui kebijakan berikut: peningkatan kapasitas produksi dan hilirisasi produk, pengendalian urbanisasi dan periurbanisasi di sekitar Tri Kota, optimalisasi peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), peningkatan aksesibilitas, serta pembangunan agroindustri dan industri pengola, Tindaklanjuti rekomendasi : Kegiatan ALKI II Zone Investment Forum Tahun 2024</p>	<p>3. Strategi Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Wilayah Regional Kalimantan Timur Di Sepanjang ALKI II Tahun 2024</p>
							<p>RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 : BAB II Gambaran Umum Daerah, Sub Bab 2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah, Hal 210: Sebagai salah satu komponen pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kalimantan Timur masih tergolong rendah, yaitu sebesar 52,64.</p>	<p>4. Riset Strategi Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Timur, 2024</p>

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET 2025	FORMULASI	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	BUKTI PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI	KET.
2.	Jumlah Hasil Inovasi yang Dapat Diterapkan (Aplikatif) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Inovasi	5	Jumlah Hasil INOVASI yang akan diimplementasikan bagi masyarakat dan pembangunan daerah (Stakeholders, Pihak yang Berkepentingan, dan Masyarakat)	4	80	1. Dokumen Renja dan DPA Bappedalitbang Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2024 yang memuat rencana kerja serta anggaran kegiatan Inovasi PEPES IKAN Pada sebagai hasil adopsi dari kegiatan BRIDA Prov. Kaltim	1. kegiatan Inovasi PEPES IKAN Pada 2024
							2. Dokumen Renja dan DPA Bappedalitbang Kota Balikpapan Tahun 2024 yang memuat rencana kerja serta anggaran kegiatan Kreasi Inovasi (KRESNOVA) sebagai hasil adopsi dari kegiatan BRIDA Prov. Kaltim	2. kegiatan Kreasi Inovasi (KRESNOVA) 2024
							3. Dokumen Renja dan DPA Bappedalitbang Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2025 yang memuat rencana kerja serta anggaran kegiatan Inovasi PEPES IKAN Pada sebagai hasil adopsi dari kegiatan BRIDA Prov. Kaltim	1. kegiatan Inovasi PEPES IKAN Pada 2025
							4. Dokumen Renja dan DPA Bappedalitbang Kota Balikpapan Tahun 2025 yang memuat rencana kerja serta anggaran kegiatan Kreasi Inovasi (KRESNOVA) sebagai hasil adopsi dari kegiatan BRIDA Prov. Kaltim	2. kegiatan Kreasi Inovasi (KRESNOVA) 2025

Penjelasan:

- Realisasi kinerja tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 adalah hasil riset dan inovasi yang dapat diterapkan (aplikatif) dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 dan tahun 2025.
- Data dukung capaian kinerja Renstra Tahun 2024-2026 adalah Dokumen RENJA/RKA/DPA Perangkat Daerah.

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dilakukan untuk mengukur efektivitas dan posisi relatif instansi memberikan gambaran obyektif mengenai kualitas kinerja dibanding rata-rata nasional. Dalam hal ini Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan analisis sebagai berikut:

Tabel 3.24 Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	REALISASI NASIONAL	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah	%	60,61	84,85		139,99
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis Hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Kebijakan	5	5	100	

Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Dimanfaatkan dari kegiatan BRIDA Provinsi Jawa Timur menggambarkan sejauh mana produk kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengambilan keputusan strategis dan pelaksanaan kebijakan di daerah. Rekomendasi Kebijakan yang Dimanfaatkan terealisasi sejumlah 5 Rekomendasi Kebijakan dengan tingkat capaian 100%.

Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran strategis Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah dimaksud berupa rekomendasi kebijakan hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Rekomendasi Kebijakan yang Dimanfaatkan terealisasi sebesar 84,85% (pemanfaatan 28 Rekomendasi Kebijakan Hasil riset), dengan tingkat capaian 139,99%. Analisis ini menunjukkan bahwa kinerja BRIDA Provinsi Jawa Timur dan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur mencerminkan keberhasilan dalam menghasilkan rekomendasi hasil riset dan inovasi yang selaras dengan penyelesaian permasalahan pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah, sehingga semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin berkualitasnya hasil riset dan inovasi.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan.

Capaian persentase hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah menunjukkan keberhasilan yang signifikan, dari 33 rekomendasi hasil riset yang dihasilkan, 28 hasil riset telah selaras dengan penyelesaian permasalahan pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah pembangunan daerah. Keberhasilan ini

mencerminkan kemampuan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dalam menghasilkan kebijakan yang relevan dan berbasis bukti, meskipun ada tantangan dalam memastikan pemanfaatan secara keseluruhan. Beberapa hal atau faktor yang mendukung keberhasilan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur diantaranya:

V. Faktor Eksternal Pendorong Penerapan Hasil Riset Dan Inovasi Hasil Riset Dan Inovasi Yang Selaras Untuk Penyelesaian Masalah Pembangunan Dan Peningkatan Potensi Unggulan Daerah;

- a) Kebijakan yang mengatur tentang riset dan inovasi, antara lain : Peraturan Presiden RI nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan , Susunan, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja PD.
- b) Kerjasama Riset dan Inovasi multipihak melalui kolaborasi dan sinkronisasi riset dan inovasi secara nasional dan internasional.
- c) Adanya fasilitasi dan penjangkaran inovasi.
- d) Kerjasama lintas bidang, lintas wilayah dan lintas sektor.

VI. Faktor Internal Pendorong Penerapan Hasil Riset Dan Inovasi Hasil Riset Dan Inovasi Yang Selaras Untuk Penyelesaian Masalah Pembangunan Dan Peningkatan Potensi Unggulan Daerah:

- a) IKU dari sasaran strategis yang menjadi komitmen pimpinan untuk meningkatkan Penerapan Hasil Riset dan Inovasi oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat
- b) Peningkatan kualitas riset dan inovasi yang berbasis Teknologi Informasi aplikasi IRIS (Innovation and Research Information System).
- c) Jurnal Riset Pembangunan Balitbangda Prov. Kaltim sebagai wadah bagi periset di lingkungan Balitbangda Prov. Kaltim dan BRIN untuk menyampaikan karya tulis ilmiah hasil riset.
- d) Adanya sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil riset dan inovasi
- e) Kepatuhan ASN terhadap kebijakan yang berlaku.

VII. Faktor Eksternal Penghambat Penerapan Hasil Riset Dan Inovasi Hasil Riset Dan Inovasi Yang Selaras Untuk Penyelesaian Masalah Pembangunan Dan Peningkatan Potensi Unggulan Daerah:

- a) Belum ada kebijakan yang mengatur tentang pemanfaatan hasil riset dan inovasi
- b) Hasil riset dan inovasi yang belum memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah

- c) Efisiensi/pengurangan anggaran 4. Kurangnya data dukung terkait isu strategis / permasalahan dan potensi unggulan daerah.
- d) Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pemangku kepentingan dari pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
- e) Keterbatasan jumlah periset dan bidang kepakaran di Provinsi Kalimantan Timur.

VIII. Faktor Internal Penghambat Penerapan Hasil Riset Dan Inovasi Hasil Riset dan Inovasi Yang Selaras Untuk Penyelesaian Masalah Pembangunan Dan Peningkatan Potensi Unggulan Daerah:

Belum optimalnya pengawalan pemanfaatan hasil riset dan inovasi oleh Balitbangda Prov. Kaltim. Masalah terbesar yang hampir dialami seluruh lembaga riset adalah belum dimanfaatkannya hasil riset dan inovasi oleh pemangku kepentingan, disebabkan hasil riset dan inovasi yang dihasilkan tidak bersifat aplikatif sehingga tidak dapat diterapkan ke masyarakat dan pembangunan daerah.

V. Upaya atau Tindakanjnt

- Upaya yang dilakukan untuk menghindari penurunan kinerja sasaran strategis:

- a) Perencanaan Kinerja
 - Merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja, sampai level pelaksana dan Menyusun serta menginput perencanaan kinerja pada E-SAKIP dan E-Kinerja berdasarkan Mekanisme Kinerja Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja									
Daftar Perjanjian Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi.									
Periode : 2024-2026									
Tahun : 2025									
+ Tambah									
Penanggung Jawab: Dr.M.Ir. H .Fitriansyah S.T., M.M. (KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)									
Cari									
No.	Sasaran Strategis / Rencana Kinerja / Kondisi yang akan atau seharusnya diwujudkan	Indikator Kinerja (Ukuran Keberhasilan)	Satuan	Target 2025					Penanggung Jawab
				Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4	1 Tahun	
1.	Meningkatnya kualitas hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan daerah secara berkelanjutan	Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah	%	15,15	15,15	15,15	15,16	60,61	H .Fitriansyah (KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)
		Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah	%	0,00	0,00	0,00	44,44	44,44	H .Fitriansyah (KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan penduduk	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	37,62	37,63	0,00	0,00	75,25	H .Fitriansyah (KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH)

Gambar 3.5 Perjanjian Kinerja level 1 (Jabatan Pimpinan Tinggi) pada E-SAKIP Tahun 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

MEKANISME KERJA TAHAP PERENCANAAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

PEJABAT PIMPINAN TINGGI/LEVEL 1					PEJABAT ADMINISTRATOR/LEVEL 2					PEJABAT PENGAWAS/PELAKSANA/LEVEL 3					
SASARAN/RENCANA HASIL KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025	PROGRAM PROGRAM/RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	
Tujuan : Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	1. Persentase pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai bahan referensi perumusan kebijakan pembangunan, pengembangan dunia usaha, industri/riset, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis IPTEK	%	N/A	68	Program Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan penyenggaraan riset dan inovasi	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan penyenggaraan riset dan inovasi	%	N/A	32,51	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Persen	80
	2. Indeks Inovasi daerah (ID)	Indeks	N/A	62,87							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	Persen	50
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pemadaian daerah secara berkelanjutan	1. Persentase hasil riset dan inovasi yang memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan pemadaian dan peningkatan potensi unggulan daerah	%	N/A	70						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Menunungi Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	Persentase Menunungi Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	Persen	0,06	
	2. Persentase tingkat kematangan inovasi daerah	%	N/A	63						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Menunungi Temuan Audit Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik daerah yang diselesaikan Tepat Waktu	Persen	85	
Sasaran 2 : Meningkatkan Kinerja pelayanan penunjang penyenggaraan riset dan inovasi	1. Nilai SAVUP Balikpapan	Nilai Predikat	70	71 (BE)						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan umum berbasis elektronik	Persentase pelayanan umum berbasis elektronik	Persen	60	
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	84						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	Persen	57	
										Penyediaan Jasa Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pelayanan Penunjang Riset dan Inovasi	Persen	100	
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Persen	75	
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Litbang/riset berbasis isu strategis dan potensi unggulan daerah	Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras dengan isu strategis/pemadaian dan potensi unggulan daerah	Persen	N/A	72,73	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Pelaksanaan Litbang/riset dalam penyelesaian pemadaian Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah bidang ekonomi dan Pembangunan dan hasil riset	Persentase rekomendasi Penelitian dan Pengembangan dan pengembangan potensi unggulan daerah bidang ekonomi dan Pembangunan dan hasil riset	Persen	53

RENCANA AKSI KEGIATAN	ANGGARAN RINCI PER RENCANA AKSI (Rp)	JADWAL PELAKSANAAN				TEMPAT KEGIATAN	PEJABAT PENILAI KINERJA	PENGUSAN		LINTAS UNIT ORGANISASI/LINTAS INSTANSI PEMERINTAH	JUMLAH PEJABAT DALAM PENGUSAN (TIM KERJA)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV			INDIVIDU	SURAT TUGAS		PENGENDALI MUTU	PENGENDALI TEKNIK	KETUA	ANGGOTA
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	324.100.000					Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Air Putih	Chamarjaty, S.T.,M.Si	Ya		Bappeda Prov. Kaltim, BPKAD Prov. Kaltim, Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim		Anwar Salim	Suhartati, S.E	Awar Salim, Fahrizal Anwar
2. Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.790.828					Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Air Putih	Chamarjaty, S.T.,M.Si			Bappeda Prov. Kaltim, BPKAD Prov. Kaltim		Fahrizal Anwar	M. Luthfi	M. Luthfi, Fahrizal Anwar
3. Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.790.828					Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Air Putih	Chamarjaty, S.T.,M.Si			Bappeda Prov. Kaltim, BPKAD Prov. Kaltim		Fahrizal Anwar	M. Luthfi	M. Luthfi, Fahrizal Anwar
4. Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.041.828					Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Air Putih	Chamarjaty, S.T.,M.Si			Bappeda Prov. Kaltim, BPKAD Prov. Kaltim		Fahrizal Anwar	M. Luthfi	M. Luthfi, Fahrizal Anwar
5. Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.041.828					Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Air Putih	Chamarjaty, S.T.,M.Si			Bappeda Prov. Kaltim, BPKAD Prov. Kaltim		Fahrizal Anwar	M. Luthfi	M. Luthfi, Fahrizal Anwar
6. Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	53.192.000					Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Chamarjaty, S.T.,M.Si			Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltim		Fahrizal Anwar	Fadlansyah	Fadlansyah, Yuda Aprilanto, Mochamad Ihsan Ash Shidiq
7. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.808.000					Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Air Putih	Chamarjaty, S.T.,M.Si	Ya		Bappeda Prov. Kaltim, BPKAD Prov. Kaltim, Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim		Eka Syachtiawati	Suhartati, S.E	Suhartati, Anwar Salim, Eka Syachtiawati, Fahrizal Anwar, Hersom Maryanto
8. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90.000.000					Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Air Putih	Chamarjaty, S.T.,M.Si			BPSDM Prov. Kaltim, BKD Prov. Kaltim		Tri Susilo	Suhartati, S.E	Tri Susilo, Chintya Kania Dea, Aulia Noviyanti

Gambar 3.6 Mekanise Perencanaan Kinerja Sampai Level Pelaksana



Gambar 3.5 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Perencanaan Kinerja Tahun 2025

b) Pengukuran Kinerja

- Pimpinan selalu terlibat dan hadir sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja dan mengevaluasi capaian kinerja yang dilengkapi dokumentasi yang memadai dan melakukan pemantauan laporan pengukuran kinerja berkala dan berjenjang terhadap capaian kinerja e-SAKIP setiap pegawai.



Gambar 3.6 Rapat Pengukuran Kinerja pada e-SAKIP Tahun 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

Gambar 3.7 Realisasi Kinerja Tahun 2025 pada aplikasi e-SAKIP Tahun 2025

PERMINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Jalan M. T. Haryono No.126 Samarinda 75124. Telp. (0541) 201446, Fax. (0541) 732286
 Website : <https://bidan.kaltimorprov.go.id> Email : bidan@kaltimorprov.go.id

Samarinda, 22 Juli 2025

Nomor : 000.8.6.3/513/1/Litbang/2025
 Lampiran :
 Hal : Keputuhan ASN Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Pengisian E-SAKIP Tahun 2025

Yth. ASN Di Lingkungan Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur
 di
 Tempat

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Badan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 000.8.6.3/24/1/Litbang/2025 tanggal 2 Juli 2025, hal Evaluasi Capaian Kinerja Pada E-SAKIP dan E-Kinerja Tahun 2025, dengan ini disampaikan nama-nama pegawai yang belum lengkap mengisi E-SAKIP pada Intivun II Tahun 2025 sampai dengan batas waktu yang ditetapkan. Adapun nama-nama pegawai tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adil Hendro P. S. I.P., M.A.P.
 Peneliti Ahli Muda
 NIP. 195906271998031006
2. Azwar
 Pengadministrasi Program dan Tata Operasional Penelitian
 NIP. 195204272009011002
3. Riyan Fahrurrahman, S.S.T.
 Penata Layanan Operasional
 NIP. 195801062025211019
4. Tri Wuri Handayani, S.T.Bns
 Penata Layanan Operasional
 NIP. 199604172025212025

Maka terhadap nama-nama tersebut, kami memberikan teguran tertulis agar lebih memperhatikan kepatuhan terhadap pengisian capaian kinerja pada E-SAKIP Tahun 2025. Demikian surat teguran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan bahan evaluasi untuk capaian kinerja tahunan berikutnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Di M.Sr. H. Fitriyah S.T., M.M.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19731127.200604.1.009



Gambar 3.8 Pemberian Penghargaan, Teguran Tertulis dan Pelaksanaan Budaya Kerja Tahun 2025

c) Pelaporan Kinerja

- Optimalisasi pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja (LKjIP) agar menjadi perhatian utama pimpinan dalam mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi melalui reuiu LKJIP pertriwulan.
- Menyajikan informasi dalam laporan kinerja (LKJiP) yang telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.



Gambar 3.9 Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2024, melalui Workshop Penguatan SAKIP bagi ASN Di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Desember Tahun 2025.





Gambar 3.10 Workshop Penguatan SAKIP Di Lingkungan ASN Balitbangda Tahun 2025

e) Lain-lain

- Optimalisasi koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait hasil Riset dan Inovasi yang akan atau telah dilaksanakan.
- Penguatan basis data dan portal informasi usulan riset dan pengembangan inovasi yang terintegrasi dalam kebijakan strategis Pembangunan Daerah.
- Penguatan mekanisme koordinasi dan kolaborasi berbasis kewenangan antar tingkat pemerintah, antar sektor dan pemangku kepentingan terkait aspek strategis riset dan pengembangan inovasi yang berdampak, berkelanjutan dan berdaya saing (memperkuat kemitraan terkait Riset dan Inovasi).
- Penguatan SDM (Periset dan Analisi Kebijakan) dan fungsi kelembagaan pengampu urusan dan mitra program, penguatan sarana prasarana (laboratorium, workshop, data center), akses kemitraan pembiayaan dengan dunia usaha/hilirisasi serta akses kerjasama dalam riset dan pengembangan inovasi.
- Optimalisasi pemanfaatan hasil riset pada aplikasi IRIS dan pemetaan hasil inovasi serta inventarisasi usulan inovasi melalui aplikasi IRIS.
- kolaborasi inovasi dengan para stakeholder.

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan hubungan antara hasil yang dicapai dalam suatu upaya dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tingkat efisiensi sumber daya dapat dinilai dari kuantitas sumber daya yang digunakan dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Suatu kegiatan dikategorikan sebagai efisien jika hasil yang diharapkan dapat tercapai (secara kualitas dan kuantitas) dengan menggunakan sumber daya dengan kuantitas minimal.

Tabel 3.25 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2		4	5
1	Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan	139,99%	79,27%	60,72%

Sumber Data : Realisasi IKU dan Anggaran Tahun 2025

Anggaran untuk melaksanakan sasaran strategis tersebut adalah sebesar Rp. 7.466.357.003,-, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.918.941.307,- atau 79,27%. Dengan penyerapan anggaran sebesar 79,27%, capaian kinerja sasaran strategis tersebut dapat melebihi target kinerja $\geq 100\%$ (139,99%), dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 60,72%.

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Upaya pencapaian target sasaran “Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi Untuk Peningkatan Potensi Unggulan Daerah dan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Daerah Secara Berkelanjutan” didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.26 Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja Sasaran Strategis 1

NO.	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras dengan isu strategis/ permasalahan dan potensi unggulan daerah	%	72,73	84,85	116,67
		Persentase hasil riset dan inovasi yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/ internasional/buku/naskah akademis rancangan perda/pergub	%	72,73	78,79	108,33
2.	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan,	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dari hasil fasilitasi dan riset bidang pemerintahan dan peraturan/regulasi	%	57,14	85,71	150

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

NO.	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
2.1	Fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	1	1	100
2.2	Fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum	Laporan	2	3	150
2.3	Fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	1	100
2.4	Fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	1	1	100
2.5	Fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan	1	1	100
2.6	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah Laporan Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Dokumen	1	1	100
2.7	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan	Jumlah dokumen hasil Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan	Rekomendasi	2	2	100
3	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dan potensi pengembangan unggulan daerah dari hasil riset bidang sosial dan kependudukan	%	50,00	83,33	166,67
3.1	Penelitian dan Pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Dokumen	1	1	100
3.2	Penelitian dan Pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dokumen	1	1	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

NO.	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
3.3	Penelitian dan Pengembangan pendidikan dan kebudayaan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan pendidikan dan kebudayaan	Dokumen	1	1	100
3.4	Penelitian dan Pengembangan kesehatan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan kesehatan	Dokumen	1	1	100
3.5	Penelitian dan Pengembangan tenaga kerja	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan tenaga kerja	Dokumen	1	1	100
3.6	Penelitian dan Pengembangan partisipasi masyarakat	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan partisipasi masyarakat	Dokumen	1	1	100
4.	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah dari hasil riset bidang ekonomi dan Pembangunan	%	53,08	84,62	159,42
4.1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	1	100
4.2	Penelitian dan Pengembangan perindustrian dan perdagangan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan perindustrian dan perdagangan	Dokumen	1	1	100
4.3	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	1	1	100
4.4	Penelitian dan Pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	Dokumen	1	1	100
4.5	Penelitian dan Pengembangan kelautan dan perikanan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan kelautan dan perikanan	Dokumen	1	3	300
4.6	Penelitian dan Pengembangan energi dan sumberdaya mineral	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan energi dan sumberdaya mineral	Dokumen	1	1	100
4.7	Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup	Dokumen	2	2	100
4.8	Penelitian dan Pengembangan kehutanan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan kehutanan	Dokumen	1	1	100
4.9	Penelitian dan Pengembangan pekerjaan umum	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan pekerjaan umum	Dokumen	1	1	100
4.10	Penelitian dan Pengembangan perhubungan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan perhubungan	Dokumen	1	1	100
4.11	Penelitian dan Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Dokumen	1	1	100

NO.	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
4.12	Penelitian dan Pengembangan penataan ruang dan pertanahan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan penataan ruang dan pertanahan	Dokumen	1	1	100
4.13	Penelitian dan Pengembangan komunikasi dan informatika	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan komunikasi dan informatika	Dokumen	1	1	100
5.	Kegiatan Pengembangan inovasi dan teknologi	Persentase inovasi berbasis IPTEK yang terdaftar dalam HKI dan hak paten	%	53,00	70,00	132,08
5.1	Penelitian, Pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian, Pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Dokumen	7	19	271,43
5.2	Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Jumlah Laporan hasil Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Laporan	1	1	100
5.3	Desiminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Jumlah Laporan Desiminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Laporan	3	3	100
5.4	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	3	3	100
5.5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	1	100

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan riset dan inovasi di Provinsi Kalimantan Timur yang didukung oleh 4 (empat) kegiatan yang menjadi turunan operasional dari Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kegiatan tersebut yakni (1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, (2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, (3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan (4) Pengembangan Inovasi dan Teknologi, serta 31 (tiga puluh) sub kegiatan.

METADATA INDIKATOR PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Metadata Indikator Program Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah formulasi perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja dari program/kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

A. Metadata Indikator Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1. Indikator Program 1.1

Nama Indikator	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras dengan Isu Strategis/Permasalahan dan Potensi Unggulan Daerah (%)
Definisi	Tema dan judul riset dan inovasi diarahkan selaras dengan isu strategis/permasalahan dan potensi unggulan daerah untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah hasil riset dan inovasi yang selaras dengan isu strategis/permasalahan pembangunan dan potensi unggulan daerah}}{\text{Jumlah seluruh hasil riset dan inovasi yang dihasilkan}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah hasil riset dan inovasi yang selaras dengan isu strategis/permasalahan pembangunan dan potensi unggulan daerah - Jumlah seluruh hasil riset dan inovasi yang dihasilkan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin meningkatnya keselarasan antara riset dan inovasi dengan isu strategis daerah
Sumber Data	Balitbangda/Brida Provinsi Kaltim

2. Indikator Program 1.2

Nama Indikator	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Dipublikasikan dalam Jurnal Nasional/Internasional/Buku/Naskah Akademis Rancangan Perda/Pergub (%)
Definisi	Publikasi hasil riset dan inovasi adalah kinerja penting dalam penyelenggaraan riset dan inovasi. Publikasi dimaksudkan untuk penyebarluasan hasil riset dan inovasi, memberikan kontribusi pada lptek dan validasi kualitas hasil riset dan inovasi
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi yang Dipublikasikan}}{\text{Jumlah Seluruh Hasil Riset yang Dihasilkan}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah hasil riset dan inovasi yang dipublikasikan - Jumlah seluruh hasil riset yang dihasilkan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin meningkatnya kinerja dan kualitas hasil riset dan inovasi
Sumber Data	Balitbangda/ Brida Provinsi Kaltim

B. Metadata Kegiatan

1. Indikator Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan

Nama Indikator	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Pembangunan dari Hasil Fasilitasi dan Riset Bidang Pemerintahan dan Peraturan/Regulasi (%)
Definisi	Mengukur proporsi hasil fasilitasi dan penelitian di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan/regulasi yang menghasilkan rekomendasi kebijakan atau solusi yang relevan dan dapat digunakan untuk penyelesaian permasalahan pembangunan daerah.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan}}{\text{Jumlah riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah hasil fasilitasi dan riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan pembangunan - Jumlah riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin meningkatnya outcome/manfaat yang diperoleh dari kegiatan
Sumber Data	Balitbangda/Brida Provinsi Kaltim

2. Indikator Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan

Nama Indikator	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Pembangunan dan Potensi Pengembangan Unggulan Daerah dari Hasil Riset Bidang Sosial dan Kependudukan (%)
Definisi	Mengukur proporsi hasil penelitian dan fasilitasi di bidang sosial dan kependudukan yang menghasilkan rekomendasi kebijakan atau solusi yang relevan dan aplikatif dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan serta pengembangan potensi unggulan daerah.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan riset bidang sosial dan kependudukan yang memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan}}{\text{Jumlah riset bidang sosial dan kependudukan}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah hasil fasilitasi dan riset bidang sosial dan kependudukan yang memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan pembangunan dan pengembangan potensi unggulan - Jumlah riset bidang sosial dan kependudukan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin meningkatnya outcome/manfaat yang diperoleh dari kegiatan
Sumber Data	Balitbangda/Brida Provinsi Kaltim

3. Indikator Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan

Nama Indikator	Persentase Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Pembangunan dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah dari Hasil Riset Bidang Ekonomi dan Pembangunan (%)
Definisi	Mengukur proporsi hasil penelitian dan fasilitasi di bidang ekonomi dan pembangunan yang menghasilkan rekomendasi kebijakan atau solusi yang relevan dan aplikatif dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan serta pengembangan potensi unggulan daerah.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan riset bidang ekonomi dan Pembangunan yang memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan}}{\text{Jumlah riset bidang bidang ekonomi dan Pembangunan}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah hasil fasilitasi dan riset bidang ekonomi dan pembangunan yang memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan pembangunan dan pengembangan potensi unggulan - Jumlah riset bidang bidang ekonomi dan pembangunan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin meningkatnya rekomendasi/masukan bagi penyelesaian pembangunan dan potensi unggulan daerah
Sumber Data	Balitbangda/Brida Provinsi Kaltim

4. Indikator Kegiatan Pengembangan Inovasi Dan Teknologi

Nama Indikator	Persentase Inovasi Berbasis IPTEK yang Terdaftar Dalam HKI dan Hak Paten (%)
Definisi	Mengukur proporsi inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang telah difasilitasi dan berhasil didaftarkan secara resmi dalam sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan/atau hak paten.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah inovasi berbasis IPTEK yang terdaftar dalam HKI dan Hak Paten}}{\text{Jumlah inovasi yang difasilitasi.}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah inovasi berbasis Iptek yang terdaftar dalam HKI dan hak paten - Jumlah inovasi yang difasilitasi.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin meningkatnya perkembangan inovasi dan teknologi yang memiliki HKI dan atau Hak Paten
Sumber Data	Balitbangda/Brida Provinsi Kaltim

C. Capaian Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah beserta kegiatannya.

Tolok ukur keberhasilan capaian Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dan kegiatan operasionalnya saling bersinergi untuk menghasilkan riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah, dengan data capaian kinerja sebagai berikut:

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah:

- a. Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras dengan isu strategis/ permasalahan dan potensi unggulan daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Sejumlah 28 (dua puluh delapan) riset dan inovasi selaras dengan isu strategis/ permasalahan dan potensi unggulan daerah pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, yang terdiri dari 11 (sebelas) riset bidang sosial dan pemerintahan, 11 (sebelas) riset bidang ekonomi dan pembangunan, 6 (enam) riset bidang inovasi dan teknologi.
- b. Sejumlah 26 (dua puluh enam) hasil riset telah dipublikasikan dalam Jurnal Riset Pembangunan Tahun 2025, yang terdiri dari 10 (sepuluh) riset kegiatan bidang sosial dan pemerintahan, 8 (delapan) riset bidang ekonomi dan Pembangunan, dan 8 (delapan) riset bidang inovasi dan teknologi.
- c. Sejumlah 11 (sebelas) hasil riset bidang sosial dan pemerintahan telah berkontribusi memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan pembangunan di bidang pemerintahan dan peraturan/regulasi serta bidang sosial dan kependudukan, dengan judul riset:
 1. Hilirisasi Produk Unggulan Kalimantan Timur untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Daerah.
 2. Model Kolaborasi Bumdes, Industri, Perguruan Tinggi Dan Pemerintah Daerah (Quadruple Helix) Untuk Kemandirian Daerah Di Desa Lung Anai, Sungai Bawang, Desa Muara Kaman Ulu, Dan Desa Sepatin Kabupaten Kutai Kartanegara Serta Desa Labanan, Desa Muara Lesan, Desa Lesan Dayak, Dan Desa Sido Bangun Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
 3. Tata Kelola Penanganan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur.
 4. Revolusi Digital: Membangun Pemerintahan Efisien melalui Integrasi Teknologi Informasi dalam Administrasi Publik Menggunakan AI Chatbot.
 5. Studi Mix-Method: Analisis Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Program Kader Malaria di Wilayah Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) dan Daerah Endemis

Sekitarnya.

6. Perancangan Prototype Aplikasi Kiau Fisio Sebagai Peningkatan Akses dan Mutu Kesehatan di Kalimantan Timur.
 7. Strategi Implementasi Model Skill E-Passport ASEAN Toolbox Dalam Kebijakan Merdeka Belajar Rekognisi Pembelajaran Lampau Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Unggulan Bidang Pariwisata Pada Kebijakan Merdeka Belajar.
 8. Model Peningkatan Kualitas Kelompok Rentan di Provinsi Kalimantan Timur.
 9. Kesiapan Aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Menghadapi Society 5.0.
 10. Kesiapan Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Menghadapi Society 5.0.
 11. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Sejumlah 11 (sebelas) hasil riset bidang ekonomi dan Pembangunan telah berkontribusi memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan di bidang ekonomi dan Pembangunan, dengan judul riset:
1. Riset Biaya Logistik Ekspor Kalimantan Timur.
 2. Strategi Inovatif Optimalisasi Investasi Non-Migas.
 3. Riset Hilirisasi Produk Unggulan Kelapa Sawit.
 4. Pemanfaatan Pelepah Sawit sebagai Inovasi Kemasan Makanan.
 5. Analisis Potensi Nilai Serapan Karbon Biru di Kabupaten Paser.
 6. Rancangan Model Bisnis Rantai Pasok Limbah Sawit untuk Energi Baru.
 7. Pemetaan Potensi Ekowisata dan Entotourism.
 8. Strategi Pengembangan Kawasan Pancakota (Samarinda–Balikpapan–IKN–Tenggarong–Penajam).
 9. Riset Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kaltim.
 10. Revitalisasi Sungai Mahakam berbasis TOD.
 11. CSR dan Perilaku Ramah Lingkungan di Sektor Industri.
- e. Sejumlah 6 (enam) kolaborasi riset di bidang inovasi dan teknologi sebagai berikut:
1. Pengembangan Inovasi Modern Hydrogel Patch Sebagai Wound Dressing Dari Tanaman Lokal Kalimantan Timur Bajakah Tampala Untuk Pengobatan Komplikasi Infeksi Biofilm Staphylococcus Aureus Pada Ulkus Diabetikum.
 2. Kajian Pembelajaran Interaktif Bahasa Kutai Sebagai Penunjang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah Berbasis Game Agent-Ai.
 3. Pengembangan Aplikasi Inovasi “Etam-Edu” Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah Kalimantan Timur.
 4. Pengembangan Website Etamkawin Sebagai Platform Digital Untuk Meningkatkan Persiapan Pernikahan Di Kalimantan Timur.

5. Pengembangan Kapal Listrik Wisata Sebagai Alat Transportasi Ramah Lingkungan Di Sungai Karang Mumus.
6. Sistem Cerdas Peringatan Longsor: Teknologi Lokal Untuk Mitigasi Bencana

Indikator Kinerja 2:

B. Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah

Tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah adalah ukuran seberapa berhasil pemerintah daerah dalam menciptakan dan menerapkan berbagai bentuk inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan urusan lainnya, melalui efektivitas inovasi dengan kategori sangat inovatif, inovatif dan kurang inovatif. Nilai dari tingkat kematangan inovasi daerah diperoleh dari penginputan inovasi Perangkat Daerah Tahun 2025 ke Website Kementerian Dalam Negeri yang merupakan rangkaian dari pelaksanaan kegiatan fasilitasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025.

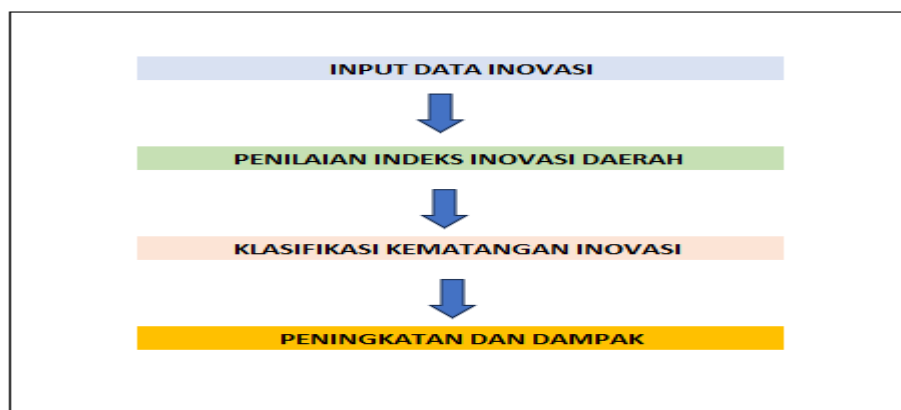
Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur sebagai koordinator dalam pelaporan inovasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melakukan inventarisasi inovasi dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya diseleksi untuk memperoleh nilai kematangan dari setiap inovasi berdasarkan bukti (evidence) dari setiap inovasi, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah} = \frac{\text{Jumlah Inovasi yang Memenuhi Kriteria Matang}}{\text{Jumlah Inovasi Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{- Target :} \quad = \frac{12}{27} \times 100\% = 44,44\%$$

$$\text{- Realisasi :} \quad = \frac{10}{27} \times 100\% = 37,04\%$$

$$\text{- Capaian Kinerja :} \quad = \frac{37,04}{44,44} \times 100\% = 83,35\%$$



Gambar 3.14 Keterkaitan Tingkat Kematangan Inovasi Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID)

Penjelasan Komponen Alur:

1. Input Data Inovasi: Daerah melaporkan inovasi (digital/non-digital) melalui aplikasi IGA (*Innovation Government Award*).
2. Penilaian (Indeks): Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri mengukur indeks dengan indikator yang mencakup satuan inovasi, serta *input*, *proses*, *output*, dan *outcome* dari inovasi tersebut.
3. Kematangan Inovasi: Skor indeks yang tinggi menentukan tingkat kematangan:
 - Inovatif: Skor menengah.
 - Sangat Inovatif: Skor tinggi.
 - Pelopor: Skor tertinggi.
4. Dampak: Hasil kematangan ini digunakan sebagai dasar pemberian insentif/penghargaan, sekaligus menjadi acuan untuk perbaikan inovasi tahun berikutnya.

Analisis Kinerja:

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.27 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah	%	44,44	37,04	83,35%

Sumber Data : Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Utama Tahun 2025

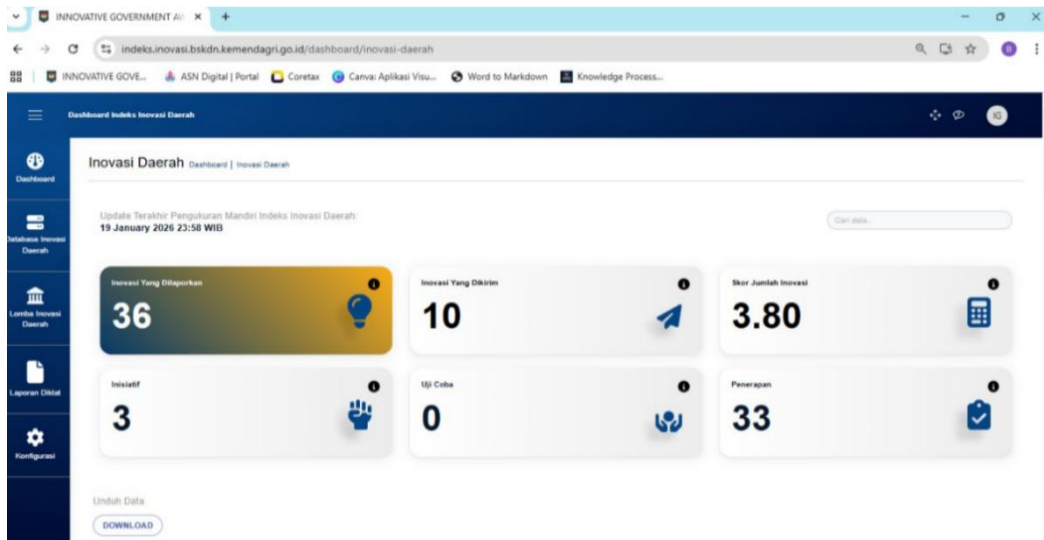
Nilai capaian kinerja sebesar 83,35% tersebut masuk dalam kriteria “Tinggi”, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai persentase semakin tinggi kapasitas inovasi daerah. Realisasi 37,04% tersebut diperoleh dari 10 (sepuluh) inovasi yang memenuhi kriteria matang (nilai kematangan ≥ 100) sebagai berikut:

1. Sippdeh (Sistem Perkembangan Politik Daerah) skor kematangan : 102, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
2. Sistem Informasi Data Disabilitas Berbasis Geospasial (SIDA BEBAGI) skor kematangan : 103, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
3. Aku Si Manis Madu (Evakuasi Ambulans Sistem Terpadu) skor kematangan : 102, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
4. Si Mata Laut Kaltim skor kematangan : 100, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.
5. SISTEM PELAYANAN KESEHATAN JIWA TERINTEGRASI (SIHATI) skor kematangan : 110 RSJD, Atma Husada Mahakam.
6. KETAN MAS RIDO (Kenali Tanda Kecemasan, Mengakhiri Hidup, Depresi Secara Online) skor kematangan : 103, RSJD Atma Husada Mahakam.
7. Sistem Informasi Jabatan (SI-JABAT) skor kematangan : 102 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. SI-KOMENG (Aksi Konsumen Cerdas Ayo Mengadu) skor kematangan : 102, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur.
9. Sistem Informasi Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor (SIMPATOR) skor kematangan : 108, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
10. TOKO KEBUN KALTIM skor kematangan : 103, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

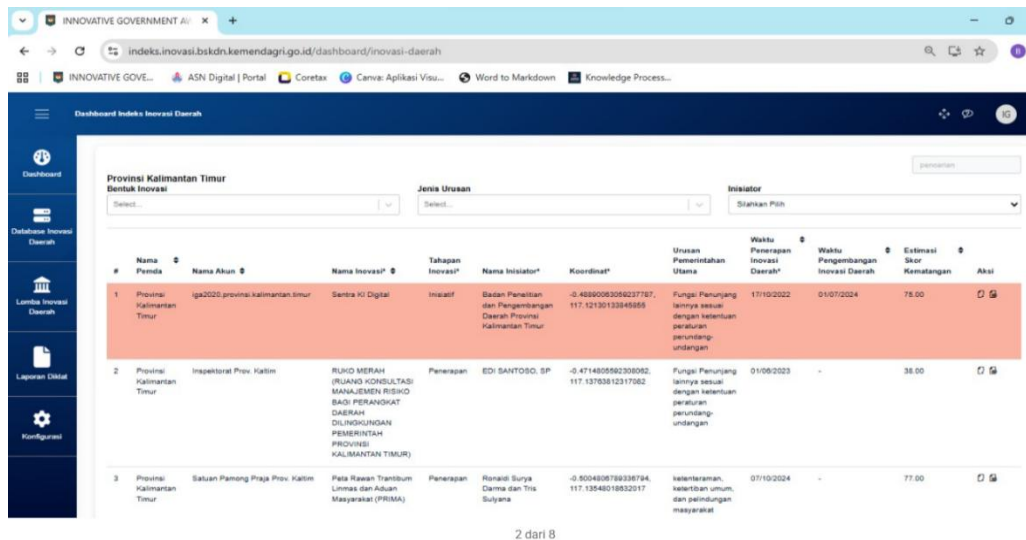
Adapun Perangkat Daerah yang menyampaikan inovasinya pada tahun 2025 berjumlah 27 (dua puluh tujuh) inovasi sebagai berikut:

No	Judul Inovasi	Kematangan
1	Sippdeh (Sistem Perkembangan Politik Daerah)	102.00
2	Sistem Informasi Data Disabilitas Berbasis Geospasial (SIDA BEBAGI)	103.00
3	Aku Si Manis Madu (Evakuasi Ambulans Sistem Terpadu)	102.00
4	SIKADI <u>MEMBARA</u> (Produksi Kasa Mandiri Memperkerjakan Karyawan Keterbatasan Gerak)	89.00
5	SIPKKP (Sistem Informasi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan)	60.00
6	Si Mata Laut Kaltim	100.00
7	Sistem Pelayanan Kesehatan Jiwa Terintegrasi (SIHATI)	110.00
8	Digitalisasi Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian Dengan Qr Code (DIGIT DOKU SIMANTU)	57.00
9	KETAN MAS RIDO (Kenali Tanda Kecemasan, Mengakhiri Hidup, Depresi Secara Online)	103.00
10	TEMU KRABAT (Teratur Mengonsumsi Obat dengan Kartu Peningkat Minum Obat)	95.00
11	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	89.00
12	Sistem Informasi Jabatan (SI-JABAT)	102.00
13	Smart-SPJ	6.00
14	SI-KOMENG (Aksi Konsumen Cerdas Ayo Mengadu)	102.00
15	Sistem Informasi Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor (SIMPATOR)	108.00
16	Simfoni Kaltim	95.00
17	SIGERAKaltim	95.00
18	Pusat Data Desa/Kampung Kalimantan Timur (Pusaka Kaltim)	3.00
19	Radio Siaga Bencana	91.00
20	TOKO KEBUN KALTIM	103.00
21	Best Employee	81.00
22	GERAI PINTER	88.00
23	SIRA (Sistem Informasi Realisasi Anggaran)	89.00
24	Konseling Kerja OPAK QTA	92.00
25	Peta Rawan Trantibum Linmas dan Aduan Masyarakat (PRIMA)	77.00
26	RUKO MERAH (Ruang <u>Konsultasi Manajemen Risiko Bagi Perangkat Daerah</u> Dilingkungan <u>Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur</u>)	38.00
27	Sentra KI Digital	75.00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025



Gambar 3.11 Aplikasi Pengisian Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri



Gambar 3.12 Skor Kematangan Inovasi Pada Aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.28 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023		2024		2025		% PENINGKATAN /PENURUNAN TAHUN 2025
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah	%	48,28	48,28	42,86	42,86	44,44	37,04	(-) 5,82

Sumber Data : Capaian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut dapat dianalisis bahwa terjadi penurunan kinerja sebesar 5,82% di tahun 2025, disebabkan oleh penurunan jumlah inovasi perangkat daerah yang memenuhi kriteria matang di tahun 2025. Tahun 2023 diperoleh 14 ($48,28=14/29$) inovasi inovasi Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria matang, tahun 2024 diperoleh 12 ($42,86=12/28$) inovasi Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria matang, sedangkan di tahun 2025 diperoleh hanya 10 ($37,04=10/27$) inovasi Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria matang.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.29 Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA 2029	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah	%	62.96	37.04	58.83

Sumber Data: Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 37,04% jika dibandingkan dengan target akhir Renstra (62,96%), menghasilkan tingkat kemajuan 58,83%. Nilai tersebut dapat dikategorikan 'Rendah' karena capaian kinerjanya $\leq 65\%$. Hal tersebut disebabkan nilai realisasi tahun 2025 (10 inovasi) lebih rendah dibandingkan target tahun 2029 (17 inovasi).

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional :

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dilakukan untuk mengukur efektivitas dan posisi relatif instansi dalam memberikan gambaran obyektif mengenai kualitas kinerja dibanding rata-rata nasional, dan untuk mengukur tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Timur, Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur melakukan analisis perbandingan realisasi kinerja dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan mengikuti perhitungan BRIDA Provinsi Jawa Timur (Jumlah inovasi yang memenuhi kriteria matang dengan nilai >90), sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah} = \frac{\text{Jumlah Inovasi yang Memenuhi Kriteria Matang}}{\text{Jumlah Inovasi Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.30 Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	REALISASI NASIONAL	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Inovasi Perangkat daerah dengan nilai kematangan inovasi diatas 90 (BRIDA Prov. Jawa Timur)	Inovasi	211		211	100%
2.	Jumlah Inovasi Perangkat daerah dengan nilai kematangan inovasi diatas 90 (Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur)	Inovasi	27	15		55.56%

Jumlah Inovasi Perangkat Daerah lingkup Provinsi Jawa Timur dengan nilai kematangan inovasi diatas 90 tahun 2025, berhasil memenuhi target 211 inovasi (100%). Sedangkan Jumlah Inovasi Perangkat Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai kematangan inovasi diatas 90 tahun 2025 hanya terpenuhi sebanyak 15 inovasi dari target 27 inovasi, tercapai 55,56%. Hal tersebut disebabkan masih banyak terdapat inovasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang belum memiliki kriteria matang atau belum melengkapi persyaratan kriteria kematangan inovasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam negeri dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan.

Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan nilai realisasi 37,04% dan tingkat capaian kinerja 83,35%, dianalisis berada pada kriteria atau predikat kinerja "Tinggi" karena belum mencapai 100%, disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

IX. Faktor Penghambat Tingkat Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

- Belum optimalnya ekosistem inovasi di daerah karena belum ada dasar hukum inovasi di daerah, sebagai dasar pelaksanaan inovasi di daerah.
- Belum optimalnya peran dan keterlibatan stakeholder seperti Kepala Daerah, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah dan anggota masyarakat sebagai inisiator Inovasi Daerah dalam mendukung penerapan sekurang-kurangnya 1 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 1 inovasi setiap tahunnya atau one agency one innovation.
- Masih rendahnya semangat perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk terus melakukan dan menghasilkan inovasi.
- Inovasi yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri belum optimal memperhatikan indikator inovasi beserta parameter/kriteria inovasi yang sudah ditentukan, karena setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi belum konsisten dalam melakukan inovasi.
- Kurangnya data dukung inovasi.

- Kurangnya kerjasama lintas bidang, lintas wilayah, dan lintas sektor.
- Gangguan pada web indeks.inovasi BSKDN Kemendagri RI.

V. Upaya atau Tindaklanjut

- Mendukung terwujudnya ekosistem inovasi di daerah perlu dibuatkan dasar hukum inovasi di daerah, sebagai dasar pelaksanaan inovasi di daerah.
- Optimalisasi peran dan keterlibatan stakeholder seperti Kepala Daerah, anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah dan anggota masyarakat sebagai inisiator Inovasi Daerah dalam mendukung penerapan sekurang-kurangnya 1 Perangkat Daerah 1 inovasi setiap tahunnya atau *one agency one innovation*.
- Inovasi yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri harus memperhatikan indikator inovasi beserta parameter/kriteria inovasi yang sudah ditentukan.
- Perlu konsistensi setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi dalam melakukan inovasi untuk mendorong inovasi yang belum memiliki kematangan cukup untuk terus melakukan pembaharuan dan melengkapi persyaratan sesuai kriteria.
- Optimalisasi koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait hasil inovasi yang akan di input pada web indeks.inovasi BSKDN Kemendagri RI.
- Pengembangan basis data inovasi.
- Memperkuat kemitraan terkait Inovasi.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan hubungan antara hasil yang dicapai dalam suatu upaya dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tingkat efisiensi sumber daya dapat dinilai dari kuantitas sumber daya yang digunakan dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Suatu kegiatan dikategorikan sebagai efisien jika hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan menggunakan sumber daya dengan kuantitas minimal.

Tabel 3.31 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2		4	5
1	Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah	83,35%	46,89%	36,46%

Sumber Data : Realisasi IKU dan Anggaran Tahun 2025

Anggaran untuk melaksanakan sasaran strategis tersebut pada tahun 2025 adalah sebesar 302.003.020 (Fasilitasi Indeks Inovasi Daerah/IID), dari nilai tersebut diperoleh realisasi anggaran sebesar 141.615.580 atau sebesar 46,89%. Sementara itu, capaian kinerja

tercapai 83,35%, sehingga untuk pencapaian sasaran tersebut, terdapat efisiensi sebanyak 36,46%.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Upaya pencapaian tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah didukung oleh "Program Penelitian dan Pengembangan Daerah", dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.32 Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja Sasaran Strategis 1

NO.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil riset dan inovasi yang ditindaklanjuti dalam daftar Kekayaan Intelektual (KI)	%	72,73	60,61	83,33
2.	Kegiatan Pengembangan inovasi dan teknologi	Persentase inovasi berbasis IPTEK yang terdaftar dalam HKI dan hak paten	%	53,00	70,00	132,08
3.	Sub Kegiatan Desiminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Jumlah Laporan Desiminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Laporan	1	1	100

METADATA INDIKATOR PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Metadata Indikator Program Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah formulasi perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja dari program/kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. Indikator Program 1.3

Nama Indikator	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Ditindaklanjuti Dalam Daftar Kekayaan Intelektual (KI) (%)
Definisi	Hasil riset dan inovasi perlu didaftarkan dalam daftar kekayaan intelektual, untuk memberikan perlindungan hukum atas hasil karya riset dan inovasi dan adanya pengakuan/apresiasi terhadap hasil karya riset dan inovasi
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi yang Ditindaklanjuti dalam Daftar Kekayaan Intelektual (KI)}}{\text{Jumlah Seluruh Hasil Riset yang Dihasilkan}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah hasil riset dan inovasi yang ditindaklanjuti dalam daftar kekayaan intelektual - Jumlah seluruh hasil riset yang dihasilkan

Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin meningkatnya perlindungan kekayaan intelektual dan pengakuan terhadap hasil karya riset dan inovasi
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM RI, Balitbangda/Brida Provinsi Kaltim

2. Indikator Kegiatan Pengembangan Inovasi Dan Teknologi

Nama Indikator	Persentase Inovasi Berbasis IPTEK yang Terdaftar Dalam HKI dan Hak Paten (%)
Definisi	Mengukur proporsi inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang telah difasilitasi dan berhasil didaftarkan secara resmi dalam sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan/atau hak paten.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah inovasi berbasis IPTEK yang terdaftar dalam HKI dan Hak Paten}}{\text{Jumlah inovasi yang difasilitasi}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah inovasi berbasis Iptek yang terdaftar dalam HKI dan hak paten - Jumlah inovasi yang difasilitasi.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin meningkatnya perkembangan inovasi dan teknologi yang memiliki HKI dan atau Hak Paten
Sumber Data	Balitbangda/Brida Provinsi Kaltim

Integrasi Program/Kegiatan Inovasi dalam RENSTRA dan RENJA Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur, telah dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan dalam DPA Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur. Tingkat kematangan inovasi daerah merupakan bagian dari penilaian Indeks Inovasi Daerah yang dilaksanakan melalui Fasilitasi Indeks Inovasi Daerah (IID), pada Sub Kegiatan Desiminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif.

III. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi

Dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas, Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi melalui monitoring dan evaluasi capaian kinerja akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik.

Tabel 3.33 Target Kinerja Sasaran Strategis 2

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	86,32
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,25

Sumber Data : IKU Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Perangkat Daerah, yang diperoleh melalui perhitungan:

<u>Rumus Perhitungan</u>
<p> $\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ </p> <p> <u>Keterangan :</u> - Total <u>dari nilai persepsi per unsur</u> - Total <u>unsur yang terisi</u> - Nilai <u>penimbang</u> </p>

Nilai AKIP merupakan hasil evaluasi yang diberikan kepada perangkat daerah atas kualitas kerjanya. Nilai hasil evaluasi AKIP yang terdiri dari: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja internal. Nilai AKIP Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dianalisis dengan menggunakan nilai AKIP Tahun 2024 (penilaian tahun 2025), karena pada saat disusunnya laporan ini penilaian AKIP Tahun 2025 belum dievaluasi oleh tim APIP.

Indikator Kinerja:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
2. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Analisis Kinerja:**1). Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Tabel 3.34 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	86,32	88.17	102.14
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75.25	75.25	100

Sumber Data : Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Utama Tahun 2025

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda Tahun 2025 tercapai dengan kriteria kinerja >100%. Capaian kinerja tersebut didukung oleh optimalisasi pelayanan publik baik dalam rangkaian kegiatan riset dan inovasi ataupun kesekretariatan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun capaian kinerja tersebut masuk kategori sangat tinggi, masih dibutuhkan strategi peningkatan pelayanan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur untuk melihat seberapa puas publik menilai pelayanan yang telah dilakukan.

Target nilai AKIP 75,25 dengan realisasi 75,25 menunjukkan pencapaian kinerja 100% (sesuai target). Nilai ini berada dalam kategori BB (Sangat Baik) atau Akuntabel, yang berarti instansi telah konsisten menerapkan manajemen kinerja (perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi) dengan efisien. Hasil ini merupakan akumulasi dari evaluasi AKIP internal/eksternal yang konsisten dalam mendorong peningkatan kinerja.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, lebih lanjut diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.35 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025		Peningkatan /Penurunan Tahun 2025
			Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	
1	2	3	4		5		6		7		8		9
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	81	84,20	82	85,22	83	90,32	83	86,32	86,32	88,17	102,14%
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	65 (B)	61,26 (B)	65 (B)	70,10 (B)	75 (BB)	70,00 (BB)	75 (BB)	75,25 (BB)	75,25	75,25	100%

Sumber Data : Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Utama Tahun 2025

Nilai AKIP dan IKM tahun 2021-2023 merupakan indikator kinerja yang mendukung Renstra Tahun 2019-2023, Nilai AKIP dan IKM Tahun 2024 mendukung pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026. Nilai AKIP dan IKM Tahun 2025 merupakan indikator kinerja yang mendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029.

Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda pada tahun 2021-2023 mengalami trend kenaikan cukup baik walaupun mengalami penurunan nilai pada 2024. Penurunan nilai tersebut disebabkan oleh menurunnya nilai rata-rata pada unsur pelayanan kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu penyelesaian dan kesesuaian produk pelayanan. Tahun 2025 nilai IKM Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan capaian kinerja hingga 102,14%. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah.

Nilai AKIP Balitbangda pada tahun 2021-2025 mengalami trend kenaikan cukup signifikan di tahun 2024 walaupun terjadi penurunan tahun 2021 dan 2023. Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 tercapai 100% dengan nilai 75,25(BB), membuktikan bahwa semakin tinggi nilai AKIP menunjukkan semakin meningkatnya kinerja perangkat daerah.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.36 Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA 2024-2026	TARGET AKHIR RENSTRA 2025-2029	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN (%)	
						2025*	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	85	88.41	88.17	103.73	99.73
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78.10	77.89	75.25	96.35	96.61

Keterangan : realisasi 2025* berdasarkan Renstra 2024-2026
realisasi 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029

Tingkat kemajuan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 (88,73%) lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 (103,73%), disebabkan target Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 lebih tinggi dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024-2026. Hal tersebut disebabkan kinerja pada Renstra Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan efisiensi anggaran, sehingga berpengaruh terhadap penetapan target kinerja. Tingkat kemajuan Nilai AKIP Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 (96,61%) lebih tinggi dibandingkan dengan Nilai AKIP berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 (96,35%). Angka ini menandakan konsistensi tinggi dalam pencapaian sasaran strategis, meskipun terdapat sedikit deviasi yang perlu dievaluasi untuk mencapai 100%.

4). Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional:

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dilakukan untuk mengukur efektivitas dan posisi relatif instansi dalam memberikan gambaran obyektif mengenai kualitas kinerja dibanding rata-rata nasional. Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur melakukan analisis perbandingan kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dan Nilai AKIP Perangkat Daerah, dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dengan perbandingan sebagai berikut:

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025		REALISASI		CAPAIAN	
			KALTIM	JAWA TIMUR	KALTIM	JAWA TIMUR	KALTIM	JAWA TIMUR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	86,32	86,32	88.17	86.89	102.14	100.67
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75.25	84.5	75.25	91.23	100	107.96

Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BRIDA Provinsi Jawa Timur dengan target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang sama yakni 86,32.

Nilai AKIP Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai AKIP BRIDA Provinsi Jawa Timur. BRIDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 memperoleh nilai AKIP 91,23 (AA) dengan peringkat kinerja Sangat Memuaskan, sedangkan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 memperoleh nilai AKIP dengan nilai 75,25 (BB) dengan peringkat kinerja "Sangat Baik". Nilai AKIP Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur sangat tertinggal jauh dengan BRIDA Provinsi Jawa Timur, dan untuk meningkatkan nilai AKIP dari Sangat Baik (BB) ke Sangat Memuaskan (AA) memerlukan transformasi bukan hanya pemenuhan administratif tetapi juga menjadi budaya kinerja yang berorientasi hasil. Fokus utamanya adalah sinkronisasi perencanaan, pengukuran kinerja individu yang terintegrasi, pemanfaatan sistem informasi, dan evaluasi internal yang ketat untuk memastikan efisiensi anggaran dan dampak langsung pada masyarakat.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan.

Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur

a. Penyebab peningkatan/penurunan capaian kinerja

Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024, hal tersebut didukung oleh adanya kerjasama tim yang baik pelaksana kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat dan perbaikan, monitoring-evaluasi dan pengendalian terhadap unsur-unsur pelayanan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur. Evaluasi dilakukan terhadap pelayanan Balitbangda, melalui metode survei untuk melihat seberapa puas publik menilai pelayanan yang telah dilakukan. Meskipun nilai tersebut melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih perlu dilakukan perbaikan, monitoring-evaluasi dan pengendalian terhadap unsur-unsur pelayanan.

b. Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja serta menghindari penurunan kinerja sasaran strategis:

Upaya Peningkatan pelayanan internal :

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
4. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
5. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
6. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
7. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
8. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.
9. Menunjuk atau menugaskan tim pelaksana kegiatan yang secara independen dapat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat IKM).
10. Secara berkala pimpinan unit menugaskan tim pelaksana yang ditunjuk tersebut melaporkan hasil pemantauan kinerja unit pelayanan kepada pimpinan, sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Upaya Tindak Lanjut untuk Peningkatan pelayanan eksternal:

- Dalam rangka peningkatan transparansi hasil penyusunan IKM unit pelayanan, rencana dan tindak lanjutnya wajib dipublikasikan kepada masyarakat berbasis informasi teknologi.
- Dalam rangka pelaksanaan penyusunan IKM unit pelayanan, melaporkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat IKM secara berkala kepada Perangkat Daerah pengampu urusan Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Pemerintah Daerah.
- Optimalisasi pengisian Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dengan

Balitbangda/BRIDA khususnya di bidang penyelenggaraan riset dan inovasi.

Namun dari Upaya peningkatan tersebut juga terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi seperti gangguan pada web BRIDA Prov. Kaltim dan kurangnya koresponden yang mengisi Survey Kepuasan Masyarakat, tapi dapat teratasi melalui upaya-upaya tersebut.

Nilai AKIP Perangkat Daerah

a. Penyebab peningkatan/penurunan capaian kinerja :

Nilai AKIP Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan nilai tersebut didukung oleh adanya perencanaan yang selaras dengan penganggaran, penetapan sasaran dan target kinerja yang tepat pada Perjanjian Kinerja dan optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi, **namun masih terdapat kendala-kendala yang dapat mempengaruhi penilaian SAKIP Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, diantaranya:**

1. Kendala pada aplikasi E-SAKIP.

- Tidak terekapnya isian Perjanjian Kinerja dan Realisasi pada level IV (pelaksana) tahun 2025 atas nama Eka Syachtiwati dan Anwar Salim. Semula pada awal bulan Februari 2026 isian capaian kinerja ASN tersebut masih terdapat di E-SAKIP 2025 dengan status hijau, namun setelah di cek kembali pada bulan maret 2026, data tersebut berstatus merah (belum mengisi). Penyebabnya adalah terdapat duplikasi atas nama-nama tersebut dan sistem menyimpan data salah satu duplikasi nama yang tidak ada isian perjanjian kinerja dan realisasinya, sehingga nama-nama tersebut tidak terekap dalam rekapitulasi pengisian kinerja triwulan 1 sampai dengan 4 tahun 2025, akan tetapi bukti pengisian dari masing-masing ASN tersebut masing terekam dalam aplikasi E-Sakip Tahun 2025. Penyebabnya lainnya yakni adanya update data pegawai pada saat pengisian E-Sakip Tahun 2026 pada bulan Pebruari 2026. Berikut disampaikan beberapa bukti Pengisian Realisasi Pada E-Sakip Tahun 2025 atas nama pegawai Balitbangda yang tidak terekap dalam menu rekapitulasi:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

15.	Muhammad Lathif 19730113200411001	Penyusun Laporan Keuangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Eka Nur Yanti 19780323200411003	Peneliti Ahli Muda	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Mai Nur 197812241983031002	Pengadministrasi Keuangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	Agus Suryadi 19720113200411004	Pengadministrasi Program Dan Tata Operasional Penelitian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.	Suhono 19880721200401002	Peneliti Ahli Pertama	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	Noorrahmahdaya Fitriy 19810223200411002	Penyusun Penelitian Dan Pengembangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21.	Fahriyah Hartati 198303032004091002	Peneliti Ahli Pertama	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22.	Marilyn 198303132011011001	Peneliti Ahli Pertama	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23.	Yuli Fikriani 198307172004031006	Peneliti Ahli Pertama	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24.	Nora Wahyuningih 198404132011011001	Peneliti Ahli Muda	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25.	Ratih Ferry Anggrani Setiawati 19840117200403006	Peneliti Ahli Pertama	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26.	Puput Wahyu Budiman 198701032011011002	Peneliti Ahli Pertama	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27.	Zhikry Fitria 198803132011011001	Peneliti Ahli Pertama	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28.	Amar Salim 198810032004011003	Pengelola Peralatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29.	Rudy Riawan 1978121320040311004	Pengadministrasi Umum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30.	Ti Sulistiawati 197804032004031003	Pengadministrasi Kepegawaian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31.	Fadliyah 197811132004011001	Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Lita Natalia 198812262011011006	Pengadministrasi Kepegawaian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33.	Syifa 198103032011011004	Teknis Perbaikan Kantor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34.	Budi Arhan 198201012011011006	Pengadministrasi Program Dan Tata Operasional Penelitian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35.	Amar 198204172004011002	Pengadministrasi Perencanaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36.	Yey Dharani 19870813210812005	Pengadministrasi Keuangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37.	Abdul Fiaz 198403132011011005	Pengadministrasi Umum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38.	Endi Muhammad Rusli 198403132011011005	Pengadministrasi Program Dan Tata Operasional Penelitian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
39.	MUHAMMAD SETIawan PRASONG 19810822200121010	Teknis Penelitian Dan Pengkajian Terapan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40.	Dewi Rahmasari 198809142011041004	Pengadministrasi Keuangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41.	Rahayu Hicaria 19880818199702007	Peneliti Ahli Muda	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42.	Fakhrul Anwar 198303032004011012	Pengadministrasi Perencanaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43.	Rizka Supriatni 197804032004031007	Penata Laporan Operasional	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44.	Adnan Ferozullah Palasma 198104042004110203	Penata Laporan Operasional	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45.	Aji Felanora Submatene 1981022720040311006	Penata Laporan Operasional	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46.	Aulia Febriani Putri 198301132004031015	Penata Laporan Operasional	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47.	Aulia Ningsih Nur 198711032004031009	Penata Laporan Operasional	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48.	Hessan Muryanto 198309112004031013	Penata Laporan Operasional	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
49.	Ika Maya Kumala Dewi 198803032011011009	Penata Laporan Operasional	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50.	Khulida Evi Sanjaya 198807032004031021	Penata Laporan Operasional	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51.	Meglatena 1982040320040310047	Penata Laporan Operasional	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52.	Muhammad Ihsan Ash Shiddiqi 1999011320040310003	Pengadministrasi Perencanaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53.	Muhammad Asif Mahdi 1982070320040310027	Penata Laporan Operasional	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54.	Muhammad Rizky Maulana 1981040320040310113	Penata Laporan Operasional	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55.	Rian Fahriatman 1988100320040310119	Penata Laporan Operasional	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 3.13 Bukti Pengisian Realisasi Pada E-Sakip Tahun 2025 Yang Tidak Terekap Dalam Menu Rekapitulasi

2. Belum optimalnya kualitas SDM penyusun SAKIP Balitbangda Prov. Kaltim.

- Terbatasnya jumlah ASN di bagian perencanaan program Balitbangda yang mempunyai keahlian dalam menyusun dan mengolah data SAKIP Balitbangda.
- Kurangnya minat pegawai yang akan ditempatkan di bagian perencanaan program Balitbangda
- Efisiensi/pemotongan anggaran.

b. Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja serta menghindari penurunan kinerja:

- Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi pada aplikasi IRIS
- Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi pada aplikasi E-SAKIP secara berkala
- Menciptakan budaya kerja yang dapat mendukung meningkatnya kinerja ASN Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim
- Komitmen pimpinan dalam penentuan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan
- Pejabat administrator masing-masing bidang melakukan monitoring pengisian secara intensif dan berkala per bulan dan memerintahkan operator bidang untuk merekam bukti pengisian E-Sakip.
- Melaporkan kondisi hilangnya isian realisasi tersebut ke Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim selaku pengelola aplikasi E-Sakip Provinsi Kalimantan Timur.
- Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Balitbangda Prov. Kaltim yang terampil dan inovatif melalui Pendidikan dan pelatihan penyusunan SAKIP.
- **Menambah jumlah ASN yang berkompeten dalam menyusun SAKIP Balitbangda Prov. Kaltim.**
- **Setiap ASN harus siap dan bersedia ditempatkan di bagian yang ditugaskan oleh pimpinan.**
- Menerapkan reward and funishment terhadap capaian kinerja yang telah diperjanjikan.
- Optimalisasi pelayanan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia sebelumnya serta menyusun skala prioritas penggunaan anggaran yang terbatas.

6). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan hubungan antara hasil yang dicapai dalam suatu upaya dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tingkat efisiensi sumber daya dapat dinilai dari kuantitas sumber daya yang digunakan dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Suatu kegiatan dikategorikan sebagai efisien jika hasil yang diharapkan dapat tercapai (secara kualitas dan kuantitas) dengan menggunakan sumber daya dengan kuantitas minimal.

Tabel 3.38 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	102.14	95.13	7,01
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	100	93.58	6,42

Sumber Data : Realisasi IKU dan Anggaran Tahun 2025

Persentase penyerapan anggaran dari indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah sebesar 95,13% dapat mengefisiensi anggaran sebesar 7,01% dengan capaian kinerja 102,14%, kondisi tersebut menunjukkan semakin tinggi capaian kinerja semakin tinggi tingkat efisiensi anggaran. Persentase penyerapan anggaran dari indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah sebesar 93,58% dapat mengefisiensi anggaran sebesar 6,42% dengan capaian kinerja 100%, kondisi tersebut menunjukkan semakin tinggi capaian kinerja semakin tinggi tingkat efisiensi anggaran

7). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Upaya pencapaian target sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi” didukung oleh pelaksanaan ”Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.39 Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja Sasaran Strategis 2

NO.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
		Indeks Kualitas layanan Kesekretariatan	Indeks	76	100	131.58
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	%	80.00	58.33	72.91
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi	Dokumen	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi	Dokumen	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi	Dokumen	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi	Dokumen	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi	Laporan	21	21	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	100
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya pergeseran anggaran belanja	%	4.70	2.22	47.23
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	70	70	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

NO.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	100
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	30	30	100
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian keberadaan Barang Milik Daerah terhadap catatan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	%	84.64	84.64	100
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi Pegawai	%	73.53	147.14	205.30
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	Paket	1	0	0
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	15	70	466.67
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	0	0
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan pelayanan umum kantor	%	76.00	100.00	131.58
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1	1	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	1	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	100
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

NO.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1	100
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	0
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung tugas Balitbangda/Brida	%	3.04	2.80	92.11
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	0	0	0
	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebel yang disediakan	Paket	1	1	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	10	0	0
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pelayanan Penunjang tugas Balitbangda	%	85.78	100.00	116.58
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Laporan	12	12	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	12	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	35	35	100
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	%	10.51	28.98	275.74
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Unit	5	5	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Unit	9	9	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	80	173	216.25
	Pemeliharaan Aset tak berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	1	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	4	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	3	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	2	100

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan untuk kegiatan operasional kantor, oleh 8 (delapan) kegiatan: (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diukur melalui perhitungan sebagai berikut:

a). **Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti**

- Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti adalah Rasio jumlah pengaduan atau laporan yang telah selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan total laporan yang masuk melalui kanal resmi pada aplikasi SP4N-LAPOR!, dengan rumus perhitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah pengaduan atau laporan yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan atau laporan yang masuk}}$$

Keterangan:

- Jumlah pengaduan atau laporan yang telah ditindaklanjuti
- Jumlah pengaduan atau laporan yang masuk

- Realisasi kinerja 100%, menunjukkan bahwa Perangkat Daerah telah berhasil merespons seluruh masukan, pengaduan, atau permintaan layanan dari pengguna (masyarakat/pelanggan) dalam kurun waktu tertentu, sebagai komitmen terhadap pelayanan prima dan akuntabilitas kinerja.

Gambar 3.14 Formulir Keluhan Pengaduan pada aplikasi SP4N-LAPOR!

- Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti diakomodir oleh Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dari target kinerja 80% telah terealisasi sebesar 58,33% dengan capaian kinerja 72,91%.

b). **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**

- Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan adalah alat ukur kinerja untuk menilai tingkat kepuasan dan efektivitas layanan internal yang diberikan oleh bagian kesekretariatan (perencanaan dan penganggaran, kapasitas SDM Aparatur, sarana dan prasarana kantor) kepada pegawai di dalam suatu Perangkat Daerah, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

Komponen Perhitungan	Bobot
Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	40%
Persentase realisasi anggaran	30%
Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	25%
Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	5%

Keterangan :

- Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu
- Persentase realisasi anggaran
- Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan
- Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik

- Perhitungan Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan diukur berdasarkan persentase realisasi indikator kinerja dari kegiatan: Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian/Pelatihan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah. Jika realisasi indikator kinerja kegiatan melebihi bobot komponen perhitungan maka program telah terpenuhi.
- Realisasi kinerja kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebesar 58,33%, maka bobot komponen perencanaan 40% terpenuhi.
- Realisasi kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah sebesar 47,23% (2,22/4,70), maka bobot komponen keuangan sebesar 30% terpenuhi.
- Realisasi kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah sebesar 147,14%, maka bobot komponen kepegawaian/pelatihan sebesar 25% telah terpenuhi.
- Realisasi kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah adalah $\geq 100\%$, maka bobot komponen Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebesar 5% telah terpenuhi.
- Berdasarkan perhitungan tersebut maka "Nilai Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan" Tahun 2025 diperoleh sebesar 100%.

D. Capaian Kinerja Lainnya

- Penghargaan atas capaian kinerja BRIDA OPTIMAL 2025 oleh BRIN sebagai Kajian Kebijakan yang dimanfaatkan.
- Penghargaan atas capaian kinerja sebagai Perangkat Daerah Dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender (PU) oleh Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan Prov. Kaltim.
- Penghargaan atas capaian kinerja sebagai Perangkat Daerah Se-Kalimantan Timur sebagai Badan Publik Informatif oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 3.15 Penghargaan Nasional dan Daerah Tahun 2025

- **Realisasi Anggaran Tahun 2025.**

Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.40 Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN (Rp)		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	%
(1)		(2)	(5)	(7)	(8)			
1.	SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan	Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah	60.61	84.85	139.99	7,164,353,983	5,777,325,727	80.64
		Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah	44.44	37.04	83.35	302,003,020	141,615,580	46.89
2	SASARAN 2 : Meningkatnya kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	86,32	88.17	102.14	2,048,213,151	1,948,489,819	95.13
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	75.25	75.25	100.00	18,310,627,255	17,135,731,675	93.58

Persentase tingkat kematangan inovasi perangkat daerah menjadi salah satu pendukung Silpa karena realiasi anggaran hanya 46,89%. Anggaran tersebut diperuntukkan pada kegiatan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 yang defisiensi pada belanja perjalanan dinas dan penyelenggaraan kegiatan di hotel.

• **Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**

Tabel 3.41 Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	27,825,197,409.00	25,126,822,801.00	90.30
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20,358,840,406.00	19,207,881,494.00	94.35
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	365,247,312.00	99,180,000.00	27.15
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	287,764,000.00	91,820,000.00	31.91
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4,799,828.00	585,000.00	12.19
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	4,799,828.00	1,950,000.00	40.63
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,941,828.00	2,665,000.00	67.61
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3,941,828.00	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53,192,000.00	2,160,000.00	4.06
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,808,000.00	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,667,569,862.00	13,371,426,092.00	97.83
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,415,336,438.00	13,134,287,092.00	97.91
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	242,040,000.00	235,200,000.00	97.17
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	723,000.00	-	-

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	579,500.00	-	-
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3,894,000.00	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4,996,924.00	1,939,000.00	38.80
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8,710,000.00	3,588,000.00	41.19
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,600,000.00	1,794,000.00	69.00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2,600,000.00	1,794,000.00	69.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	910,000.00	-	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,600,000.00	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	113,180,000.00	60,806,924.00	53.73
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11,180,000.00	8,866,000.00	79.30
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90,000,000.00	51,940,924.00	57.71
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12,000,000.00	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,048,213,151.00	1,948,489,819.00	95.13
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41,528,741.00	40,879,200.00	98.44
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	767,100,088.00	756,208,680.00	98.58
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	63,122,881.00	56,031,000.00	88.76
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81,080,750.00	80,212,714.00	98.93
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,333,500.00	10,882,500.00	37.10
Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,000,000.00	61,302,000.00	61.30
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	934,647,191.00	928,573,725.00	99.35
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	31,400,000.00	14,400,000.00	45.86
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54,749,714.00	50,893,500.00	92.96
Pengadaan Mebel	52,143,840.00	50,893,500.00	97.60
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,874.00	-	-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,600,000.00	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,412,803,369.00	3,040,391,308.00	89.09
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	561,629,205.00	393,119,348.00	70.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	390,412,800.00	230,494,200.00	59.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,445,761,364.00	2,278,117,760.00	93.15
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	688,366,998.00	633,105,851.00	91.97
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152,087,998.00	128,478,278.00	84.48
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	198,655,000.00	170,481,225.00	85.82
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,302,000.00	48,227,252.00	97.82
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	44,400,000.00	42,901,500.00	96.63
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	233,772,000.00	232,917,596.00	99.63

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,150,000.00	10,100,000.00	99.51
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7,466,357,003.00	5,918,941,307.00	79.27
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1,253,212,894.00	1,042,477,331.00	83.18
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	293,091,020.00	226,283,200.00	77.21
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	393,286,520.00	330,458,254.00	84.02
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	129,077,020.00	121,899,177.00	94.44
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	148,307,020.00	123,029,200.00	82.96
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	173,209,020.00	171,665,400.00	99.11
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	63,153,274.00	49,760,900.00	78.79
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	53,089,020.00	19,381,200.00	36.51
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1,103,393,770.00	1,077,748,280.00	97.68
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	237,372,120.00	227,341,102.00	95.77
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	186,218,000.00	184,197,430.00	98.91
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	171,642,000.00	167,521,200.00	97.60
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	162,068,000.00	157,615,400.00	97.25
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	185,787,650.00	182,698,384.00	98.34
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	160,306,000.00	158,374,764.00	98.80
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2,915,068,670.00	2,251,786,673.00	77.25
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	196,306,590.00	178,302,000.00	90.83
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	171,178,134.00	162,039,086.00	94.66
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	135,400,412.00	130,371,200.00	96.29
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	212,615,877.00	182,575,474.00	85.87
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	273,000,020.00	268,547,493.00	98.37
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	153,351,619.00	126,610,270.00	82.56
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	736,328,302.00	322,575,800.00	43.81
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	144,151,506.00	123,750,720.00	85.85
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	211,391,805.00	190,631,480.00	90.18
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	209,087,835.00	182,740,000.00	87.40
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	197,611,820.00	142,186,900.00	71.95
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	191,571,920.00	166,233,250.00	86.77
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	83,072,830.00	75,223,000.00	90.55

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2,194,681,669.00	1,546,929,023.00	70.49
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	813,569,328.00	570,257,117.00	70.09
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	190,966,044.00	154,662,320.00	80.99
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	897,995,959.00	672,869,628.00	74.93
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	197,678,020.00	67,382,798.00	34.09
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	94,472,318.00	81,757,160.00	86.54

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

□ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (01)

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 365.247.312,- pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 99.180.000,- atau 27,15%. Hal ini efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (01.01)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 287.764.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.820.000,- atau 31,91%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (01.02)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.799.828,- dan terealisasi sebesar Rp. 585.000,- atau 12,19%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(01.03)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.799.828,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.950.000,- atau 40,63%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran - pengeluaran selama Tahun 2025.

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD(01.04)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.941.828,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.665.000,- atau 67,61%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD(01.05)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.941.828,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (01.06)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 53.192.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.160.000,- atau 4,06% efisiensi hal ini disebabkan karena terdapa Honor Narasumber dan lain-lain tidak dapat dibayarkan karena merupakan Tupoksi dari Balitbangda Prov. Kaltim.

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(01.07)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 6.808.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% Hal ini disebabkan karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

□ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (02)

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 13.667.569.862,- pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.13.371.426.092,- atau 97,83%. Hal ini disebabkan karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024.

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (02.01)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.415.336.438,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.134.287.092,- atau 97,91%. hal ini disebabkan Hal ini disebabkan karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024.

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (02.02)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 242.040.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 235.200.000,- atau 97,17%. hal ini disebabkan Hal ini disebabkan karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (02.03)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 723.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Hal ini disebabkan karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (02.04)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 579.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Hal ini disebabkan karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024.

- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (02.06)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.894.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Hal ini disebabkan karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (02.07)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.996.924,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.939.000,- atau 38,80%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

□ **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (03)**

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 8.710.000,- pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.3.588.000,- atau 41,19%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (03.01)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.794.000,- atau 69%. hal ini disebabkan disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (03.02)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.794.000,- atau 69%. hal ini disebabkan disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (03.05)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 910.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. hal ini disebabkan disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (03.06)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

□ **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (05)**

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 113.180.000,- pada Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.60.806.924,- atau 53,73%. Hal ini disebabkan disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2025.

- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (05.05)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 11.180.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.866.000,- atau 79,30%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (05.09)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 90.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.940.924,- atau 57,71%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (05.11)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

□ Administrasi Umum Perangkat Daerah (06)

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 2.048.213.151,- pada Administrasi Umum Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.948.489.819,- atau 95,13%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (06.01)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 41.528.741,- dan terealisasi sebesar Rp. 40.879.200,- atau 98,44%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (06.02)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 767.100.088,- dan terealisasi sebesar Rp. 756.208.680,- atau 98,59%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (06.03)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 63.122.881,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.031.000,- atau 88,77%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (06.04)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 81.080.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 80.212.714,- atau 98,93%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (06.05)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 29.333.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.882.500,- atau 37,01%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Fasilitas Kunjungan Tamu (06.08)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 61.302.000,- atau 61,30%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (06.09)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 934.647.191,- dan terealisasi sebesar Rp. 928573725,- atau 99,35%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (06.10)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 31.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.400.000,- atau 45,86%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

□ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (07)

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 54.749.714,- pada Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 50.893.500,- atau 92,96%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Pengadaan Mebel (07.05)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 52.143.840,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.893.500,- atau 97,60%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (07.06)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.874,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (07.09)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

□ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (08)

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 3.412.803.369,- pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 3.040.391.308,- atau 89,01%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (08.01)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100%.

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (08.02)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 561.629.205,- dan terealisasi sebesar Rp. 393.119.348,- atau 70%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (08.03)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 390.412.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 230.494.200,- atau 59,04%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (08.04)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.445.761.364,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.401.777.760,- atau 98,20%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

□ Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (09)

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 688.366.998,- pada Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 633.105.851,- atau 91,97%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (09.01)

- Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 152.087.998,- dan terealisasi sebesar Rp. 128.478.278,- atau 84,47%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (09.02)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 198.655.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 170.481.225,- atau 85,82%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (09.06)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 49.302.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.227.252,- atau 97,82%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (09.08)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 44.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 42.901.500,- atau 96,62%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (09.09)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 233.772.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 232.917.596,- atau 99,64%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (09.10)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.100.000,- atau 99,51%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

□ *Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (2.1.01)*

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 1.253.212.894,- pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.042.477.331,- atau 83,18%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi(2.1.01.1)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 293.091.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 226.283.200,- atau 77,21%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintah Umum (2.1.01.2)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 393.286.520,- dan terealisasi sebesar Rp. 330.283.200,- atau 84,02%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (2.1.01.4)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 129.077.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 121.899.177,- atau 94,44%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (2.1.01.5)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 148.307.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 123.029.200,- atau 82,96%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (2.1.01.11).*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 173.209.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 171.665.400,- atau 99,11%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan (2.1.01.12)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 63.153.274,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.760.900,- atau 78,79%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan (2.1.01.13)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 53.089.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.381.200,- atau 36,51%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

□ *Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan (2.1.02)*

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp.1.103.393.770,- pada Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.077.748.280,- atau 97,68%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial (2.1.02.1)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 237.372.120,- dan terealisasi sebesar Rp. 227.341.102,- atau 95,78%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (2.1.02.2)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 186.218.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 184.197.430,- atau 98,92%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (2.1.02.3)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 171.642.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 167.521.200,- atau 97,60%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (2.1.02.6)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 162.068.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 157.615.400,- atau 97,25%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- *Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (2.1.02.9)*

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 185.787.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 182.698.384,- atau 98,34%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (2.1.02.10)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 160.306.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 158.374.764,- atau 98,80%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (2.1.03)

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 2.915.068.670,- pada Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 2.251.786.673,- atau 77,25%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (2.1.03.1)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 196.306.590,- dan terealisasi sebesar Rp. 178.302.000,- atau 90,83%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (2.1.03.2)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 171.178.134,- dan terealisasi sebesar Rp. 162.039.086,- atau 94,67%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (2.1.03.3) Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 135.400.412,- dan terealisasi sebesar Rp. 130.371.200,- atau 96,29%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penelitian dan Pengembang Pertanian, Perkebunan dan Pangan (2.1.03.4)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 212.615.877,- dan terealisasi sebesar Rp. 182.575.474,- atau 85,87%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (2.1.03.5)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 273.000.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 268.547.493,- atau 98,37%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penelitian dan Pengembang Energi dan Sumber Daya Mineral (2.1.03.6)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 153.351.619,- dan terealisasi sebesar Rp. 126.610.270,- atau 82,56%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (2.1.03.7)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 736.328.302,- dan terealisasi sebesar Rp. 322.575.800,- atau 43,81%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (2.1.03.8)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 144.151.506,- dan terealisasi sebesar Rp. 123.750.720,- atau 85,85%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (2.1.03.9)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 211.391.805,- dan terealisasi sebesar Rp. 190.631.480,- atau 90,18%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penelitian dan Pengembang Perhubungan (2.1.03.10)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 209.087.835,- dan terealisasi sebesar Rp. 182.740.000,- atau 87,40%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (2.1.03.11)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 197.611.820,- dan terealisasi sebesar Rp. 142.186.900,- atau 71,95%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penelitian dan Pengembang Penataan Ruang dan Pertanahan (2.1.03.12)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 191.571.920,- dan terealisasi sebesar Rp. 166.233.250,- atau 86,78%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (2.1.03.13)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 83.072.830,- dan terealisasi sebesar Rp. 75.223.000,- atau 90,56%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

□ Pengembangan Inovasi dan Teknologi (2.1.04)

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 2.194.681.669,- pada Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.546.929.023,- atau 70,48%. Hal ini disebabkan karena dilakukannya pergeseran yang menyebabkan perubahan karena kendala waktu pelaksanaan kegiatan

- Penelitian, Pengembangan, dan Perkayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi(2.1.04.1)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 813.569.328,- dan terealisasi sebesar Rp. 570.257.117,- atau 70,10%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Uji Coba dan Penerapan Rancangan Bangunan/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (2.1.04.2)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 190.966.044,- dan terealisasi sebesar Rp. 154.662.320,- atau 80,99%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah yang Bersifat Inovatif (2.1.04.3) Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 897.995.959,- dan terealisasi sebesar Rp. 672.869.628,- atau 74,93%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (2.1.04.4)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 197.678.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 67.382.798,- atau 34,09%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

- Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (2.1.04.5)

Pada tahun 2025 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 94.472.318,- dan terealisasi sebesar Rp. 81.757.160,- atau 86,54%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2025.

Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas capaian target dan efisiensi anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal dan evaluasi berkala melalui Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang realisasinya rendah karena adanya efisiensi anggaran dan SiLPA yang disebabkan oleh perubahan kebijakan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Renstra Tahun 2025-2029, dengan realisasi keuangan 90,30 % dengan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis pertama yang mendukung “Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan”, tercapai hingga 139,99%.
2. Sasaran Strategis kedua yang didukung “Meningkatnya kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi”, tercapai hingga 102,14%.

B. Upaya dan Tindakanjuz Perbaikan Kinerja

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur adalah:

- Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi melalui pelayanan riset dan inovasi pada aplikasi IRIS yang merupakan pusat layanan riset dan inovasi terpadu yang dikembangkan dan dikelola oleh Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur yang bertujuan untuk mendukung terciptanya ekosistem riset dan inovasi, baik dilingkup Daerah Kalimantan Timur, Nasional maupun Global.
- Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pemangku kepentingan dari pemanfaatan hasil riset dan inovasi telah dilakukan dan berhasil memenuhi target capaian kinerja tujuan/sasaran/program dengan diperolehnya data dukung hasil riset dan inovasi yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- Penguatan mekanisme kolaborasi berbasis kewenangan antar tingkat pemerintah, antar sektor dan pemangku kepentingan terkait aspek strategis riset dan pengembangan inovasi yang berdampak, berkelanjutan dan berdaya saing (Perjanjian Kerjasama).

Upaya tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan kinerja berupa:

- Menyusun dokumen perencanaan kinerja berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan serta melakukan reuiu secara berkala dan berjenjang.

- Melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian rencana aksi secara berkala.
- Penguatan basis data dan portal informasi urusan riset dan pengembangan inovasi prioritas yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terintegrasi dalam kebijakan strategis Pembangunan Daerah.
- Penguatan ASN Balitbangda/BRIDA provinsi Kalimantan Timur, penguatan fungsi kelembagaan pengampu urusan dan mitra program, penguatan sarana dan prasarana (workshop, media center), akses kemitraan pembiayaan dengan dunia usaha/hilirisasi serta akses kerjasama dalam riset pengembangan inovasi.
- Meningkatkan Budaya Kerja pada pelaksanaan AKIP tahun yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Tim Evaluasi SAKIP Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2025

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. MT. Haryono No. 126 Samarinda 75124 Telp. (0541) 201446, Fax. (0541) 732286
Website: litbang.kaltimprov.go.id email: humas.litbang@litbang.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALITBANGDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 0008.1.1/46/l.1/Litbang/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SAKIP TAHUN 2025
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA BALITBANGDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tindak lanjut hasil pemerkasaan terhadap kinerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, maka dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi atau hasil SAKIP tahun 2025 dan menetapkannya ke dalam Keputusan Kepala Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum di dalam lampiran keputusan ini, sesuai tugas dan fungsinya dipandang sesuai untuk diangkat dan ditetapkan dalam tim dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1996 tentang Perkeruan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Prov. Kaltim Tahun 2024-2026.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Evaluasi SAKIP Tahun 2025 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan Susunan Personil Tim sebagaimana tercantum dalam laporan keputusan ini.
- KEDUA** : Tujuan pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dikum kesatu adalah dalam rangka :
- Melakukan reviu atas implementasi SAKIP Tahun 2025;
 - Menginventarisir permasalahan dan kendala terkait implementasi SAKIP tahun 2025;
 - Melakukan tindak lanjut atau rekomendasi evaluasi terhadap LKIP Tahun 2025;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dikum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya harus tertib adminitrasi, tertib ketentuan peraturan, tertib kaidah penelitian dan tertib pelaksanaannya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 mata anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0008.1.1/46/l.1/Litbang/2025 tentang Pembentukan Tim Evaluasi SAKIP Tahun 2025 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

SUSUNAN TIM

- PENANGGUNGJAWAB :**
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KETUA :**
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- ANGGOTA :**
 - Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - Kepala Sub Bagian Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - Anwar Salim A.Md., Pelaksana Bagian Perencanaan Program Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - Eka Syachtawati, S.Hut., M.Si, Pelaksana Sub Bagian Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - Fahrizal Anwar, Pelaksana Perencanaan Program Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - Aulia Noviyanti Noor, S.K.M, Pelaksana Sub Bagian Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - Hersyom Maryanto, S.Kom, Pelaksana Sub Bagian Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dikum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya melaporkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan bilamana kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 8 Januari 2025



Dr. M. H. FITRIANSYAH, S.T., M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19731127 200604 1 009

j. Chintya Kania Dea, S.M, Pelaksana Sub Bagian Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.



Dr. M. H. FITRIANSYAH, S.T., M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19731127 200604 1 009

Lampiran 2: Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

JL. MT. Haryono No. 126 Samarinda 75124 Telp. (0541) 201446, Fac. (0541) 732286
Website: litbang.kaltimprov.go.id email: humas.litbang@litbang.kaltimprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr.M. Ir. Fitriansyah, S.T., M.M
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Badan Riset dan Inovasi Daerah) Provinsi Kalimantan Timur

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si
Jabatan : Pj. Gubernur Kalimantan Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami serta menjadi dasar dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 13 Januari 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. Gubernur Kalimantan Timur

Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si

PIHAK PERTAMA,
Kepala Balitbangda (BRIDA) Prov. Kaltim



Dr. M. Ir. Fitriansyah, S.T., M.M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tujuan: Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi sebagai Bahan/Referensi Perumusan Kebijakan Pembangunan, Pengembangan Dunia Usaha, Industrialisasi, dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis IPTEK (%)	69,70
		Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	62,87
2.	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk Peningkatan Potensi Unggulan Daerah dan Penyelesaian Permasalahan Daerah Secara Berkelanjutan	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras untuk Penyelesaian Masalah Pembangunan dan Peningkatan Potensi Unggulan Daerah (%)	60,61
		Persentase Tingkat Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (%)	44,44
3.	Sasaran 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pendukung Penyelenggaraan Riset dan Inovasi	Nilai AKIP Balitbangda/BRIDA (Nilai)	75,26
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,32

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.186.382.183	APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.029.326.082	APBD
	Jumlah	35.215.708.265	

Samarinda, 13 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Pj. Gubernur Kalimantan Timur



Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang (BRIDA) Prov. Kaltim



Dr. M. In. Fitriansyah, S.T., M.M

Lampiran 3: Surat Permohonan Penyampaian Hasil Riset Tahun 2024

 **PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Kesuma Bangsa Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75123
Telepon/Fax: (0541) – 742283
website: bappeda.kaltimprov.go.id email: bappeda@kaltimprov.go.id

Samarinda, 2 Januari 2025

Nomor : 000.7.2.1 / 19 /Bapp-III
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penyampaian Hasil Riset Tahun 2024

Kepada Yth.
Kepala Balitbangda / BRIDA Prov. Kaltim
di –

Tempat

Sehubungan dengan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah baik Rencana Kerja Pembangunan Daerah maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berkenaan dengan hal tersebut dimohon untuk dapat menyampaikan hasil riset/penelitian yang dilakukan oleh Balitbangda/BRIDA sebagai bagian dalam mendukung proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdra. Muhammad Hamsani (085345992283).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

Yustinando



Lampiran 4: Penyampaian Laporan Akhir Riset Tahun 2021-2024



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

JL. MT. Haryono No. 126 Samarinda 75124 Telp. (0541) 201446, Fac. (0541) 732286
Website: litbang.kaltimprov.go.id email: humas.litbang@litbang.kaltimprov.go.id

Samarinda, 17 Januari 2025

Nomor : 045.4/43/I.1/ Litbang/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 5 (lima) Lembar
Hal : Penyampaian Laporan Akhir Riset Tahun 2021-2024

Yth. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
Di – Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara nomor 000.7.2.1/29/Bapp-III tertanggal 2 Januari 2024 perihal permohonan Hasil Riset Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Riset Tahun 2021 s.d 2024.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdri. Eka Syachtiawati (081346460522)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

Dik. J. Fitriansyah, S.T., M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 197311272006041009

LAMPIRAN SURAT NOMOR : 045.4/4/LITBANG/2025

JUDUL LAPORAN RISET TAHUN 2021-2024

RISET/KAJIAN TAHUN 2021

No.	Judul Riset/Kajian
Bidang Sosial dan Pemerintahan	
1.	Studi Kelayakan Kajian Pembangunan Railway Di Provinsi Kalimantan Timur (Tinjauan Strategis Konektivitas Pembangunan IKN Melalui Pembangunan Jalur Transportasi Kereta Api)
Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
1.	Kajian Eksistensi dan kemnafaatan Tiga Danau Di Wilayah Kab. Kutai Kartanegra dan Kab. Kutai Barat (Tinjauan Strategis Terhadap Danau Semayang, Melintang dan Jempang)
2.	Kajian Analisis Penataan dan Pemasaran KEK Maloy (Tinjauan Strategis Pemasaran KEK Maloy Sebagai Pintu Gerbang ALKI II Selat Makasar)
3.	The Frontier of Forest City : Joint Reseach BRIN & NOW Netherland

RISET/KAJIAN TAHUN 2022

No.	Judul Riset/Kajian
Bidang Sosial dan Pemerintahan	
1.	Kajian Situs/Sumberdaya Budaya Ibu Kota Nusantara
Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
1.	Master Plan Food Estate Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Di Provinsi Kaltim
2.	Kajian Aksesibilitas dan Konektivitas Jalan Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Di Provinsi Kaltim
3.	Kajian Sistem Informasi Pemerintahan Elektronik (Smart City) Pemprov dan Kab/Kota Provinsi Kaltim Dalam Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara

Bidang Inovasi dan Teknologi	
1.	Kajian Mengenai Pembangunan Kawasan Pariwisata Bahari Di Kabupaten Berau
2.	Kajian Ketersediaan Air Bersih untuk Mendukung Ibu Kota Negara
3.	Kajian mengenai Pembangunan Iradiator di Kawasan Industri Buluminung di Kabupaten Penajam Paser Utara

RISET/KAJIAN TAHUN 2023

No.	Judul Riset/Kajian
Bidang Sosial dan Pemerintahan	
1.	Kajian Identifikasi Permasalahan dan Penanggulangan Pekerja Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
2.	Persepsi Perempuan Di Kutai Kartanegara Terhadap Pengaruh Gadget Dalam Pendidikan Anak
3.	Kemandirian Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur
4.	Riset Pengembangan Model Desa Pembelajar Kreatif dan Inovatif Dalam Mendukung Kemandirian Pada Desa Binaan di Lingkungan Pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur
5.	Preferensi Masyarakat Terhadap Isu dan Tantangan Pembangunan Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur
6.	Kajian Sumber Daya Budaya di Kawasan Ibu Kota Negara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
7.	Model Pengelolaan Bantuan Keuangan Di Provinsi Kalimantan Timur
8.	Kesehatan Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Timur
9.	Model Hubungan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara Dengan Pemerintah Daerah Mitra Di Provinsi Kalimantan Timur
10.	Preferensi Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Di Media Daring
Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
1.	Riset Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Objek Wisata di Sekitar IKN
2.	Riset Analisis Sumberdaya Manusia perindustrian kaltim Dalam Menghadapi Era Industri 4.0

3.	Riset Pemetaan Potensi Sumberdaya Lokal sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Pesisir IKN
4.	Studi Kelayakan Kawasan Sentra Pengembangan Pertanian di Provinsi Kalimantan Timur
5.	Evaluasi Status Kesesuaian Kawasan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terhadap Kondisi Real Lahan Pascatambang Di Kawasan Rencana Ibu Kota Negara Indonesia.
6.	Model Mitigasi Bencana Hidrometeorologi di Daerah Penyangga Ibukota Negara Baru Dalam Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan
7.	Studi Sebaran dan Proses Pembentukan Panas Bumi di Kalimantan Timur
8.	Riset Peluang Pelestarian Ekosistem Hutan dan Potensi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Mangrove Untuk Perekonomian Masyarakat Kalimantan Timur
9.	Penyusunan Naskah Kebijakan Evaluasi Transformasi Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur
10.	Riset Valuasi Ekonomi Lingkungan Dampak Banjir di Daerah Aliran Sungai Mahakam
11.	Riset Aksesibilitas Ruas Jalan Nasional Terhadap Pembangunan pada Regional Kalimantan
12.	Riset Identifikasi Potensi Lokal Pada Kawasan Periurban IKN
13.	Riset Pengembangan Potensi Lokal Pada Kawasan Periurban IKN
14.	Riset Konsep Bermukim Masyarakat Paser di Ibukota Negara Nusantara
15.	Riset Integrasi Jaringan Transportasi Dalam Pengembangan Kawasan Ekowisata di Provinsi Kalimantan Timur
Bidang Inovasi dan Teknologi	
1.	Kajian Pemanfaatan Lahan Untuk Sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan di Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang - Mangkalihat
2.	Potensi Energi Baru Terbarukan Berbasis Small Modular Reactor (SMR) di Provinsi Kalimantan Timur
3.	Analisis Kemandirian Pangan Sumber Karbohidrat dan Protein Di Provinsi Kalimantan Timur

RISET/KAJIAN TAHUN 2024

No.	Judul Riset/Kajian
Bidang Sosial dan Pemerintahan	
1.	Identifikasi Permasalahan dan Model Rekayasa Sosial (Peningkatan dan Percepatan Daya Saing Manusia di Provinsi Kalimantan Timur
2.	Model Kolaborasi Usaha Badan Milik Desa dan Industri Provinsi Kalimantan Timur
3.	Identifikasi dan Peningkatan Kualitas Kelompok Rentan di Provinsi Kalimantan Timur
4.	Preferensi Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Pengobatan Mata di Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur
5.	Pengembangan Sediaan Farmasi Berbasis Minyak Ikan yang Hidup Di Sungai Mahakam untuk Alternatif Pengentasan Stunting Di Provinsi Kalimantan Timur
6.	Strategi Pelestarian Budaya Berbasis Komunitas Kalimantan Timur
7.	Model Skill E Passport Berbasis Asean Tollbox : Rekoqnisi Pembelajaran Masa Lampau Siswa Smk Pusat Keunggulan Bidang Pariwisata Pada Kebijakan Merdeka Belajar
8.	Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Menurut Sektor dan Jabatan Di Provinsi Kalimantan Timur
Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
1.	Pasar Potensial Internasional Bagi Produk-Produk Potensial Ekspor Kalimantan Timur
2.	Analisis Kesiapan Usaha Mikro Gula Semut Lokal dan Prospek Pengembangan Penambahan Aroma Herbal Kaltim untuk Pasokan Kebutuhan Pangan Di Daerah Penyangga dan Ibu Kota Negara
3.	Analisis Rantai Pasok Sektor Perikanan alam Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Di Provinsi Kalimantan Timur
4.	Perencanaan Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Untuk Pembangunan Agro Tekno Park (ATP) di Kalimantan Timur
5.	Analisis Potensi Nilai Serapan Karbon Biru Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Kebijakan Ekonomi Biru Di Provinsi Kalimantan Timur
6.	Pemetaan dan Strategi Transisi Energi Serta Pengukuran Potensi Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Guna Mendukung Net Zero Emission Di Kalimantan Timur

7.	Analisis Ketangguhan Desa Di Sekitar Hutan dan Lahan Rawan Bencana Kebakaran Di Kabupaten Kutai Kertanegara
8.	Konsep Buffer Zone (Wilayah Penyangga) Ibu Kota Nusantara Di Provinsi Kalimantan Timur dan Sekitarnya
9.	Strategi Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Wilayah Regional Kalimantan Timur Di Sepanjang ALKI II
10.	Strategi Informasi Geospasial Banjir Kabupaten Mahakam Hulu Di Provinsi Kalimantan Timur
11.	Valuasi Perhitungan Ongkos Angkut Hasil Usaha Tani Di Kalimantan Timur
12.	Mitigasi Bencana Alam Pada Infrastruktur Jalan dan Jembatan Di Provinsi Kalimantan Timur
13.	Riset Strategi Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Timur

Lampiran 5: Judul Laporan Riset/Inovasi Tahun 2025

BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

NO.	JUDUL RISET/INOVASI
1.	Studi Mix Methods : Analisis Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Program Kadier Malaria di Wilayah Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) dan Daerah Endemis Sekitarnya (Kalaborasi Riset dan Inovasi Strategis)
2.	Riset Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur
3.	Kajian Tentang Evaluasi Kelembagaan (Struktur Organisasi) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
4.	Revolusi Digital Membangun Pemerintahan Efisiensi Melalui Integrasi Teknologi Informasi Dalam Administrasi Publik Menggunakan AI Chatbot (Kalaborasi Riset dan Inovasi Strategis)
5.	Identifikasi dan Peningkatan Kualitas Kelompok Rentan di Provinsi Kalimantan Timur
6.	Laporan Hasil Penelitian Hilirisasi Produk "Haruan Oil Plus" Kapsul Sebagai Upaya Pencegahan Stunting
7.	Perancangan Prototipe Aplikasi Kiau Fisio Sebagai Peningkatan Akses dan Mutu Kesehatan di Kalimantan Timur
8.	Kalaborasi Bumdes, Industri, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah
9.	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan Evaluasi Peraturan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
10.	Hilirisasi Produk Unggulan Kalimantan Timur Untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Daerah
11.	Riset Strategi Implementasi Model Skill E-Pasport Asean Toolbok Dalam Kebijakan Merdeka Belajar Rekognisi Pembelajaran Lampau Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Unggulan Bidang Pariwisata Pada Kebijakan Merdeka Belajar
12.	Kesiapan ASN Dalam Menghadapi Revolusi Society 5.0

BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

NO.	JUDUL RISET/INOVASI
1.	Riset Biaya Logistik Ekspor Kalimantan Timur : Analisis dan Strategi Kebijakan Efisiensi
2.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga Kebutuhan Pokok di Provinsi Kalimantan Timur (Kalaborasi Riset Dan Inovasi Strategis Provinsi Kalimantan Timur)
3.	Kajian Strategis Pembangunan Agro Tekno Park (ATP) Pada Lahan Bekas Tambang Di Provinsi Kalimantan Timur
4.	Analisis Potensi Nilai Serapan Karbon Biru Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Kebijakan Ekonomi Biru Di Provinsi Kalimantan Timur
5.	Rancangan Model Bisnis dan Rantai Pasok Limbah Sawit Padat dan Cair Untuk Peningkatan Ketahanan Energi Baru Terbarukan Guna Mendukung Transisi Energi di Kalimantan Timur
6.	Potensi Ekowisata Serangga (Entotourism) Di Kalimantan Timur (Studi Strategi Inovatif Untuk Mengoptimalkan
7.	Riset Pemetaan Destinasi dan Potensi Ekowisata di Provinsi Kalimantan Timur
8.	Riset Hilirisasi Produk Unggulan Minyak Sacha Inchi di Provinsi Kalimantan Timur
9.	Riset Kebutuhan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Pelabuhan Untuk Mendukung Kalimantan Timur Sebagai Super Hub Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Timur
10.	Riset Revitalisasi Sungai Mahakam Dengan Pendekatan Analisis TOD (Transit-Oriented Development) di Provinsi Kalimantan Timur
11.	Riset Pelestarian Urban Heritage Pada Kawasan Perkotaan Di Provinsi Kalimantan Timur
12.	Riset Strategi Pengembangan Pancakota (Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Ibukota Nusantara, Kawasan Perkotaan Tenggarong, Dan Kawasan Perkotaan Penajam) Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional Dan Regional
13.	Sistem Cerdas Pemantauan Spasial Keanekaragaman Hayati Di Kalimantan Timur Berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Geographic Information System (GIS)
14.	Kajian Strategi Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Pada Perusahaan Tambang Batu Bara Di Kalimantan Timur (Studi Kasus PT. Kideco Jaya Agung, PT. Indominco mandiri dan PT. Kaltim Prima Coal)
15.	Inovasi pemanfaatan Pelapah Kelapa Sawit Sebagai Bahan Alternatif untuk Kemasan Makanan (Kolaborasi Riset Dan Inovasi Strategis Provinsi Kalimantan Timur)
16.	Strategi Inovatif Untuk Mengoptimalkan Investasi di Sektor Non Migas : Pemetaan Peluang dan Tantangan (Kalaborasi Riset dan Inovasi Strategis)

BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

NO.	JUDUL RISET/INOVASI
1.	Kajian Strategis Pembangunan Argo Techno Park (Atp) Pada Lahan Bekas Tambang Di Provinsi Kalimantan Timur
2.	Fasilitasi Pembangunan Inovasi dan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kalimantan Timur
3.	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Tahun 2025
4.	Penjaringan Peserta Inovasi dan Kreativitas Pelayanan Perangkat Daerah (PEPES IKAN PEDDA) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2025
5.	Kegiatan Fasilitasi Uji Coba dan Pengembangan Purwarupa Tahun 2025
6.	Fasilitasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025
7.	Jurnal Riset Pembangunan Tahun 2025
8.	Sistem Cerdas Peringatan Longsor : Teknologi Lokal Untuk Mitigasi Bencana
9.	Pengembangan Kapal Listrik Wista Sebagai Alat Transportasi Ramah Lingkungan Di Sungai Karang Mumus (Kolaborasi Riset Dan Inovasi Strategis Provinsi Kalimantan Timur)
10.	Pengembangan Website Etamkawin Sebagai Platform Digital Untuk Meningkatkan Persiapan Pernikahan Di Kalimantan Timur (Kolaborasi Riset Dan Inovasi Strategis Provinsi Kalimantan Timur)
11.	Pengembangan Aplikasi Inovasi "ETAM ADU" Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah Kalimantan Timur (Kolaborasi Riset Dan Inovasi Strategis Provinsi Kalimantan Timur)
12.	Kajian Pembelajaran Interaktif Bahasa kutai Sebagai Penunjang Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah Berbasis Game Agent – AI (Kolaborasi Riset Dan Inovasi Strategis Provinsi Kalimantan Timur)
13.	Pengembangan Inovasi Modern Hidrogel Pacht sebagai Wound Deressing dari tanaman Lokal Kalimantan Timur Bajakah Tampala Untuk Pengobatan Komplikasi Infeksi Biofilm Pada Ulukus Diabetikum (Kolaborasi Riset Dan Inovasi Strategis Provinsi Kalimantan Timur)

NASKAH KEBIJAKAN (POLICY BRIEF)

NO.	JUDUL NASKAH KEBIJAKAN
1.	Meninjau Ulang Penguasaan PAD pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Upaya Penataan Kewenangan dan Kapasitas Hukum dalam Pengelolaan Retribusi Daerah
2.	Kaltim Lestari Penguatan RPPLH Berbasis Kewenangan Daerah
3.	Dukungan Pemerintah Provinsi Melalui Bantuan Keuangan Spesifik Dalam Pembangunan Sanitasi
4.	Sinergi Fisikal : Bantuan Keuangan Memacu Pembangunan dan Pemerataan di Provinsi Kalimantan Timur
5.	Efektifkah Grastispol dan Jospol
6.	Validitas Data Kekerasan Berbasis Simfoni PPA
7.	Strategi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Kalimantan Timur